

**MODAL SOSIAL
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM
DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT
EKONOMI MASYARAKAT**

(Studi pada Desa Berprestasi di Provinsi Lampung)

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam



Oleh

F A I Z A L

NPM. 1303040003

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM



**PROGRAM DOKTOR
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1441 H/2019 M

**MODAL SOSIAL
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM
DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT
EKONOMI MASYARAKAT**

(Studi pada Desa Berprestasi di Provinsi Lampung)

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam



Promotor:

Promotor I : Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, M.A.
Promotor II : Prof. Dr. H. Marzuki Noor, M.S.
Promotor III : Dr. Hasan Mukmin, M. Ag.

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM



**PROGRAM DOKTOR
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1441 H/2019 M

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faizal

NPM : 1303040003

Prodi : Program Doktor Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Institusi : Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul "Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat (Studi pada Desa Berprestasi di Provinsi Lampung)" benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, November 2019



Yang Menyatakan,

Faizal
NPM. 1303040003

Abstrak

**MODAL SOSIAL
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM
DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT EKONOMI MASYARAKAT**
(Studi pada Desa Berprestasi di Provinsi Lampung)

Oleh:

Faizal

Konsep pembangunan dengan menggunakan pendekatan *top down* yang memposisikan masyarakat sebagai obyek membentuk masyarakat kurang berdaya. Kurang berdaya dalam aspek sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta menurunnya pengamalan nilai atau norma yang berlaku pada masyarakat, baik bersifat normatif yang bersumber dari agama maupun budaya. Oleh karena itu, lahir paradigma pembangunan yang lebih berpihak pada masyarakat bahkan ada korelasinya dengan ajaran Islam.

Permasalahan yang muncul adalah masyarakat Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur sebagai desa pemenang 1 (satu) lomba desa Provinsi Lampung Tahun 2014, secara ekonomi tingkat ekonomi dalam tingkat sejahtera. Tetapi, pendayagunaan norma-norma kultural dalam hal *trust*, *social network*, dan *social norm* secara alamiah kurang dipertimbangkan, sehingga tingkat ekonomi masyarakat yang dilihat dari indikator produktivitas, distribusi, dan konsumsi dalam tingkat sejahtera, tetapi lemah dalam jaringan dan masih ketergantungan terhadap pihak lain.

Oleh karena itu, perlu ada kajian tentang pengaruh modal sosial terhadap tingkat ekonomi masyarakat di desa berprestasi Provinsi Lampung, pengaruh pemberdayaan masyarakat Islam terhadap tingkat ekonomi masyarakat di desa berprestasi Provinsi Lampung, pengaruh modal sosial terhadap proses pemberdayaan masyarakat Islam di desa berprestasi Provinsi Lampung, dan pengaruh modal sosial dan pemberdayaan terhadap tingkat ekonomi masyarakat di desa berprestasi Provinsi Lampung.

Implikasi yang diharapkan dari hasil penelitian disertasi ini adalah (1) *Secara teoritik*, berimplikasi dalam pengembangan teori-teori pemberdayaan masyarakat Islam dan modal sosial serta pengaruhnya terhadap tingkat ekonomi masyarakat; (2) *Secara empirik*, berimplikasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan, seperti pemerintah tingkat pusat sampai pada elit masyarakat desa; (3) *Secara normatif*, berimplikasi bagi penguatan nilai-nilai agama dan kultural yang berlaku pada masyarakat.

Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan *mixed research*, yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif tergolong dalam jenis penelitian survey dengan menggunakan angket (kuesioner) sebagai alat pengumpul data terhadap 38 responden. Teknik analisa yang digunakan adalah statistik deskriptif dan regresi berganda dengan bantuan program SPSS Versi 23 sebagai alat bantu. Pendekatan kualitatif menggunakan interview, observasi, dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data terhadap informan yang ditentukan dengan cara *snowball sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis domein dan analisis komponensial.

Temuan penelitian Disertasi ini adalah: (1) tingkat kepercayaan dan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku pada masyarakat sangat tinggi, tetapi status dan kekuatan hubungan dalam membentuk jaringan tergolong sedang. Pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari penyadaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan pemberdayaan dalam katagori *tinggi*. Masyarakat Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung sangat produktif produktivitas, distributif, dan konsumtif. (2) kejujuran, tanggung jawab, kerjasama dan kepatuhan terhadap norma-norma kesepakatan berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas, distribusi, dan konsumsi. Kesadaran mengikuti pelatihan dan penyuluhan, pengorganisasian, dan keaktifan dalam kegiatan pendampingan berpengaruh cukup signifikan terhadap produktivitas, distribusi, dan konsumsi. Masyarakat yang memiliki kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan memiliki tingkat kepatuhan terhadap norma-norma kesepakatan berpengaruh kurang signifikan terhadap kesadaran mengikuti pelatihan dan penyuluhan, dan aktif dalam kegiatan pendampingan. Modal sosial dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara bersama-sama, maka berpengaruh cukup signifikan terhadap tingkat ekonomi masyarakat. Tetapi, apabila dilaksanakan secara terpisah, maka pengaruh pemberdayaan lebih kuat dibandingkan pengaruh modal sosial.

Kata Kunci: *Modal Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Islam, Tingkat Ekonomi Umat*

Abstract

**SOCIAL CAPITAL
IN EMPOWERMENT OF ISLAMIC COMMUNITIES
AND IT'S EFFECT ON COMMUNITY ECONOMIC LEVELS
(Study in Achievement Villages in Lampung Province)**

By: Faizal

The concept of development using a top-down approach that positions the community as an object forming a powerless society. Lack of power in aspects of human resources and natural resources, and the decline in the practice of values or norms that apply to society, both normative in nature, stemming from religion and culture. Therefore, a development paradigm that is more pro-community was born, and there was even a correlation with Islamic teachings.

The problem that arises is the people of Taman Cari Village, Purbolinggo District, East Lampung Regency as the winner village of 1 (one) village contest in Lampung Province in 2014, economically, at an economic level at a prosperous level. However, the utilization of cultural norms in terms of trust, social networks, and social norms is naturally not considered, so that the economic level of the community which is seen from the indicators of productivity, distribution, and consumption in a prosperous level, but weak in the network and still dependent on other parties .

Therefore, there needs to be a study of the effect of social capital on the economic level of the community in Lampung Province's high achieving villages, the influence of Islamic community empowerment on the community's economic level in Lampung Province's high achieving villages, the effect of social capital on the process of empowering Islamic communities in the Lampung Province's high achieving villages. The influence of social capital and empowerment on the economic level of the community in the outstanding villages of Lampung Province.

The expected implications of the results of this dissertation research are (1) Theoretically, it has implications in developing theories of empowering Islamic societies and social capital as well as their effects on the economic level of society; (2) Emperically, it has implications for those involved in the empowerment process, such as the central government to the elite of the village community; (3) Normatively, it has implications for strengthening religious and cultural values that apply to society.

This dissertation research uses a mixed research approach, namely quantitative and qualitative approaches. The quantitative approach belongs to the type of survey research using a questionnaire as a data collection tool for 38 respondents. The analysis technique used is descriptive statistics and multiple regression with the help of SPSS Version 23 as a tool. A qualitative approach uses interviews, observation, and documentation as a means of collecting data against informants determined by snowball sampling. The analysis technique used is the domein analysis and compound analysis technique.

The research findings of this dissertation are: (1) the level of trust and adherence to the norms that apply to society is very high, but the status and strength of relationships in forming networks is classified as moderate. Community empowerment consisting of awareness, organization and implementation of empowerment in the high category. The people of Taman Cari Village, Purbolinggo District, Lampung Regency are very productive, distributive, and consumptive. (2) Honesty, responsibility, cooperation and compliance with agreement norms significantly influence productivity, distribution, and consumption. The awareness of participating in training and counseling, organizing, and activeness in mentoring activities has a significant effect on productivity, distribution, and consumption. Communities that have honesty, responsibility, cooperation, and have a level of compliance with the norms of the agreement have a less significant effect on awareness of training and counseling, and are active in mentoring activities. Social capital and community empowerment are carried out jointly, so it will have a significant effect on the community's economic level. However, if implemented separately, the effect of empowerment will be stronger than the effect of social capital.

Keywords: *Social Capital, Empowerment of Islamic Communities, Economic Level of the Community*

المستخلص

رأس المال الاجتماعي في تمكين المجتمعات الإسلامية وأثره على المستويات الاقتصادية للمجتمع
(دراسة في قرى الإنجاز في مقاطعة لامبونج)

فيزال

مفهوم التنمية باستخدام نهج من أعلى إلى أسفل يضع المجتمع ككائن تشكيل مجتمع عاجز. الافتقار إلى السلطة في جوانب الموارد البشرية والموارد الطبيعية ، وتراجع ممارسة القيم أو القواعد التي تنطبق على المجتمع ، سواء المعياري في الطبيعة ، المنبثق عن الدين والثقافة. لذلك ، وُلد نموذج للتنمية أكثر تأييداً للمجتمع ، وكان هناك أيضاً ارتباط بالتعاليم الإسلامية.

تكمّن المشكلة في أن سكان قرية تامان كاري ، مقاطعة بيربولينججو ، شرق لامبونج ريجنسي ، باعتبارها القرية الفائزة في مسابقة قرية واحدة (واحدة) في مقاطعة لامبونج في عام ٢٠١٤ ، يتمتعون بمستوى اقتصادي اقتصادي على مستوى مزدهر. ومع ذلك ، فإن استخدام المعايير الثقافية من حيث الثقة والشبكات الاجتماعية والقواعد الاجتماعية لا يُنظر إليه بشكل طبيعي ، بحيث يتم النظر إلى المستوى الاقتصادي للمجتمع من مؤشرات الإنتاجية والتوزيع والاستهلاك بمستوى مزدهر ، ولكنه ضعيف في الشبكة ولا يزال يعتمد على الأطراف الأخرى ،

لذلك ، يجب أن تكون هناك دراسة لتأثير رأس المال الاجتماعي على المستوى الاقتصادي للمجتمع في قرى مقاطعة لامبونج ذات الإنجازات العالية ، وتأثير تمكين المجتمع الإسلامي على المستوى الاقتصادي للمجتمع في قرى مقاطعة لامبونج ذات الإنجازات العالية ، وتأثير رأس المال الاجتماعي على عملية تمكين المجتمعات الإسلامية في قرى إقليم لامبونج العالية. تأثير رأس المال الاجتماعي والتمكين على المستوى الاقتصادي للمجتمع في قرى مقاطعة لامبونج المتميزة.

الآثار المتوقعة لنتائج بحث الأطروحة هذه هي: (١) نظريا ، لها آثار في تطوير نظريات تمكين المجتمعات الإسلامية ورأس المال الاجتماعي وكذلك آثارها على المستوى الاقتصادي للمجتمع ؛ (٢) بشكل إمبريالي ، له آثار على المشاركين في عملية التمكين ، مثل الحكومة المركزية لنخبة مجتمع القرية ؛ (٣) عادة ، لها آثار على تعزيز القيم الدينية والثقافية التي تنطبق على المجتمع.

يستخدم هذا البحث أطروحة منهج بحث مختلط ، وهي النهج الكمية والنوعية. ينتمي النهج الكمي إلى نوع بحث الاستقصاء باستخدام الاستبيان كأداة لجمع البيانات لـ ٣٨ من المشاركين. تقنية التحليل المستخدمة هي الإحصاءات الوصفية والانحدار المتعدد بمساعدة SPSS الإصدار ٢٣ كأداة. يستخدم النهج النوعي المقابلات والملاحظة والوثائق كوسيلة لجمع البيانات ضد المخبرين الذين تحددهم أخذ عينات كرة الثلج. تقنية التحليل المستخدمة هي تحليل الدومين وتقنية التحليل المركب.

نتائج بحث هذه الأطروحة هي: (١) مستوى الثقة والالتزام بالمعايير التي تنطبق على المجتمع مرتفع للغاية ، ولكن حالة وقوة العلاقات في تشكيل الشبكات تصنف على أنها معتدلة. تمكين المجتمع يتكون من الوعي والتنظيم وتنفيذ التمكين في الفئة العليا. سكان قرية تامان جاري ، مقاطعة فريالنجو ، منطقة لامبونج ريجنسي منتجة للغاية ، وموزعة ، ومستهلكة. (٢) تؤثر الصدق والمسؤولية والتعاون والامتنال لمعايير الاتفاقية بشكل كبير على الإنتاجية والتوزيع والاستهلاك. إن الوعي بالمشاركة في التدريب والإرشاد والتنظيم والفعالية في أنشطة التوجيه له تأثير كبير على الإنتاجية والتوزيع والاستهلاك. إن المجتمعات التي تتمتع بالأمانة والمسؤولية والتعاون ولديها مستوى من الالتزام بمعايير الاتفاقية يكون لها تأثير أقل أهمية على الوعي بالتدريب والإرشاد ، وتنشط في أنشطة التوجيه. يتم تنفيذ رأس المال الاجتماعي وتمكين المجتمع بشكل مشترك ، لذلك سيكون له تأثير كبير على المستوى الاقتصادي للمجتمع. ومع ذلك ، إذا تم تنفيذه بشكل منفصل ، فإن تأثير التمكين سيكون أقوى من تأثير رأس المال الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية: رأس المال الاجتماعي ، تمكين المجتمعات الإسلامية ، المستوى الاقتصادي للمجتمع

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

Disertasi yang berjudul “Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat (Studi pada Desa Berprestasi di Provinsi Lampung)” ditulis oleh Faizal, NPM. 1303040003, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, telah diujikan dan dipertahankan dalam ujian Terbuka/Promosi Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, pada hari Jum'at, tanggal 14, bulan Juni, Tahun 2019.

Bandar Lampung, Agustus 2019

Promotor

Tanda Tangan

Promotor I : Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, M.A. (

Promotor II : Prof. Dr. H. Marzuki Noor, M.S. (

Promotor III : Dr. Hasan Mukmin, M.A. (

Mengetahui,

Ketua Program Studi PMI
PPs UIN Raden Lampung

Bambang Budiwiranto M. Ag, M.A (AS), Ph.D
NIP. 197303191997031001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi yang berjudul **"Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat (Studi pada Desa Berprestasi di Provinsi Lampung)"** ditulis oleh Faizal, NPM. 1303040003, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, telah diujikan dan dipertahankan dalam ujian Terbuka/Promosi Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, pada hari Jum'at, tanggal 14, bulan Juni, Tahun 2019.

Tim Penguji

Tanda Tangan

Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag.
(Ketua Sidang)

Dr. Fitri Yanti, M.A.
(Sekretaris Sidang)

Prof. Dr. H. Syarifudin Basyar, M.Ag.
(Penguji I)

Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, M.A.
(Penguji II)

Prof. Dr. H. Marzuki Noor, M.S.
(Penguji III)

Dr. Hasan Mukmin, M.A.
(Penguji IV)

Prof. Dr. H. Jamal Fahri, M. Ag
(Penguji V)

Bandar Lampung, Agustus 2019

Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M. Ag.
NIP. 19600102019880311005

MOTTO¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 94

PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap Lafadz

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Disertasi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Sofyan dan Sofiah serta Ayahanda Makmun Abdullah (alm) dan Ibunda Hj. Nurjanah yang sangat saya sayangi dan banggakan. Terimakasih atas do'a dan motivasinya, semoga Allah SWT memulyakan Ayahanda dan Ibunda.
2. Istri yang sangat kucintai dan kusayangi: Fariza Makmun, S. Ag., M. Sos.I yang dengan sabar memberikan semangat dan mendampingi dalam suka maupun duka serta anak-anakku: Adam Faridh, Muhammad Fadhil, dan Fuad Husen harapan masa depan ayah dan bunda. Mohon ma'af atas kealpaan selama ini.
3. Agama, Bangsa, dan Almamater UIN Raden Intan Lampung

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Sholawat serta salam, penulis sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW., sebagai suri tauladan dan tuntunan dalam menggapai ilmu pengetahuan yang benar dan bermanfaat.



Penulis menyadari, bahwa Disertasi yang berjudul “Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat (Studi pada Desa Berprestasi di Provinsi Lampung)” dapat diselesaikan dengan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Raden Intan Lampung;
2. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M. Ag., Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan dan kebijakan dalam penyelesaian studi;
3. Dr. Hasan Mukmin, M.A. / Bambang Budiwiranto, S. Ag., M.A (AS)., Ph.D dan Dr. Fitri Yanti, M. A. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan

pelayanan, bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menunjang kelancaran studi;

4. Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, M.A. (Promoter I), Prof. Dr. H. M. Marzuki Noor, M.S. (Promotro II), dan Dr. Hasan Mukmin, M.A (Promotor III). yang telah meluangkan waktu, ilmu, dan pengalaman dalam membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis, sehingga Disertasi dapat diselesaikan;
5. Bapak Sugianto Edi Susanto, SH (Kepala Desa) Taman Cari beserta jajarannya, bapak Edi Sugianto (Ketua Gapoktan) Desa Taman Cari beserta jajarannya, Pengurus dan Anggota Kelompok Tani (Poktan) Desa Taman Cari, serta semua yang telah menerima kehadiran penulis dan memberikan data atau informasi guna penyelesaian Disertasi ini;
6. Dr. Tantowi Jauhari, M.M, Khairullah, M.A., dan Dr. Achi Rinaldi yang telah berbagi ilmu statistik;
7. Teman-teman seperjuangan angkatan I Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Program Doktor Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Atas kesempatan, pelayanan, dukungan, motivasi, bimbingan, dan bantuannya, penulis berdo'a semoga menjadi amal kebaikan yang diridhai dan diberkahi Allah SWT. Semoga Disertasi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pengembangan keilmuan, *Aamiin*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Agustus 2019
Penulis,

FAIZAL
NPM. 1303040003

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN	vi
ORISINILITAS	vii
HALAMAN PERSETUJUAN	ix
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	16
1. Identifikasi Masalah.....	16
2. Batasan Masalah.....	17
3. Rumusan Masalah	17
C. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	18
D. Tujuan dan Kegunaan (Kontribusi) Penelitian.....	22
1. Tujuan Penelitian.....	22
2. Kegunaan Penelitian	25
E. Sistematika Penulisan	26
 BAB II. MODAL SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA	 28
A. Modal Sosial	29
1. Memahami Konsep Modal Sosial.....	29
2. Dimensi Modal Sosial	32
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Modal Sosial.....	45
B. Pemberdayaan Masyarakat Islam.....	47
1. Memahami Konsep Pemberdayaan Masyarakat Islam	47
2. Tahapan/Proses Pemberdayaan Masyarakat Islam	69
3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Islam	73
C. Tingkat Ekonomi Masyarakat	85
1. Pengertian Tingkat Ekonomi	85
2. Faktor-Faktor Ekonomi Masyarakat	91
D. Pengaruh Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Islam Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat	101
E. Kerangka Fikir	109
F. Hipotesis Penelitian	120

G. Definisi Operasional	121
BAB III. METODE PENELITIAN	135
A. Pendekatan dan Tempat Penelitian.....	135
1. Pendekatan Penelitian.....	135
2. Tempat dan Waktu Penelitian	137
B. Metode Survey.....	137
1. Desain Penelitian.....	138
2. Polulasi dan Sampel	139
3. Teknik Pengumpulan Data	141
4. Instrumen Variabel Tingkat Ekonomi Masyarakat (Y)	142
5. Instrumen Variabel Modal Sosial (X ₁)	147
6. Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Islam (X ₂).....	152
7. Deskripsi Data	158
8. Teknik Analisa Data	158
9. Hepotesis Statistik	160
C. Penelitian Kualitatif	161
1. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	163
2. Analisa Data	168
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	169
A. Deskripsi Data	169
1. Gambaran Umum Desa Taman Cari.....	169
2. Deskripsi Data Hasil Penelitian	183
a. Tingkat Ekonomi Kelompok Tani.....	184
1) Tingkat Produktivitas	184
2) Tingkat Distribusi	192
3) Tingkat Konsumsi	197
b. Modal Sosial	206
1) Kepercayaan Kelompok Tani	206
2) Jaringan Sosial	215
3) Norma-Norma Sosial	221
c. Pemberdayaan Masyarakat Islam.....	227
1) Penyadaran	227
2) Pengorganisasian	233
3) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Islam.....	240
B. Uji Hepotesis.....	247
C. Pembahasan	262
1. Pengaruh Modal Sosial (X ₁) Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat (Y)	262
2. Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Islam (X ₂) Terhadap	278

Tingkat Ekonomi Masyarakat (Y).....	
3. Pengaruh Antara Modal Sosial (X_1) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Islam (X_2)	288
4. Pengaruh Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Islam (X_1X_2) Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat (Y).....	299
BAB V. PENUTUP	307
A. Kesimpulan	307
B. Implikasi Hasil Penelitian	308
B. Saran-Saran	310
DAFTAR PUSTAKA	312
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1.	Ragam Metode Pemberdayaan Masyarakat	65
2.	Kisi-Kisi Instrumen Variabel Tingkat Ekonomi Masyarakat (Y)	143
3.	Nilai Validitas Kuesioner Variabel Tingkat Ekonomi (Y)	145
4.	Tingkat Reliable Indikator Variabel Tingkat Ekonomi Masyarakat (Y)	146
5.	Kisi-Kisi Instrumen Variabel Modal Sosial (X_1)	148
6.	Tingkat Validitas Kuesioner Variabel Modal Sosial (X_1)	150
7.	Tingkat Reliabilitas Indikator Pada Variabel Modal Sosial (X_1)	152
8.	Kisi-Kisi Instrumen Variabel Pemberdayaan Masyarakat (X_2)	154
9.	Tingkat Validitas Kuesioner Variabel Pemberdayaan masyarakat (X_2)	156
10.	Tingkat Reliable Indikator Pada Variabel Modal Sosial (X_2)	157
11.a.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	172
11.b.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	173
11.c.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	174
11.d.	Sarana Dan Prasarana	175
11.e.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	178
11.e.2	Lembaga Keagamaan	178
11.f.1	Keadaan Sumber Daya Alam	180
11.f.2	Dana Pembangunan Berdasarkan Sumber Tahun 2018	183
12.a.	Frekuensi Distribusi Indikator Tingkat Produktivitas (Y_a)	185
12.b.	Frekuensi Distribusi Indikator Tingkat Distribusi (Y_b)	193
12.c.	Frekuensi Distribusi Indikator Tingkat Konsumsi (Y_c)	198
13.	Tingkat Kesejahteraan Keluarga Masyarakat Desa Taman Cari	203
14.a.	Frekuensi Distribusi Indikator Kepercayaan ($X_{1.a}$)	207
14.b.	Kegiatan Kerjasama Masyarakat Desa Taman Cari Tahun 2018	212
14.c.	Frekuensi Distribusi Indikator Jaringan Sosial ($X_{1.b}$)	216
14.d.	Frekuensi Distribusi Indikator Norma-Norma Sosial ($X_{1.c}$)	222
15.a.	Frekuensi Distribusi Indikator Penyadaran (Motivasi) ($X_{2.a}$)	228
15.b.	Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan Di Desa Taman Cari Tahun 2018	232
15.c.	Frekuensi Distribusi Indikator Pengorganisasian ($X_{2.b}$)	234
15.d.	Lembaga Kemasyarakatan Desa Taman Cari Tahun 2018	238
15.e.	Frekuensi Distribusi Indikator Pelaksanaan Pemberdayaan p ($X_{2.c}$)	241
17.	Variabel Penjelas yang Masuk dalam Model Regresi	248
18.	Nilai Penduga Koefisien Persamaan Regresi untuk Variabel X_1 dan X_2 Terhadap Y.	249
19.	Nilai Korelasi Antara Variabel X_1 dan Variabel Y	252
20.	Nilai Korelasi Antara Variabel X_2 dan Variabel Y	254
21.	Nilai Korelasi Antara Variabel X_1 dan Variabel X_2	255
22.	Nilai Korelasi dari Model Regresi Per Indikator	258
23.	Nilai Penduga Koefisien Persamaan Regresi untuk Variabel $X_{1.a}$, $X_{1.b}$, $X_{1.c}$, $X_{2.a}$, $X_{2.b}$, $X_{2.c}$ terhadap Y	258
24.	Nilai-Nilai Korelasi Antara Indikator Variabel $X_{1.a}$, $X_{1.b}$, $X_{1.c}$, $X_{2.a}$, $X_{2.b}$, $X_{2.c}$ Terhadap Y.	260

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1	Proses/Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	70
2	Kerangka Fikir	110
3	Skema Model Hirarchi Sebernitika Talcott Parsons.....	116
4	Skema agil dalam sistem tindakan umum.....	118
5	Desain Penelitian	139
6	Struktur Pemerintahan Desa Taman Cari	171
7	Histogram Data indikator Produktivitas	187
8	Histogram Data Tingkat Distribusi	194
9	Histogram Data Indikator Tingkat Konsumsi	200
10	Histogram Data Tingkat Kepercayaan (X _{1.a})	208
11	Histogram Data Indikator Jaringan Sosial (X _{1.b})	217
12	Histogram Data Indikator Norma-Norma Sosial (X _{1.c})	223
13	Histogram Data Indikator Penyadaran (X _{2.a})	229
14	Histogram Indikator Pengorganisasian (X _{2.b})	235
15	Histogram Indikatro Pelaksanaan Pemberdayaan (X _{1.c})	242
16	Hubungan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Modal Sosial terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat	248
17	Plot Normalitas Sisaan Dari Model Regresi $Y = 110,05 + 0,023X_1 + 0,217X_2$	250
18	Nilai Plot Korelasi Antara Variabel X_1 , X_2 dan Y	256
19	Model Hubungan Seluruh Indikator Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat.	257
20	Plot Normalitas Sisaan dari model Regresi $Y = 93,169 + 0,108X_{1.a} - 0,118X_{1.b} - 0,125X_{1.c} - 0,112X_{2.a} - 0,17X_{2.b} + 0,23X_{2.c}$	259
21	Model Hubungan Seluruh Indikator Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat Beserta Nilai Korelasinya	260

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK. Promotor
2. Surat Mohon Izin Pra Survey
3. Surat Mohon Izin Penelitian
4. Berita Acara Seminar Proposal
5. Daftar Kuesioner
6. Daftar Sampel Metode Kuantitatif
7. Daftar Sampel Data Kualitatif
8.
 - a.1. Variabel Y Indikator Produktivitas (Y.a)
 - a.2. Variabel Y Indikator Tingkat Distribusi (Y.b)
 - a.3. Variabel Y Indikator Tingkat Konsumsi (Y.c.)
 - b.1. Variabel X1 Indikator Kepercayaan (X1.a)
 - b.2. Variabel X1 Indikator Jaringan Sosial (X1.b)
 - b.3. Variabel X1 Indikator Norma-Norma Sosial (X1.c)
 - c.1. Variabel X2 Indikator Penyadaran (X2.a)
 - c.2. Variabel X2 Indikator Pengorganisasian (X2.b)
 - c.3. Variabel X2. Indikator Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat (X2.c)
9. Sebaran Data pada Kuesioner
10. Data Frekuensi
 - a. Skor Pernyataan Variabel Tingkat Ekonomi, Indikator Produktivitas
 - b. Skor Pernyataan Variabel Tingkat Ekonomi, Indikator Distribusi
 - c. Skor Pernyataan Variabel Tingkat Ekonomi, Indikator Konsumsi
11.
 - a. Skor Pernyataan Variabel Modal Sosial, Indikator Kepercayaan
 - b. Skor Pernyataan Variabel Modal Sosial, Indikator Jaringan Sosial
 - c. Skor Pernyataan Variabel Modal Sosial, Indikator Norma-Norma Sosial
12.
 - a. Skor Pernyataan Variabel Pemberdayaan Masyarakat, Indikator Penyadaran
 - b. Skor Pernyataan Variabel Pemberdayaan Masyarakat, Indikator Pengorganisasian.
 - c. Skor Pernyataan Variabel Pemberdayaan Masyarakat, Indikator Pelaksanaan Pemberdayaan.

PEDOMAN TRANSLITERASI²

A. Konsonan Tunnggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	a	ض	ḍ
ب	b	ط	ṭ
ت	t	ظ	ẓ
ث	ṡ	ع	‘
ج	j	غ	g
ح	ḥ	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	ẓ	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	ṣ	ء	’
		ي	y

B. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliternya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harokat dan Huruf	Huruf dan tanda
اَـ	â
اِـ	î
اُـ	û

² Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Bandar Lampung: Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2017)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang lahir atas dasar realitas masyarakat, baik secara individu maupun komunitas yang dalam kondisi kurang berdaya atau lemah. Kurang berdaya dalam aspek sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta menurunnya pengamalan nilai atau norma yang berlaku pada masyarakat, baik bersifat normatif yang bersumber dari agama maupun budaya.

Tiga aspek di atas, merupakan aspek-aspek pemberdayaan masyarakat dalam terminologi pengembangan masyarakat, yakni aspek sumber daya manusia, sumber daya alam (*amwal*), dan daya nilai yang dianut masyarakat.³ Kurang berdaya dalam aspek sumber daya manusia merupakan representasi dari kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan rendahnya pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Kurang berdaya dalam aspek sumber daya alam (*amwal*) sebagai representasi dari potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sumber pemenuhan kebutuhan hidup yang ditandai dengan rendahnya modal dan pendapatan masyarakat, serta buruknya pengelolaan. Sedangkan kurang berdaya dalam aspek sumber daya nilai atau norma merupakan representasi dari berlakunya norma-norma masyarakat, baik yang bersumber dari agama maupun budaya yang ditandai dengan terjadinya penyimpangan (*inkonsistensi*) terhadap keduanya. Kurang berdayanya ketiga aspek tersebut mengakibatkan sikap pasif dan ketergantungan kepada pihak lain.

³ Aep Kusnawan, *Ilmu Dakwah (Kajian Berbagai Aspek)*, (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 211

Sikap pasif dan ketergantungan, baik terhadap pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya tidak terlepas dari kontribusi konsep pembangunan yang selama ini dianut, difahami, dan dipraktikkan di negeri ini. David C. Korten yang dikutip oleh A. Halim dalam Muhammad Ali Aziz, mendefinisikan pembangunan sebagai upaya memberikan kontribusi pada aktualisasi potensi tertinggi kehidupan umat manusia.⁴ Menurutnya, pembangunan bertujuan untuk mencapai standar kehidupan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia.⁵

Studi tentang pembangunan bermula dari faham klasik, ketika Plato meletakkan dasar filosofis tentang hakekat negara sebagai media bagi setiap individu untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Ditelusuri dari faham tentang ekonomi-politik abad ke delapan belas, Adam Smits dalam *The Wealth Nations* meletakkan dasar-dasar ekonomi *laissez faire* (ekonomi bebas) dan abad industri, sehingga pembangunan sebagai suatu gerakan internasional di abad ke duapuluhan.⁶

Perkembangan isu pembangunan tahun 50-an dan 60-an oleh ahli ekonomi, yang beranggapan bahwa pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat dicapai melalui industrialisasi. Industrialisasi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yakni: pemusatan perhatian pada program industrialisasi, seperti penggunaan teknologi modern dan menggerakkan potensi teknologi tradisional dalam negeri.⁷

Pendekatan pertama mampu meningkatkan *Growut National Produks* (GNP), tetapi ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Teknologi (SDT)

⁴ M. Ali Azis (ed)., *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 2005), h. 5

⁵ Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian dan kesehatan, kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, mendapatkan penghormatan dan kesempatan untuk bekerja secara *fair* serta aktualisasi spiritual. Atau, konsep manusia seutuhnya (insan kamil) dalam paradigma Islam. *Ibid.*, h. 5

⁶ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, (T.tp: Renika Cipta, 1990), cet. ke-2, h. 14

⁷ *Ibid.*, h. 14-15

memaksa negara-negara miskin dan berkembang melakukan impor ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, secara langsung atau tidak, pendekatan pertama berimplikasi negatif terhadap sosial, ekonomi, dan mental masyarakat. Sementara, pendekatan kedua kurang mendapat perhatian bahkan terabaikan.

Oleh karena itu, pada dekade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan pembangunan. Coralie Bryant dan Louise White dalam *Managing Development in the Third World*, pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depan.⁸ Menurut Taliziduhu Ndraha, definisi pembangunan tersebut mempunyai lima implikasi utama, yakni: (1). pembangunan membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*); (2) pembangunan mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan; (3) pembangunan menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*); (4) pembangunan membangkitkan kemampuan secara berkelanjutan (*sustainability*); (5) pembangunan mengurangi ketergantungan antar negara, menciptakan hubungan saling menguntungkan, dan saling menghormati (*interdependence*).⁹

Bertitik tolak dari kelemahan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, maka muncul gagasan untuk merubah paradigma pembangunan kepada paradigma yang lebih manusiawi. Indonesia misalnya, gagasan yang berpihak pada kepentingan masyarakat tersebut menjadi lebih membumi ketika lahir Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menjadi landasan bagi setiap

⁸ Coralie Bryant dan Louise G White, *Managing Development in the Third World*, (Colorado: Westview Press, 1982), h. 14

⁹ Taliziduhu Ndraha., *op. cit.*, h. 16

daerah untuk mengurus kepentingannya sendiri, atas prakarsa dan aspirasi masyarakat. Masyarakat diberi peran yang lebih luas dan dituntut berkreaitivitas dalam mengelola potensi daerahnya.¹⁰ Pembangunan yang mengakomodir berbagai potensi masyarakat lokal lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Konsep pemberdayaan dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: *pertama*, proses kekuasaan terbentuk dari pemusatan kekuasaan faktor produksi. *Kedua*, pemusatan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran. *Ketiga*, kekuasaan akan membentuk bangunan yang berlandaskan pada sistem pengetahuan, politik, hukum dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi. *Keempat*, pelaksanaan sistem pengetahuan, politik, hukum dan ideologi secara sistematik akan menciptakan kelompok masyarakat yang berdaya dan tidak berdaya atau yang berkuasa dan dikuasai. Untuk menghilangkan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan proses pemberdayaan bagi yang lemah.¹¹

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) menurut World Bank yang dikutip oleh Totok Mardikanto adalah sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu konsep, metode, produk, tindakan yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya.¹² Atau, pemberdayaan sebagai model pembangunan alternatif sebagaimana pendapat Friedman dan Korten yang dikutip oleh Aprillia Theresia, pembangunan berpusat pada rakyat dan

¹⁰ Suparjan dkk., *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Aditiya Media, 2003), cet., ke-1, h.xxvii

¹¹ *Ibid.*, h. 92

¹² Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 27-28

lingkungannya ketimbang pada produksi dan keuntungan.¹³ Untuk itu, pemberdayaan lebih fokus pada proses memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan untuk mempengaruhi kehidupan banyak orang.¹⁴ Atau, Pemberdayaan merupakan tahapan mempersiapkan struktur dan system dalam komunitas, sehingga dapat bersikap proaktif dan responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan masyarakat.¹⁵ Sehingga, struktur dan system yang dibangun berdasarkan inisiatif dan kemampuan sendiri akan membentuk masyarakat yang berdaya.

Sementara itu, pemberdayaan masyarakat dalam perspektif “pengembangan masyarakat Islam” pada kajian ilmu dakwah dimaknai sebagai upaya mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesalehan perilaku individu dan kelompok, sehingga mampu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.¹⁶ Bentuk aktivitas yang diharapkan adalah aksi sosial dengan kegiatan mengorganisir potensi sumber daya manusia, sumber daya *amwal*, dan nilai-nilai normatif agama sebagai dasar dan nilai-nilai budaya sebagai bahan pertimbangan.¹⁷ Tujuannya adalah terjadi transpormasi/perubahan secara kualitatif terhadap “struktur dan system masyarakat”, sehingga masyarakat dapat bersikap proaktif dan responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan pada lingkungannya berlandaskan nilai-nilai Islami.

Islam telah memberikan penjelasan, bahwa transpormasi dalam makna memberikan kekuasaan atau posisi tawar yang lebih luas kepada masyarakat dalam

¹³ Aprillia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet. 1, h. 24.

¹⁴ *Ibid.*, h. 28

¹⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Lembaga Penerbit UI, 2005), h.177

¹⁶ *Ibid.*, h. 211

¹⁷ *Ibid.*, h. 211

mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan istilah pemberdayaan (*tamkin*).¹⁸ Allah berfirman:

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu. (QS. Al Kahfi (18): 84)

Kekuasaan atau *tamkin* dalam ayat di atas adalah mengelola segala sesuatu yang telah disediakan Allah SWT dimuka bumi, baik di daratan maupun di lautan untuk mencapai kesejahteraan dengan mengacu pada norma-norma agama.

Memperkuat kekuasaan masyarakat menjadi alternatif untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat Islam (*Tamkîn al-mujtama‘ât al-Islâmiyah*) diisyaratkan dalam al-Qur’an:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ۚ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۚ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan

¹⁸ Mukhlis Aliyudin, Pengembangan Masyarakat Islam dalam Sistem Dakwah Islamiyah, pada Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 4 No. 14 Juli-Desember 2009, <https://media.neliti.com/media/publications/69829-ID-pengembangan-masyarakat-islam-dalam-sist.pdf> (diakses 17 Oktober 2019)

sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ro'ad/Ar- Ro'du, (13): 11)

Upaya untuk membentuk masyarakat Islam (*al-mujtamâ al-Islâmiyah*) yang proaktif dan responsif terhadap diri dan lingkungannya diperlukan pemahaman yang benar tentang landasan normatif. Misalnya, Perubahan akan terjadi apabila ada ikhtiar atau usaha dari sekelompok orang (komunitas) yang berusaha untuk berubah, mempertinggi mutu diri dan mutu amal, melepaskan diri dari perbudakan selain Allah SWT, guna mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan lebih maju, tanpa mengabaikan keyakinan atas takdir yang telah ditetapkan Allah.¹⁹ Menurut Quraish Shihab, beberapa hal yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan landasan pemberdayaan masyarakat dalam surat Ar Ro'd ayat 11, yakni berkaitan dengan pelaku (subyek) dan sasaran (obyek) pemberdayaan masyarakat Islam.²⁰

Pelaku pemberdayaan adalah seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari masyarakat (kaum) itu sendiri. Menurut Ali Syari'ati mereka adalah orang-orang yang tercerahkan,²¹ mempunyai kekuatan berfikir, wawasan sosial, dan metode yang

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Juz XIII-XIV*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), hal. 71-72

²⁰ *Pertama*, ayat tersebut berbicara tentang perubahan sosial, bukan perubahan individu. Ini dapat difahami dari penggunaan kata *koum* (masyarakat). Dengan kata lain, suatu perubahan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Tetapi, dapat bersumber dari seseorang secara pribadi berupa ide-ide, kemudian diterima oleh masyarakat luas. *Kedua*, penggunaan kata "kaum" bermakna berlaku umum, tanpa membedakan agama, suku, ras tertentu. *Ketiga*, ada dua pelaku perubahan. Pelaku pertama adalah Allah dari sisi luar (lahiriah) masyarakat. Pelaku kedua adalah manusia, yang melakukan perubahan dari sisi dalam. Atau istilah *ma bi anfusihim* dalam ayat tersebut. Perubahan yang terjadi atas ikut campur tangan Allah atas banyak hal (*ma bi qoumin*), seperti; kekayaan dan kemiskinan, kesehatan dan penyakit, kemulyaan dan kehinaan, dan lain-lain. *Keempat*, melakukan perubahan harus diawali dari perubahan sisi dalam manusia suatu masyarakat. Karena, sisi dalam manusialah yang melahirkan aktivitas. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Vol. 6*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), hal. 231-236

²¹ Orang-orang tercerahkan adalah adalah orang yang sadar akan keadaan kemanusiaan (*human conditional*) di masanya. Dia adalah sang pemandu yang menunjukkan jalan yang benar, mengundang orang lain untuk memulai berbuat, dan membawa orang lain untuk mencapai tujuan. Dia adalah orang yang member keyakinan bersama yang dinamis dan membantu mereka mencapai kesadaran diri dan merumuskan cita-cita mereka. Ali Syari'ati, *The Enlightened Thinkers and Islamic Renaissance: Membangun Masa Depan Islam, Pesan untuk Para Intelektual Muslim*, ter. Oleh Rahmawati Astuti, (Bandung: Mizan, 1988), h. 28-31

tepat untuk mendesain perubahan.²² Karena, mereka tidak hanya bertanggung jawab memperbaiki komunitas sosial yang hancur kepada perubahan yang ideal, tetapi juga berperan menumbuhkan kesadaran masyarakat lingkungannya. Oleh karena itu, keterlibatan pihak luar, baik pemerintah maupun swasta sangat dibutuhkan apabila persyaratan-persyaratan sebagai seorang tercerahkan belum dimiliki oleh sebuah komunitas yang berdomisili pada wilayah tertentu.

Dalam kaitannya dengan obyek penelitian disertasi ini, Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur memiliki 1223 KK atau 4023 jiwa yang 85% berlatar belakang budaya Jawa.²³ Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, secara kuantitas mempunyai sumber daya manusia yang cukup besar sebagai sumber daya pemberdayaan masyarakat, tetapi kurang memiliki kemampuan untuk memberdayakan sumberdaya yang ada pada lingkungannya sendiri, sehingga mereka menaruh harapan yang besar pada partisipasi pihak luar terutama pemerintah. Misalnya, dalam meningkatkan perekonomian dibidang pertanian, mereka sangat tergantung pada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Kabupaten Lampung Timur.²⁴

Sedangkan, sasaran pemberdayaan masyarakat Islam adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri spesifik akibat dari interaksi sekelompok orang dengan lingkungan alam dalam rangka penyesuaian diri dan pemanfaatan lingkungan.²⁵ Secara geografis, Desa Taman Cari mempunyai tipografi dataran rendah, sehingga sumber penghasilan

²² Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial*, (Yogyakarta: Media Prenada media Group, 2010), h. 100

²³ Monografi Desa Taman Cari Tahun 2015, *Dokumentasi*, dicatat, pada tanggal 24 Desember 2015

²⁴ Suparni, Sekdes Desa Taman Cari, *Interview*, pada tanggal 24 Desember 2015

²⁵ Ciri-ciri spesifik masyarakat akibat berinteraksi dengan lingkungan alam, diantaranya; masyarakat pesisir, masyarakat pegunungan, masyarakat gurun pasir dan sebagainya. Aep Kurnawan, *op. cit.*, h. 213

utama masyarakatnya berasal dari pesawahan (338 Ha), ladang/perkebunan (45 Ha), dan perikanan (17 Ha).²⁶

Pemberdayaan masyarakat (*tamkîn al-mujtama'/community empowerment*) berbasis potensi masyarakat yang bersumber atau tersedia pada suatu wilayah yang termasuk dalam batas geografis komunitas atau lingkungan sosialnya. Atau, sumberdaya yang ada pada masyarakat dengan harga terjangkau, seperti: sumberdaya manusia (modal sosial, kearifan tradisional, kebudayaan, dan modal spiritual). Sumberdaya alam, seperti; infrastruktur (sarana dan prasarana), kelembagaan, informasi, waktu, dan kemudahan.²⁷ Tidak berarti mengabaikan partisipasi pihak lain, terutama pemerintah (*umara'*) sebagai faktor eksternal.

Pembangunan berbasis masyarakat lokal tidak bisa dipisahkan dari kultur suatu masyarakat, khususnya mengenai system nilai, sikap, dan adat istiadat.²⁸ Karena, kebudayaan (*cultur*) merupakan seperangkat peraturan dan norma yang pada dan dilaksanakan bersama,²⁹ baik yang terbentuk dari system agama, politik, adat istiadat (tradisi), bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.³⁰ Sehingga, kebudayaan merupakan media yang memungkinkan pembangunan dapat berlangsung dengan sukses.³¹ Unsur-unsur budaya dan agama tersebut adalah sikap saling mempercayai (*siddiq/trust*), saling memberi dan membantu (*ta'awun*), dan jaringan sosial (*al'alâqah*),³² merupakan ruh modal sosial.³³

²⁶ Monografi Desa Taman Cari Tahun 2015, *Dokumentasi*, dicatat, pada tanggal 24 Desember 2015

²⁷ Aprilia Theresia., h. 33

²⁸ Haryanto S, *Pembangunan Berwawasan Kultural*, (Surabaya:UNS Press, 2005), h.

²⁹ Yasmil Anwar dan Adang, *Sosiologi Untuk Universitas*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 181

³⁰ *Ibid.*, h. 179

³¹ Suetomo, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), cet., ke-2, h. 201

³² *Ibid.*, h. 202-203

³³ Aprillia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: ALPABETA, 2014), h. 40

Menurut Hasbullah yang dikutip oleh Aprillia Theresia, modal sosial (*social capital*) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja sama dalam masyarakat untuk mencapai kapasitas hidup yang lebih baik, ditopang oleh nilai-nilai dan norma-norma, seperti *trust* (rasa saling mempercayai), keimbal-balikan, dan aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat.³⁴ Modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada kepercayaan, jaringan sosial, norma atau nilai antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok.³⁵ Hakekat *social capital* adalah hubungan sosial atau interaksi sosial yang didasarkan pada kepercayaan antar sesama, jaringan dan struktur sosial, norma dan nilai yang diyakini, diamalkan, dan dipertahankan oleh kelompok sosial.

Dalam realitas sosial misalnya, jaringan sosial yang berwujud struktur sosial kemasyarakatan dikenal dengan arisan, simpan pinjam, serikat tolong menolong, kelompok usaha (pertanian, perkebunan, perdagangan, perikanan, dll), kelompok jama'ah/taklim. Kepranataan dapat dilihat dalam upacara adat, kegiatan masyarakat seperti perkawinan, kelahiran dan kematian serta yang lain. Semuanya diperkuat nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang melembaga dengan baik seperti kebersamaan, kepranataan dan nilai-nilai sosial yang mampu membuat jaringan strategis sebagai wahana pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, *social capital* merujuk pada institusi hubungan sikap dan nilai yang membimbing interaksi dan kontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial.³⁶ Ibnu Khaldun dalam Jhon L. Esposito melalui konsep *ashabiyah* menjelaskan bahwa, sebuah masyarakat bahkan Negara terbentuk karena kesadaran, persatuan, dan

³⁴ *Ibid.*, h. 36

³⁵ M. Mawardi J, *Peranan sosial capital dalam Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Bina al-Ummah*, vol.3 No.2 jun 2007

³⁶ Sani, *Op.Cit.*

kepaduan kelompok sebagai ciri kekuatan ikatan sosial dan solidaritas sosial yang disebut *ashabiyah*.³⁷

Modal sosial yang dalam pemahaman penulis disebut *ra's al-mâli al-ijtimâ'iy* memiliki dasar yang kuat dalam membentuk masyarakat yang konsisten terhadap prinsip-prinsip moral yang mengatur hidup bermasyarakat. Islam menganjurkan untuk selalu *husn al-dzan*, melarang *ghibah*, dan fitnah. Secara filosofis, ajaran tersebut praktikkan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam aktivitas perdagangan sehingga disebutkan *al-amin*.³⁸ Islam menuntut adanya sikap saling mempercayai dan menjelaskan norma-norma bagi yang tidak melaksanakannya dengan cara menjauhi purbasangka dan mencari-cari keburukan orang lain, karena perbuatan itu merupakan dosa dan akan menjauhi kita disebabkan orang lain merasa jijik (QS. Al-Hujurat (49): 12). Islam juga mengatur pola inter-relasi (jaringan) antar sesama melalui konsep *ukhuwah* (QS. Al-Hujurat (49): 10) dan konsep (*ta'awun*) tolong-menolong antar sesama (QS. Al-Maidah (5):2). Sedangkan, kebudayaan yang terbentuk dari adat-istiadat,³⁹ khususnya dalam bentuk gagasan, seperti keyakinan, kepercayaan, symbol, norma, nilai, dan ideologi.⁴⁰

Hal yang sangat penting difahami adalah betapapun upaya umat manusia berupaya memperbaiki kualitas hidup wajib memenuhi persyaratan utama sebagai

³⁷ Jhon L. Esposito (ed), *Ensiklopedi Dunia Islam Modern, Jilid 1*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 198

³⁸ Khoirul Amin, Islam, Modal Sosial, Pembangunan, dan Pengentasan Kemiskinan, <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3725/2727>, diakses pada 17 Oktober 2019

³⁹ Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan sehingga terintegrasi dengan kuat dengan pola-pola perilaku masyarakat, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1988), h. 5-6. Tradisi sebagaimana pendapat Shills dalam Piot Sztompka adalah sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini, Shills dalam Piot Sztompka, *The Sociology of Social Change*, (Alih Bahasa oleh Alimandan, dengan Judul: *Sosiologi Perubahan Sosial*), (Jakarta: Prenada, 2012), h. 70

⁴⁰ Tradisi dapat dibagi dalam dua bentuk, yakni bentuk benda dan bentuk gagasan. Dalam bentuk benda, seperti istana, candi, tembok, kereta kencana, dll, sedangkan tradisi dalam bentuk gagasan, seperti keyakinan, kepercayaan, symbol, norma, nilai, aturan, dan ideologi. *Ibid.*, h. 70

seorang hamba yang takwa, yakni mengimani sang maha penuntun dan pemberi serta melaksanakan segala perintahnya sebagai wujud ketakwaan ke pada-Nya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf (7): 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. Al-A'raf (7): 96)

Dengan demikian, dimensi inti tentang modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat untuk bekerja sama membangun jaringan (*al-'alâqah*) dengan cara memperkuat *ukhuwah* guna mencapai tujuan bersama dilandasi keimanan dan amal saleh. Kerja sama dalam suatu pola *inter-relasi* yang timbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun atas kepercayaan yang ditopang norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat.⁴¹ Modal sosial sebagai bentuk kebersamaan dan kewajiban sosial yang diinstitusionalisasikan dalam bentuk kehidupan bersama atau dalam kelompok-kelompok usaha sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang ada pada masyarakat.

Modal sosial yang diinstitusikan dalam kelompok-kelompok usaha yang sesuai dengan potensi obyek penelitian, misalnya, Desa Taman Cari memiliki 1 (satu) Gapoktan dengan 16 (enam belas) kelompok tani (Poktan) yang bergerak dalam bidang pertanian dan 2 (dua) Poktan dalam perikanan, dan 2 (dua) kelompok wanita tani (KWT) yang bergerak dalam bidang pemanfaatan lingkungan, dan memiliki 9

⁴¹ *Ibid.*, h. 41

(Sembilan) kelompok pengajian.⁴² Menurut Sugianto Edy Susanto, Poktan-Poktan dibentuk sesuai dengan lingkungannya masing-masing, sehingga Poktan-Poktan tersebut memiliki daya ikat dan kebersamaan yang kuat. Lebih-lebih mereka memiliki aturan-aturan yang mereka sepakati bersama.⁴³

Akuisisi (pengendalian) terhadap kelompok-kelompok usaha yang ada pada masyarakat merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang menegaskan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan”. Berarti, pemerintah diharapkan aktif campur tangan kepada system, struktur dan mekanisme yang mengutamakan kepentingan rakyat,⁴⁴ sebagai wujud dari azas kebersamaan dan kekeluargaan sekaligus gambaran modal sosial yang ada pada masyarakat.

Modal social (*ra's al-mâli al-ijtimâiy*) dan pemberdayaan masyarakat (*tamkîn al-mujtma'*) merupakan media pelebagaan potensi masyarakat dalam meningkatkan tarap hidup dalam pengertain ekonomi. Menurut Althusser, ekonomi pada dasarnya, tetapi bukan pada prakteknya. Masyarakat dipersatukan bukan karena ekonomi, tetapi oleh ideologi atau mufakat.⁴⁵ Dengan demikian, ideology atau *ashabiyah* dengan berbagai maknanya yang perlu diorganisir sekaligus sebagai tolak ukur untuk mencapai tingkat ekonomi dan kesejahteraan hidup.

Instrumen untuk mengukur kesejahteraan hidup dapat dilihat dari tingkat ekonomi masyarakat. Tingkat ekonomi merupakan bentukan dua kata, yakni kata

⁴² Suparni, Sekdes Desa Taman Cari, *Interview*, pada tanggal 24 Desember 2015

⁴³ Sugianto Edy Susanto, Kepala Desa Desa Taman Cari, *Interview*, pada Tanggal 26 Oktober 2018

⁴⁴ Sri Edi Swarsono, Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat, *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Forum Dekan Syari'ah dan Dakwah se-Indonesiadi di IAIN Mataram, pada tanggal 31 Juli-2 Agustus 2009, h. 4.,

⁴⁵ Peter Beilharz, *Social Theory: A Guide to Central Thinkers*: Terj. Oleh Sigit Jatmiko dengan Judul *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet., ke. III, h. 4

tingkat dan ekonomi. Tingkat bermakna “pelapisan” dan ekonomi adalah cara-cara produksi, distribusi, mengedarkan, dan penggunaan barang. Juga, membahas bagaimana mengembangkan cara-cara tersebut agar produksi semakin tumbuh, sirkulasi menjadi mudah, dan distribusi semakin baik, sehingga kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi.⁴⁶ Dengan demikian, tingkat ekonomi adalah pelapisan atau hirarki dalam produksi, distribusi, dan konsumsi yang bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Taman Cari sebagai obyek penelitian disertasi ini menunjukkan tingkat sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keluarga sejahtera 3 masyarakat berjumlah 747 KK dari 1223 KK yang ada, tidak ada satupun KK yang berada pada level pra sejahtera.⁴⁷ Level keluarga sejahtera 3 bagi masyarakat Desa Taman Cari merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, terutama yang bersumber dari produksi usaha pertanian.

Demikian pentingnya Modal social (*ra's al-mâli al-ijtimâiy*) dan pemberdayaan masyarakat (*tamkîn al-mujtma'*) sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat (*al-iqtisodiy al-mujma'*), sehingga kajian dalam penelitian disertasi ini difokuskan tentang kajian modal sosial pada masyarakat, yakni sebuah komunitas yang ada pada desa berprestasi Provinsi Lampung tahun 2015, yakni Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur sebagai juara juara 1 (satu) dalam lomba desa se-Provinsi Lampung tahun 2015.

Penetapan Desa Taman Cari sebagai obyek penelitian disertasi ini, karena desa tersebut memiliki Poktan-Poktan yang solid, telah serius melaksanakan program pemberdayaan, dan mayoritas masyarakatnya (717 KK) pada tingkat keluarga sejahtera

⁴⁶ Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 3

⁴⁷ Lisson Johaness, Sekdes Desa Taman Cari, *Interview*, pada Tanggal 26 Oktober 2018

3. Misalnya, menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur sejak kurang lebih 10 tahun terakhir telah mengalokasikan dana untuk program pemberdayaan masyarakat.⁴⁸ Dan, salah satu instrument dalam mengevaluasi keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang, dilakukan melalui program lomba desa berprestasi tingkat kabupaten-kota dan tingkat Provinsi Lampung. Wal hasil, pada tahun 2015, Desa Taman Cari Kabupaten Lampung Timur terpilih menjadi juara 1 (satu) lomba desa se-Provinsi Lampung.

Pemilihan desa berprestasi dilaksanakan atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2007 tentang Perlombaan Desa dan Kelurahan. Juga, berdasarkan Surat Gubernur Nomor: 414.4/79/11.09/2015, tanggal 28 Januari 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa 2015. Sedangkan, obyek/bidang yang dinilai pada lomba desa terdiri atas: bidang pendidikan masyarakat, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang keamanan dan ketertiban, bidang partisipasi masyarakat, pemerintahan desa, bidang lembaga kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).⁴⁹

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis penelitian disertasi ini dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Salah satu indikator penilaian lomba desa tingkat provinsi tahun 2015 adalah aspek pemberdayaan masyarakat.

⁴⁸ Yuda Setiawan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Lampung, *Interview*, pada Tanggal 26 Nopember 2015

⁴⁹ Yuda Setiawan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Lampung, *Interview*, pada Tanggal 26 Nopember 2015

- b. Masyarakat Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur terorganisir dalam kelompok-kelompok tani yang memungkinkan indikator-indikator modal sosial dapat berkembang.
- c. Modal sosial yang menjadi salah satu potensi sumber daya manusia seakan-akan terpinggirkan dibandingkan dengan kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan spiritual, padahal pemberdayaan dalam perspektif dakwah merupakan upaya mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok agar mereka mengetahui aktivitas yang dilandasi keyakinan, kaidah (norma-norma) dan nilai-nilai normatif keagamaan dan budaya positif.
- d. Tidak semua masyarakat menyadari bahwa modal sosial merupakan potensi dalam pemberdayaan masyarakat dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.
- e. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok-kelompok terorganisir, disinyalir masih tergantung pada bantuan pihak luar, terutama pemerintah.
- f. Masyarakat Desa Taman Cari memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup sejahtera.
- g. Kelompok-kelompok tani yang terdiri dari latar belakang yang berbeda, terutama perbedaan keyakinan.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Potensi modal sosial yang ada pada masyarakat, baik yang bersumber dari norma-norma agama (Islam) maupun yang bersumber dari budaya masyarakat di desa berprestasi Provinsi Lampung.
- b. Pemberdayaan masyarakat Islam berbasis modal sosial yang ada pada masyarakat di desa berprestasi Provinsi Lampung.
- c. Tingkat ekonomi masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat Islam di desa berprestasi Provinsi Lampung, dan
- d. Tingkat ekonomi masyarakat berbasis modal sosial yang ada pada masyarakat di desa berprestasi Provinsi Lampung.



3. Rumusan Masalah

Batasan masalah yang telah ditetapkan merupakan fokus penelitian disertasi yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh modal sosial terhadap tingkat ekonomi masyarakat di desa berprestasi Provinsi Lampung ?
- b. Bagaimana pengaruh proses pemberdayaan masyarakat Islam terhadap tingkat ekonomi masyarakat di desa berprestasi Provinsi Lampung?
- c. Bagaimana pengaruh modal sosial yang ada pada masyarakat terhadap proses pemberdayaan masyarakat Islam di desa berprestasi Provinsi Lampung?
- d. Bagaimana pengaruh modal sosial dan pemberdayaan masyarakat Islam terhadap tingkat ekonomi masyarakat di desa berprestasi Provinsi Lampung?

C. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian disertasi ini berjudul: “*modal sosial (social capital) dalam pemberdayaan masyarakat Islam dan pengaruhnya terhadap tingkat ekonomi masyarakat (Studi pada Desa Berprestasi di Provinsi Lampung)*”. Penelitian disertasi ini dilakukan dengan alasan:

Pertama, pemberdayaan masyarakat Islam adalah upaya memberdayakan masyarakat berdasarkan kondisi obyektif dan prinsip-prinsip partisipatif, berkelanjutan (*Sustainability*), dan terpadu (*integrated*), serta keadilan Sosial (*Social Justice*). Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan, terpadu, dan berkeadilan sosial harus menggunakan pendekatan kultural atau potensi masyarakat lokal. Salah satu potensi masyarakat lokal yang kurang diperhatikan dalam paradigma pembangunan dengan pendekatan *topdown* adalah potensi modal sosial.

Kedua, Penelitian Disertasi ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di desa berprestasi. Sehingga, memungkinkan untuk memperoleh data, baik data interview maupun data dokumentasi dan observasi. Juga, didukung oleh literatur-literatur yang memadai.

Namun demikian, penelitian disertasi ini akan fokus pada sisi-sisi lain dari masalah-masalah modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat yang telah diteliti oleh orang lain, seperti:

1. Penelitian thesis oleh I Gede Adi Ambara, mahasiswa Strata Dua Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang tahun 2011, dengan judul: “Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa Adat/Pakraman

(Studi Kasus LPD Desa Pakraman Tibubiyu, Kabupaten Tabanan Bali).⁵⁰ Penelitian tersebut, secara khusus membahas tentang kontribusi modal sosial dalam pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Temuan penelitian menunjukkan, bahwa modal sosial yang berkembang di masyarakat Desa Pakraman Tibubiyu memiliki peran positif dalam mendukung pengelolaan LPD desa tersebut. Pertama, dalam perencanaan kegiatan dan anggaran LPD, keberadaan modal sosial berupa network di antara pengurus dan perangkat adat mampu memfasilitasi proses penyusunan perencanaan secara bersama-sama. Kedua, dalam proses rekrutmen personil LPD, rasa kebersamaan dan rasa memiliki terhadap desa pakraman memfasilitasi warga untuk memberikan suaranya dalam proses tersebut. Ketiga, dalam proses penyaluran kredit LPD, modal sosial berupa trust menjadikan LPD berani memberikan kredit tanpa anggunan kepada warga dengan batasan tertentu. Dalam proses ini juga, network antara pengurus LPD dengan perangkat adat berperan dalam melakukan pengenalan dan control terhadap nasabah. Keempat, dalam proses penyelesaian kredit macet, penerapan sanksi adat dan kebiasaan warga untuk terhindar dari rasa malu apabila diketahui menunggak di LPD, memfasilitasi kepatuhan warga terhadap kewajiban transaksi. Kelima, dalam proses pengawasan dan pertanggungjawaban LPD, network antara pengurus dan perangkat adat memfasilitasi penyaluran informasi perkembangan LPD kepada masyarakat

2. Hasil penelitian Edwin Thobias dkk., dengan judul: “Pengaruh Modal Sosial terhadap Perilaku Kewirausahaan (Studi pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

⁵⁰ I Gede Ambara, Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa Adat/Pakraman (Studi Kasus LPD Desa Pakraman Tibubiyu, Kabupaten Tabanan Bali), dalam http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/33084?mode=full&submit_simple>Show+full+item+record, diakses pada 19 November 2014

di Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud”.⁵¹ Penelitian tersebut, fokus kepada seberapa besar modal sosial mempengaruhi perilaku pelaku usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud. Temuan lapangan, diperoleh hasil sebagai berikut : nilai $r_s = 0,89$ yang artinya hubungan antara modal sosial dan perilaku kewirausahaan sangat tinggi. Dari uji signifikansi pada tingkat $\alpha = 0,05$ diperoleh $t_{hitung} = 16,56 > t_{tabel} 3,7$ artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil analisis diperoleh nilai koefisien determinasi (r_s^2) sebesar 0,7921. Hal ini berarti besarnya sumbangan atau proporsi variabel modal sosial (x) sebesar 79% sedangkan sisanya 21% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

3. Penelitian Disertasi oleh Dede Sedana dengan judul: “Modal Sosial dalam Pengembangan Agribisnis Petani pada Sistem Subak di Bali”. Studi ini fokus pada: pengaruh elemen-elemen modal sosial terhadap pengembangan agribisnis petani di subak, proses pemberdayaan dan penyesuaian kelembagaan subak dalam pengembangan agribisnis, dan kekuatan dan kelemahan subak berkenaan dengan pengembangan agribisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial memiliki pengaruh yang kuat dalam pengembangan agribisnis petani pada sistem subak. Modal sosial di subak terdiri dari kepercayaan, norma sosial dan jaringan sosial antara petani anggota dengan pengurus subak dan koperasi. Kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial telah berlaku sejak nenek moyang mereka. Modal sosial tersebut berlaku hingga sekarang yang terdapat dalam sistem subak baik di antara petani, pengurus subak dan koperasi tergolong tinggi, sehingga menjadi

⁵¹ Edwin Thobias dkk, Pengaruh Modal Sosial terhadap Perilaku Kewirausahaan (Suatu studi pada pelaku usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, file:///D:/S3%20FZ/modal%201.pdf, Edwin Thobias dkk., dalam Journal “ACTA DIURNA” Edisi April 2013, diakses pada tanggal 19 November 2014

modal dasar yang sangat penting di dalam melakukan aktivitas kolektif yang berkenaan dengan pertanian, irigasi, sosial budaya dan agribisnis.⁵²

4. Hasil penelitian Suandi, Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, dengan judul: “Hubungan Modal Sosial dengan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Daerah Perdesaa Jambi”.⁵³ Penelitian ini fokus pada pengaruh modal sosial terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga di daerah perdesaan. Desain penelitian adalah *cross sectional*. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kerinci dengan memilih dua kecamatan, yaitu: Kecamatan Keliling Danau, dan Kecamatan Batang Merangin. Variabel penelitian: (1) kesejahteraan ekonomi keluarga (kesejahteraan objektif, dan kesejahteraan subjektif, dan (2) Modal sosial (asosiasi lokal dan karakter masyarakat). Analisis data menggunakan model *Structural Equation Modelling* (SEM) melalui program LISREL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asosiasi lokal dan karakter masyarakat tergolong kuat. Mengacu kepada alokasi pengeluaran, tingkat ekonomi petani tergolong relatif kaya dengan distribusi keluarga yang tergolong pada kelompok sejahtera mencapai 78,8%, sedangkan 21,2 % tergolong masyarakat miskin. Asosiasi lokal dan karakter masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif sangat nyata terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga.

Berdasarkan empat laporan hasil penelitian di atas, maka penelitian disertasi ini lebih fokus pada: potensi modal sosial pada masyarakat dan kontribusi modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat Islam di pedesaan. Serta, mengkaji

⁵² Dede Sedana, *Modal Sosial dalam Pengembangan Agribisnis Petani pada Sistem Subak di Bali*, http://www.pps.unud.ac.id/disertasi/pdf_thesis/unud-59-1883418596-cover.pdf

⁵³ Suandi, Hubungan Modal Sosial dengan Kesejahteraan Ekonomi, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas/article/view/2940>, diakses pada tanggal 4 Februari 2016

pengaruh modal social dan pemberdayaan masyarakat dalam tingkat ekonomi di Provinsi Lampung.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Modal Sosial (*Social Capital*) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat (Studi pada Desa Berprestasi di Provinsi Lampung).

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), berarti manusia dikodratkan untuk selalu hidup bermasyarakat dan berinteraksi antara satu dengan yang lain, baik dalam lingkup yang diikat oleh hubungan emosional, seperti; keluarga, kerabat, tetangga, teman, suku, dan kenalan maupun lingkup yang diikat oleh kesamaan kepentingan, seperti pekerjaan. Terjadinya interaksi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, baik fisik maupun non fisik. Untuk itu, sikap seperti saling mempercayai, saling memberi, saling menerima, saling membantu, dan hubungan/jaringan sebagai bagian dari budaya perlu dipertahankan, karena memungkinkan pembangunan dapat berlangsung dengan sukses.⁵⁴ Modal sosial berupa nilai-nilai budaya tersebut dapat saja berubah seiring terjadinya perubahan sosial, tetapi menurut Soetomo, masyarakat dapat merubah dan memperbaharui tradisi tertentu demi kepentingan pembangunan, namun tetap mempertahankan kebudayaannya agar perubahan tetap berlangsung tanpa merubah identitas budayanya.⁵⁵ Untuk itu, upaya mengidentifikasi modal sosial yang ada pada masyarakat dianggap perlu dilakukan sebagai langkah awal dalam program pemberdayaan masyarakat.

⁵⁴ Soetomo, *Pembangunan Masyarakat.*, *op. cit.*, h. 202-203

⁵⁵ *Ibid.*,

Identifikasi modal sosial dalam program pemberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan, karena belajar menggunakan norma-norma kelompok yang sudah ada, atau mematuhi otoritas adat kebiasaan, merupakan syarat bagi manusia untuk bertahan hidup.⁵⁶ Tonkiss, yang dikutip oleh Syahyuti mengingatkan, bahwa modal sosial akan bernilai ekonomis jika membantu orang lain, misalnya membantu masyarakat mengakses sumber-sumber keuangan, informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha, dan meminimalkan biaya transaksi.⁵⁷ Dengan demikian, apabila modal sosial dimanfaatkan atau sebagai pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat, keberdayaan masyarakat akan terwujud, produktifitas dan nilai ekonomis akan meningkat. Sebagaimana dijelaskan Erni Febrina Harahap, SE., M. Si, dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang, dalam penelitian yang berjudul “pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri,”⁵⁸ pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Secara praktis, upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat diarahkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat, baik SDM maupun SDA sekitar. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis.

⁵⁶ Peter Beilharz, *Social Theory: A Guide to Central Thinkers*: Terj. Oleh Sigit Jatmiko dengan Judul *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, op., cit., h. 229-230

⁵⁷ Syahyuti, Peran Modal Sosial (Social Capital) Dalam perdagangan Hasil Pertanian. (The Role Social Capital In Agricultural Trade). *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol 26(1): 32-43

⁵⁸ Erni Febrina Harahap, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan konomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012, ISSN : 2086 – 5031, h. 95, <http://int.search.tb.ask.com/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2016

Berdasarkan beberapa teori tersebut, maka penulis merumuskan tujuan penelitian disertasi ini sebagai berikut :

- a. Mengetahui tingkat ekonomi masyarakat, mengetahui modal sosial, dan mengetahui proses pemberdayaan masyarakat Islam.
- b. Mengetahui pengaruh modal sosial terhadap tingkat ekonomi masyarakat pada desa berprestasi di Provinsi Lampung, sehingga ditemukan teori-teori tentang kepercayaan, jaringan sosial, dan norma-norma yang berhubungan dengan tingkat ekonomi masyarakat.
- c. Mengetahui pengaruh pemberdayaan masyarakat Islam terhadap tingkat ekonomi masyarakat desa berprestasi di Provinsi Lampung, sehingga ditemukan teori-teori tentang pengaruh proses/tahapan pemberdayaan masyarakat Islam terhadap tingkat ekonomi masyarakat.
- d. Mengetahui pengaruh modal sosial terhadap pemberdayaan masyarakat Islam, sehingga teridentifikasi teori-teori tentang pengaruh kepercayaan, jaringan sosial, dan norma-norma sosial dalam proses pemberdayaan masyarakat Islam.
- e. Mengetahui pengaruh modal sosial dan proses pemberdayaan masyarakat Islam terhadap tingkat ekonomi masyarakat, sehingga ditemukan teori-teori tentang pengaruh modal sosial dan pemberdayaan masyarakat Islam secara bersamaan terhadap tingkat ekonomi masyarakat .

2. Kegunaan Penelitian

Sementara itu, hasil penelitian disertasi ini diharapkan ada manfaatnya, terutama bagi:

- a. Secara teoritik, studi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori-teori pemberdayaan masyarakat Islam dengan menggunakan pemahaman konstruktif tentang konsep modal sosial, baik yang bersumber dari ajaran agama Islam maupun kultur/budaya masyarakat lokal dan pengaruhnya dalam proses pemberdayaan masyarakat Islam dan tingkat ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam setiap tahap proses pemberdayaan, memiliki produktivitas dan daya saing yang tinggi dalam bidang ekonomi.
- b. Secara empirik, studi ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat Islam, baik pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan swasta maupun elit dan masyarakat desa yang memiliki kewajiban dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat berpartisipasi sesuai proporsinya.
- c. Secara normatif, studi ini diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan nilai-nilai agama dan adat/budaya yang berlaku pada masyarakat, karena nilai-nilai agama dan adat/budaya merupakan system tata nilai yang diyakini mampu mencapai tujuan hidup bersama. Dengan demikian, mereka memiliki nilai ibadah yang sama dihadapan Allah SWT dan masyarakat.
- d. Secara filosofis, pemberdayaan masyarakat Islam dan masyarakat yang berdaya dalam bidang ekonomi berbasis nilai-nilai moral yang Islami diharapkan berkontribusi mengembangkan masyarakat dengan pendekatan dakwah pengembangan masyarakat Islam (*dakwah bil-hall*).

E. Sistematika Penulisan

Bab I, bab Pendahuluan. Pada bab ini dibahas tentang hal-hal yang menjadi latar belakang teoritik maupun realitas empiris yang ditemukan pada obyek penelitian yang melatar belakangi pemikiran dilakukan penelitian, identifikasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan, membatasi masalah pada hal-hal yang dianggap paling penting, kemudian merumuskan pertanyaan penelitian, yang akan dibuktikan melalui penelitian ini. Pada bab ini, juga disajikan hasil-hasil penelitian terdahulu, kemudian dirumuskan tentang tujuan dan kegunaan penelitian. Bab ini berguna sebagai titik tolak dalam merumuskan teori bab II, merumuskan metodolgi penelitian serta mengumpulkan, menganalisa data melalui uji hepotesi, dan pembahasan pada bab IV, serta dasar dalam merumuskan kesimpulan pada bab V.

Bab II, bab Teori. Pada bab ini penulis menguraikan secara lengkap dan sistimatis tentang teori-teori modal sosial, meliputi konsep modal sosial dan dimensi modal sosial baik yang bersumber dari ajaran Islam maupun teori-teori umum. Juga, teori-teori pemberdayaan masyarakat Islam, meliputi konsep pemberdayaan, proses (tahapan) pemberdayaan masyarakat Islam, dan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat Islam. Selanjutnya dibahas tentang teori-teori tingkat ekonomi, seperti tingkat produksi, distribusi, dan konsumsi dalam perspektif umum maupun Islam. Pada bab ini juga identifikasi teori-teori tentang pengaruh modal sosial dan pemberdayaan masyarakat Islam terhadap tingkat ekonomi masyarakat, baik yang bersumber dari pendapat para ahli maupun bersumber dari hasil penelitian. Yang tidak kalah penting, pada bab teori dirumuskan kerangka fikir tentang pengaruh modal sosial terhadap tingkat ekonomi, pengaruh pemberdayaan masyarakat Islam terhadap tingkat ekonomi, pengaruh modal sosial terhadap pemberdayaan masyarakat Islam, dan pengaruh modal

sosial dan pemberdayaan masyarakat Islam terhadap tingkat ekonomi serta disajikan tentang rumusan definisi operasional dan hipotesis penelitian.

Bab III, bab Metode Penelitian. Pada bagian A, ini akan diuraikan tentang metode penelitian sebagai rumusan atau landasan dalam penetapan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian. Bagian B, akan diuraikan tentang Metode Survei, meliputi desain penelitian, penetapan populasi dan sampel, instrumen variabel (definisi konseptual, definisi operasional, kisi-kisi kuesioner, uji validitas dan reliabilitas), analisa kuantitatif, dan hipotesis statistik. Pada bagian C akan dibahas tentang Metode Kualitatif, meliputi sumber data dan teknik pengumpulan data, serta analisa data.

Bab IV, pada bagian A, akan dideskripsikan tentang profil desa obyek penelitian. Bagian B, pembahasan tentang deskripsi data kuantitatif dan kualitatif serta uji hipotesis data kuantitatif. Bagian C, adalah sub pembahasan, yakni mengkaji hasil deskripsi data statistik dan kualitatif dengan menggunakan teori-teori yang telah diuraikan pada bab II.

Bab V, Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari masalah-masalah yang telah dirumuskan pada bab I. dan saran merupakan sumbangan pemikiran yang didasarkan pada kelemahan dan kekurangan obyektif obyek penelitian yang terungkap melalui kuesioner, interview, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data penelitian.

BAB II

MODAL SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM DAN EKONOMI MASYARAKAT

Masyarakat Islam (*al mujtam'at al- Islamiyah*) adalah masyarakat yang dibangun atas landasan syari'at Islam, yang dengannya terciptalah hubungan kerja dan produksi, hukum dan kaedah moral menyangkut perseorangan dan masyarakat, pokok-pokok budi pekerti dan undang-undang pergaulan, bahkan mencakup segenap upaya tertentu untuk mengokohkan tata kehidupan sosial dan menggariskan jalan untuk tumbuh dan berkembang.⁵⁹ Masyarakat diatur oleh keragaman dan agama yang mengikat dalam mencapai tujuan kolektif, dan tidak bisa diraih tanpa adanya suatu sistem, adat, dan hukum yang mengarahkan setiap individu untuk mencapainya, yakni nilai-nilai ke Ilahian atau nilai-nilai ketuhanan.⁶⁰ Ali Syari'ati, yang dikutip oleh Nanih Machendrawaty berpendapat, masyarakat Islam adalah Ummah, yaitu masyarakat yang hijrah, antara satu dengan yang lain saling membantu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan.⁶¹ Dan sejalan dengan keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat.

Menurut Ibn Khaldun dalam Khairul Amin, tumbuh dan berkembangnya suatu masyarakat berkaitan dengan kondisi sosial politik masyarakat didasarkan pada beberapa perspektif, yakni: (1) hubungan sosial antara kelompok-kelompok manusia, seperti keluarga, suku, dan lainnya merupakan faktor sentimen dan ide membangun hubungan sebagai perspektif psikologi; (2) perjuangan mempertahankan dan

⁵⁹ Sayid Qutb, *Masyarakat Islam: Alih Bahasa oleh H.A. Muthi Nurdin*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), h. 47-48

⁶⁰ Murtadha Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012), h. 6.

⁶¹ Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 6

memperebutkan kekuasaan dan kedaulatan sebuah kelompok atau negara sebagai persentif politik, dan; (3) pemenuhan ekonomi pada tingkat personal, keluarga, dan Negara sebagai perspektif ekonomi.⁶²

Hubungan sosial yang membentuk kelompok, seperti keluarga, suku dan lainnya yang memiliki solidaritas golongan, harmonisasi, kohesi sosial dalam spectrum cultural pada konsep *ashabiyah* (ikatan) menurut Khudayri dan 'Utsmani dalam Khairul Amin terdapat beberapa bentuk, yaitu: (1). ikatan yang paling kuat adalah ikatan kekerabatan; (2) ikatan garis keturunan; (3) ikatan kekerabatan; (4) ikatan keluarga dengan kaum lain, dan (5) ikatan antara budak dengan tuannya.⁶³

Berdasarkan konsep hubungan masyarakat yang diikat oleh ikatan persaudaraan (*ukhuwwah*) tersebut, maka masyarakat Islam yang diikat oleh komitmen terhadap modal berupa kaedah moral yang mengatur hubungan sosial, baik kaedah moral yang melandasi hubungan saling mempercayai (amanah) dan sangsi-sangsi bagi yang melakukan pelanggaran, maupun kaedah moral yang melandasi *ukhuwwah Islamiyah* dan kesepakatan sosial (*ta'awun*) menumbuhkan kekuatan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Kaidah-kaidah moral sebagai modal difahami dengan istilah modal sosial (*ra's al-mâli al-ijtimâiy /social capital*).

1. Modal Sosial (*Raksul Maali al 'Ijtima'i/Social Capital*)

1. Memahami Konsepsi Modal Sosial

Modal sosial (*ra's al-mâli al-ijtimâiy*) adalah konsep perilaku dalam hubungan sosial, baik individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan hidup.

⁶² Khairul Amin, *Badawah dan Hadarah: Konsep Sosiologi Ibn Khaldun, Jurnal Sosiologi Agama* - ISSN (p) 1978 - 4457, ISSN (e) 2548 - 477X Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2018, pp. 85-98. doi: <http://dx.doi.org/10.14421/jsa.2018/121-05.85-98>, diakses pada Tanggal 27 November 2019

⁶³ *Ibid.*,

Menurut Bourdieu dan Wacquant yang dikutip oleh John Field, modal sosial adalah “berbagai sumber daya aktual atau maya yang ada pada seseorang individu atau kelompok yang memiliki jaringan berupa hubungan timbal balik, pengenalan, dan pengakuan yang terinstitusionalisasikan baik sedikit maupun banyak dalam waktu yang panjang”.⁶⁴ Modal sosial terinstitusionalisasikan dalam keluarga dan organisasi sosial komunitas yang berguna bagi perkembangan kognitif sosial anak atau orang yang masih muda.

Sumber daya tersebut berbeda bagi orang lain yang memberikan manfaat penting bagi anak-anak dan remaja bagi perkembangan modal manusia mereka.⁶⁵ Artinya, apabila keinginan masyarakat untuk meningkatkan modal sosial akan membawa pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraannya. Berdasarkan laporan World Bank, bagi Indonesia modal sosial mempunyai berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga.⁶⁶

Modal sosial dimaknai oleh Robert D. Putnam adalah “*Social capital here refers to features of social organization, such as trust, norms, and networks, that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions*”.⁶⁷ Modal sosial merupakan gambaran atau bentuk organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi untuk masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi. Menurut Woolcock’s yang dikutip oleh Shahrukh Rafi Khan dkk., “*social capital as norms and networks that facilitate*

⁶⁴ John Field, Social Capita, Alih Bahasa oleh; Nurhadi dg Judul: *Modal Sosial*, (Sidoreje-Bantul: Kreasi Wacana, 2010), h. 23

⁶⁵ *Ibid.*, h. 38

⁶⁶ Grootaert, C. dkk. *Social Capital, Household Welfare and Poverty in Indonesia*. Working Paper No. 6, (Washington: TheWorld Bank, 1999)

⁶⁷ Robert D. Putnam, *Making Democracy Work Civic Traditions in Modern Italy*, (New Jersey, Princeton University Pres, 1992), h.167

collective action is most suitable for our research on participatory rural development. Implicit in this definition is trust and social interactions that make the norms and networks work for a positive cause".⁶⁸ Modal sosial sebagai norma dan jaringan yang memfasilitasi tindakan kolektif paling sesuai untuk penelitian tentang pembangunan partisipatif dipedesaan. Yang tersirat dalam definisi ini adalah kepercayaan dan interaksi sosial yang membentuk norma dan jaringan kerja untuk tujuan yang positif.

Ibn Khaldun dalam Khairul Amin, tentang dua konsep masyarakat menetap, terbagi menjadi dua: (1) konsep masyarakat yang cenderung primitif tetapi memiliki ikatan (*ashabiyah*) yang solid, karena diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai serta kepercayaan dan perasaan senasib. (2) konsep masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi, menetap di kota, tetapi tingkat solidaritasnya lemah. Karena, kehidupan mereka lebih bersifat personal (*individualistic*) dalam memenuhi kebutuhan dan penuh dengan persaingan. Konsep yang pertama disebut masyarakat *badawah* dan konsep yang kedua disebut *hadarah*.⁶⁹ Dengan demikian, konsep masyarakat *badawah* adalah identik dengan masyarakat perdesaan, yang memiliki modal sosial yang kuat, seperti kepercayaan, norma-norma sosial. dan kebersamaan.

Modal sosial bukanlah produk utama dari perilaku kelompok, ia ada jika diamati secara seksama bahkan menjadi instrumen kebijakan public. Hal ini sesuai dengan pendapat John D. Montgomery, modal sosial adalah "*Since social capital is usually a by-product of group behavior, its existence should be observed as a separate feature of a group's assets. It is most frequently observed indirectly*

⁶⁸ Shahrukh Rafi Khan, Zeb Rifaqat, and Sajid Kazmi, *Harnessing and Guiding Social Capital for Rural Development*, (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2007), h. 3

⁶⁹ Khairul Amin, *Badawah dan Hadarah: Konsep Sosiologi Ibn Khaldun*, *op. cit.*, h. 92-94

through its influence on social systems and their policies, but it may also perform the reverse role by becoming an instrument of policy".⁷⁰ Atau (modal sosial biasanya merupakan produk sampingan dari perilaku kelompok, keberadaannya harus diamati sebagai bagian terpisah dari aset kelompok. Paling sering diamati secara tidak langsung melalui pengaruhnya pada sistem sosial dan kebijakan mereka, tetapi juga dapat melakukan peran sebaliknya menjadi instrumen kebijakan. Bahkan, menurut Fukuyama dalam John D. Montgomery, Modal sosial dapat berasal dari partisipasi dalam kegiatan khusus masyarakat sipil, tetapi berfungsi juga sebagai pendukung yang potensial ketika suatu masyarakat bergantung pada tindakan sukarela semacam itu di Indonesia untuk mempertahankan kebijakan public.⁷¹

Harus dicermati bahwa kondisi modal sosial di daerah pedesaan berbeda dengan modal sosial di perkotaan. Masyarakat pedesaan syarat dengan sistem kehidupan berkelompok atas dasar sistem kekerabatan dan kekeluargaan. Sedangkan masyarakat perkotaan lebih individualistis tanpa harus bergantung kepada orang lain secara spesifik.⁷² Pada umumnya masyarakat pedesaan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian pangan, seperti padi, jagung, singkong, dan perikanan.

⁷⁰ John D. Montgomery (ed), *Social Capital as a Policy Resource*, (Amerika, Pusat Penelitian Basin Pasifik Universitas Soka, 2000), h. 227

⁷¹ *Ibid.*, h. 227

⁷² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), h. 57

2. Dimensi Modal Sosial

Konsep modal sosial yang berhubungan dengan kepercayaan, jaringan, dan norma-norma telah dikenal dalam Islam sejak 15 abad yang lalu, walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan dengan menggunakan istilah modal sosial. Menurut Mintarti yang dikutip oleh Khairul Rosyadi, Islam komitmen terhadap norma dan kontrak sosial yang disepakati bersama. Ciri dasar masyarakat Muslim adalah *ta'awun* (tolong-menolong), *takaful* (saling menanggung), dan *taḍomun* (memiliki kepedulian). Dalam sejarah Islam, masyarakat Madinah pada zaman Rasulullah disebut-sebut sebagai masyarakat ideal (masyarakat madani atau civil society). Masyarakat yang menujunjung tinggi nilai-nilai peradaban, berazas pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dan sosial.⁷³

Pertama, kaedah moral sebagai landasan saling mempercayai (*trust*) dalam Islam selalu dikaitkan dengan nilai-nilai kebaikan, seperti; *as-shidq* (jujur), *al-kadzb* (tidak berdusta), serta menepati janji dan tidak khianat. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 12, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “ dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. Mereka

⁷³Khairul Sosyadi, Islam, Modal Sosial, dan Pengentasan Kemiskinan, <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3725>. pdf, diakses pada 17 Oktober 2019

memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah

Balasan orang-orang yang berbuat baik. (QS. Azzumar (39): 33-34)

Rosul bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا
يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ
وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ
وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا⁷⁴

Artinya: “Tetapilah kejujuran olehmu, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan dan kebajikan mengantarkan kepada surga. Dan seseorang senantiasa bersikap jujur dan berusaha jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah olehmu sikap dusta, karena kedustaan membawa kepada perbuatan fajir dan kefajiran mengantarkan kepada neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta dan berusaha dusta sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta.” (H.R. Muslim)

Ayat dan hadits di atas, mengisyaratkan, orang yang jujur adalah orang yang perkataan dan perbuatannya sesuai dengan realitas, terutama tentang kebaikan. Kejujuran merupakan ciri orang yang bertakwa, sehingga Allah SWT akan mewujudkan apa yang diinginkan. Sebaliknya, apabila orang dusta (*al-kadzb*) Allah tidak akan mewujudkan keinginannya dan selalu akan dianggap sebagai orang yang dusta (ahli dusta). Sebaliknya, sikap baik sangka (*huz nuzzon*), jujur, dan amanah akan mempererat tali persaudaraan dan saling mempercayai antara sesama muslim dan sesama umat manusia.

Hal ini sejalan dengan pendapat Prancis Fukuyama yang menjadikan kepercayaan (*trust*) sebagai fokus kajian modal sosial di Negara-negara yang kehidupan ekonomi dan sosialnya sudah modern dan kompleks. Menurut

⁷⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), Juz 13, h. 1

Fukuyama, kepercayaan (*trust*) adalah harapan yang timbul dalam masyarakat, seperti kejujuran, perilaku kooperatif, berdasarkan norma-norma bersama. Kepercayaan tampak pada kelompok-kelompok sosial terkecil, seperti, keluarga hingga kelompok terbesar, seperti bangsa. Modal sosial biasanya dibuat dan disalurkan melalui mekanisme budaya seperti agama, tradisi, atau sejarah kebiasaan. Kontrak dan kepentingan berdasarkan nilai-nilai dan etika bersama dalam komunitas menjadikan sikap saling percaya antar anggota dan tidak memerlukan peraturan hukum. Oleh karena itu, akuisisi terhadap modal sosial membutuhkan habituasi dengan norma-norma moral dari masyarakat, dan dalam konteksnya, akuisisi kebajikan seperti kesetiaan, kejujuran, dan ketergantungan harus mengadopsi norma-norma umum secara keseluruhan.⁷⁵

Menurut Robert Lawang, kepercayaan merupakan “hubungan antara dua pihak atau lebih untuk suatu harapan yang menguntungkan salah satu pihak atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial.”⁷⁶ Oleh karena itu Menurut Agus Salim, kepercayaan selalu dipertahankan melalui norma yang mengikat pihak-pihak yang berinteraksi.⁷⁷ Fukuyama dalam John Field mengatakan, kepercayaan adalah dasar dari tatanan sosial, komunitas tergantung kepada kepercayaan yang saling imbal balik dan tidak akan muncul secara spontan tanpa adanya saling mempercayai.⁷⁸ Adanya saling percaya antar individu dalam sebuah komunitas menjadi dasar terjalinnya interaksi dan hubungan sosial yang semakin erat, baik antar individu

⁷⁵ Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, (New York: The Free Press, 1996), h. 25-27

⁷⁶ Robert Lawang, *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Fisip UI Press Jakarta, 2004), h. 36.

⁷⁷ Agus Salim, *Pengantar Sosiologi Mikro*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 73

⁷⁸ John Field, *Modal Sosial*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), h. 1-2

dalam sebuah komunitas maupun antar individu dan komunitas dengan pihak lain diluar komunitas dalam meningkatkan daya (produktifitas).

Menurut Yustika, yang dikutip oleh Ni Nyoman Yuliarmi, sikap yang bertumpu pada kepercayaan dan ekspektasi, seseorang yang dianggap jujur dan memiliki reputasi yang baik akan lebih dihargai dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki kredibilitas, misalnya dalam hal mendapatkan kredit. Dalam masyarakat tradisional, hubungan transaksi ekonomi yang selalu berulang dan menghasilkan pencapaian yang bagus, dalam jangka panjang mempunyai ekspektasi untuk bertahan ketimbang relasi ekonomi yang dipenuhi dengan manipulasi. Modal sosial dalam bentuk ekspektasi dan kepercayaan inilah yang mampu ditransformasikan menjadi keunggulan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi.⁷⁹

Menurut Larner yang dikutip oleh Fukuyama, dua orang yang menunjukkan kepercayaan antara satu sama lain, akan semakin besar tingkat saling kepercayaan dalam diri mereka. Sebaliknya menurut John Hicks, dalam ketidakpercayaan sangat sulit untuk dilupakan pengalaman dan tidak mungkin akan kembali.⁸⁰ Oleh karena itu, kita bisa mengembangkan kepercayaan pada orang yang kita kenal, juga dengan orang asing. Mempercayai orang asing berarti menerima mereka ke kami "komunitas moral." Orang-orang asing mungkin terlihat berbeda dari kita, mungkin mereka memiliki ideologi atau agama yang berbeda, tapi percaya bahwa ada kesamaan yang mendasari nilai-nilai. Ketika kita berbagi

⁷⁹ Ni Nyoman Yuliarmi, Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Industri Kerajinan di Provinsi Bali, <https://ojs.unud.ac.id/>, diakses, pada tanggal 30 Januari 2018

⁸⁰ *Ibid.*, h. 169-170

nasib yang sama, tidak mungkin orang-orang asing akan mencoba untuk mengeksploitasi sikap positif kita.⁸¹

Kepercayaan atau sikap percaya kepada orang lain tidak hanya diwujudkan dalam sikap jujur saja, melainkan dapat berbentuk partisipasi masyarakat sebagai bentuk kerjasaman atau tanggaung jawab terhadap norma-norma yang telah disepakati dalam masyarakat. Partisipasi oleh Mubyarto dalam Taliziduhu Ndraha, sebagai kesediaan seseorang untuk berpartisipasi dalam mewujudkan program sesuai kemampuannya tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.⁸² Oleh karena itu, partisipasi merupakan salah satu faktor penting dalam modal sosial (kepercayaan) yang berpengaruh terhadap kelompok, karena melalui partisipasi semua individu dalam kelompok berkewajiban berkontribusi secara bersama-sama untuk kesejahteraan bersama.

Kedua, Jaringan sosial (*al-alâqah*) sebagai salah satu unsur modal sosial merupakan struktur sosial⁸³ yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya adalah individu atau organisasi yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, dan keturunan. Modal sosial tidak bisa dibangun oleh satu individu melainkan terletak pada interaksi sosial antar individu yang membentuk asosiasi berdasarkan kesamaan nilai-nilai yang mereka anut, juga

⁸¹ Eric M. Uslaner, *The Moral Foundations of Trust*, (New York: Cambridge University Press, 2002), h. 2-3

⁸² Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), h. 223.

⁸³ Struktur sosial bukanlah suatu susunan kekuasaan yang berlapis ke atas, bukan pula suatu susunan orang-orang yang martabatnya kian rendah, dan bukan pula sebatang pohon taksonomik, tetapi sebuah relasi yang secara ringkas dapat disebut “pencakupan kutub-kutub yang bertentangan. Peter Beilharz, *Social Theory: A Guide to Central Thinkers*: Terj. Oleh Sigit Jatmiko dengan Judul Teori-Teori Sosial: *Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet., ke. III, h. 91. Atau, sesuatu yang terdiri atas bagian yang saling bergantung dan membentuk suatu pola tertentu. Bagian ini terdiri atas pola perilaku individu/kelompok, institusi, dan masyarakat. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1990)

asosiasi-asosiasi tersebut mampu berinteraksi dengan individu atau asosiasi sebagai bentuk jaringan kerja sama (*neet work*) yang saling menguntungkan antara satu sama lain.⁸⁴

Islam mengatur jaringan sosial (*al-‘alâqah*), baik yang bersifat personal maupun yang bersifat kelompok/organisasi (keluarga, teman, masyarakat) dalam kehidupan melalui konsep *ukhuwwah* atau *ukhuwwah Islamiyah*.⁸⁵ Baik, persaudaraan yang didasarkan seketurunan/sekandung (*QS. Al-Nisa’ (4): 23*) dan ikatan keluarga (*QS. Thaha (20):29-30*), maupun ikatan lingkungan (semasyarakat), ikatan satu bangsa (*ukhuwah wathaniyyah*) (*QS. Al-A’raf (7): 65*) dan Seagama (*Ukhuwah fi ad-din al-islam*) (*QS. Al-Hujurat (49): 10*).

Konsep *ukhuwwah*, bukan sekedar istilah yang menjelaskan persamaan pandangan agama dan toleransi terhadap pandangan tersebut, melainkan ada hal-hal yang perlu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, seperti sikap saling tolong-menolong atau memenuhi kebutuhan orang lain, baik antar sesama muslim maupun antar sesama manusia. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن

⁸⁴ John Field , *Modal Sosial , op., cit.*, h. 18

⁸⁵ Istilah *Ukhuwwah* dimaknai “persaudaraan”. Sementara, istilah *Ukhuwwah Islamiyah* dimaknai “persaudaraan antar sesama muslim”, apabila kata *Islamiyah* dijadikan subyek atau pelaku *Ukhuwwah*. Apabila kata *slamiyah* dijadikan obyek, maka *Ukhuwwah Islamiyah* diartikan “persaudaraan yang bersifat Islami. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 2013), 639-640

تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah (5): 2)

Ayat di atas, menjelaskan bahwa tidak selayaknya bagi orang-orang mukmin berlaku aniaya kepada orang lain sekalipun terhadap musuh, terlebih mereka sedang mencari karunia dan keridhaan Allah SWT. Sebaliknya, dianjurkan untuk berbuat kebajikan dengan jalan saling tolong-menolong dalam berbuat kebajikan. Rasulullah SAW dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Muslim bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ
 أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا
 يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ
 عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ
 مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁸⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id; Telah menceritakan kepada kami Laits dari 'Uqail dari Az Zuhri dari Salim dari Bapakny bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ia tidak boleh berbuat zhalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya.

Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak." (H.R. Muslim:4677)

Karena, Allah SWT telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan untuk saling kenal-mengenal dan saling melengkapi antar kelompok atau komunitas (QS. Al-Hujurat (49) : 13). Atas rahmat Allah SWT, Masing-masing mereka memiliki kelebihan untuk saling memanfaatkan. Allah berfirman dalam surat Al-Zukhuf (43) : 32, yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan, rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Al-Zukhuf (43) : 32)

Konsep *ukhuwwah* sebagai bentuk jaringan merupakan media atau wadah dalam pemenuhan hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Fukuyama, setiap masyarakat modern atau tradisional, otoriter atau demokratis, feodal atau kapitalis ditandai oleh jaringan komunikasi interpersonal dan pertukaran, baik formal maupun informal. Beberapa jaringan ini terutama "horizontal," menjadikan status *agent* dan kekuasaan menjadi setara. Sedangkan jaringan "vertikal," menghubungkan *agent* yang tidak sama dalam asimetris hirarki dan ketergantungan. Jaringan keterlibatan sipil, seperti asosiasi lingkungan, masyarakat paduan suara, koperasi, klub olah raga, partai berbasis massa,

merupakan interaksi horisontal intens. Jaringan keterlibatan masyarakat merupakan bentuk penting dari modal sosial: dengan jaringan yang kuat kemungkinan komunitas dapat bekerja sama untuk saling menguntungkan.⁸⁷ Kerjasama akan lebih mudah dilaksanakan dalam hubungan kekerabatan dibandingkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Menurut Clifford Geertz dalam Putnam, usaha kooperasi (usaha bersama dan saling membantu) pada masyarakat Jawa lebih percaya kepada keluarga dibandingkan dengan kelompok lain yang lebih besar.⁸⁸ Karena, kualitas kepercayaan (*trust*) dan keharmonisan dalam sebuah jaringan (*ukhuwwah*) terkait dengan komitmen terhadap norma-norma sosial atau nilai-nilai yang diyakini bersama.

Hal ini telah dipraktekkan Rosulullah SAW di Madinah, yakni melakukan penataan umat dalam kehidupan agama, sosial, ekonomi, dan budaya dengan cara memperkuat ukhuwwah pada masyarakat Madinah. Menurut Suyuti Pulungan, tiga langkah penting yang dilakukan Rosulullah SAW dalam penataan masyarakat Madinah, yakni; pertama, membangun masjid sebagai lembaga membangun *ukhuwwah*. Kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Ketiga, menerbitkan peraturan tertulis sebagai upaya mewujudkan persatuan dan *ukhuwwah* yang mempersatukan kaum muslimin dan non muslim.⁸⁹

Modal sosial, baik dalam perspektif Islam maupun teori-teori ilmu-ilmu sosial mempunyai hubungan yang sangat erat bahkan tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat. Menurut Soetomo, peran modal sosial tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan sumber daya alam dan sumber daya

⁸⁷ Francis Fukuyama, *op., cit.*, 174

⁸⁸ Robert D. Putnam, *op., cit.*, h. 168

⁸⁹ M. Tuah dkk (Penyunting), *Islam Humanis*, (Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2001), h. 17-

manusia. Karena, kekuatan utama proses pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri.⁹⁰

Ketiga, Norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sangsi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan. Aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakat dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial.⁹¹ Peran norma dalam entitas sosial adalah untuk mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang muncul dalam masyarakat. Norma-norma sosial, menurut James Coleman, mentransfer hak untuk mengendalikan tindakan dari aktor untuk orang lain, biasanya karena tindakan memiliki "*eksternalitas*," yaitu, konsekuensi yang bersifat positif atau negatif bagi pihak lain.⁹² Oleh karena itu, norma yang diinternalisasikan kepada pihak lain harus didukung oleh model, sosialisasi (termasuk pendidikan kewarganegaraan), dan sanksi.⁹³

Kalau di atas telah diuraikan, bahwa Islam mengatur norma sosial dalam bentuk kaedah moral, seperti kejujuran, prasangka baik, dan tidak khianat sebagai landasan kepercayaan (*trust*) serta saling tolong-menolong atau memenuhi kebutuhan orang lain, baik antar sesama muslim maupun antar sesama manusia sebagai landasan *ukhuwwah Islamiyah* dalam sebuah jaringan sosial. Maka, kajian norma-norma sosial lebih fokus pada penghargaan dan sangsi-sangsi akibat

⁹⁰ Soetomo, *Pembangunan Masyarakat*., *op. cit.*, h. 227

⁹¹ M. Mawardi J, *Peranan sosial capital dalam Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Bina al-Ummah*, vol.3 No.2 jun 2007

⁹² Robert D. Putnam., *op. cit.*, h. 171

⁹³ Robert D. Putnam ., *op. cit.*, h. 171

inkonsistensi terhadap kaedah-kaedah moral yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartono dkk., yang dikutip oleh Ery Rahman dkk., mengatakan, masyarakat pedesaan memiliki pandangan hidup yang baik adalah hidup yang sesuai dengan aturan-aturan atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, tidak bertentangan dengan kehendak aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Jadi, norma-norma kemasyarakatan mempunyai kekuatan mengikat antar masyarakat, sehingga siapa melanggar atau menyimpang dari norma/aturan akan mendapat sangsi. Oleh karena itu, norma sosial menjadi kontrol sosial yang efektif.⁹⁴ Menurut Hasbullah, perilaku sosial memiliki konsekuensi berupa sangsi apabila terjadi inkonsistensi dengan norma-norma yang berlaku.⁹⁵

Islam memposisikan orang-orang yang inkonsistensi terhadap kaedah moral, seperti: tidak jujur, penuh kecurigaan dengan cara mencari-cari keburukan orang dan menggunjingkan satu sama lain bagaikan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. (QS Al-Hujurat (49): 12). Dan, seseorang senantiasa berdusta dan berusaha dusta sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta.” (HR. Riwayat Muslim). Bahkan, disebutkan sebagai orang-orang yang munafik. Secara rasional, tidak ada orang yang mempercayai orang terbiasa memakan bangkai manusia, gemar berdusta, terbiasa khianat, dan selalu tidak amanah dalam setiap aktifitasnya. Orang-orang seperti itu pasti akan terisolir dari system sosial yang bermoral dan berbudaya.

Oleh karena itu, Menurut Fukuyama, berlakunya norma dalam masyarakat ditandai dengan adanya timbal balik dan solidaritas, seseorang memberi karena

⁹⁴ Erry Rahman dkk., Norma Sosial Masyarakat Desa Nusapati Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat, Jurnal Hutan Lestari, Vol. 4 (2) : 244 – 249, <http://jurnal.untan.ac.id/>, diakses, pada tanggal 31 Januari 2018

⁹⁵ *Ibid.*,

mengharapkan untuk diberi.⁹⁶ Sehingga, Agnes Heller yang dikutip oleh Peter Beilharz berpendapat, syarat untuk mempertahankan hidup dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan belajar menggunakan norma-norma kelompok yang sudah ada. Atau, mematuhi otoritas adat kebiasaan sosial, ketidakpatuhan terhadap otoritas ini menimbulkan rasa malu akibat cemoohan dari anggota komunitas. Tidak semua norma dapat dipatuhi akibat otoritas eksternal yang dapat dipertentangkan, maka masyarakat modern menggunakan otoritas rasio praktis “suara nurani”. Mereka menerapkannya, memperjelas, dan menafsirkan norma-norma sosial berdasarkan rasio praktis mereka.⁹⁷ Dengan demikian, mereka memperoleh otonomi moral dalam hubungannya dengan masyarakat.

Nilai-nilai adalah suatu yang dianggap benar dan penting oleh anggota masyarakat. Misalnya nilai harmoni, prestasi, kerja keras, kompetisi dan lainnya merupakan contoh nilai yang sangat umum dikenal dalam masyarakat. Nilai senantiasa memiliki kandungan dan konsekuensi yang ambivalen. Nilai harmoni misalnya, oleh banyak pihak dianggap sebagai pemicu keindahan dan kerukunan hubungan sosial, tetapi di sisi lain juga diyakini mampu menghasilkan suatu kenyataan yang menghambat sistem kompetisi dan produktifitas. Modal sosial yang kuat juga sangat ditentukan oleh konfigurasi yang tercipta pada suatu kelompok masyarakat. Jika suatu kelompok memberikan bobot tinggi pada nilai-nilai kompetisi, pencapaian, dan kejujuran, maka kelompok masyarakat tersebut cenderung jauh lebih cepat berkembang dan maju dibandingkan pada kelompok masyarakat yang selalu menghindari kejujuran, kompetisi dan pencapaian.⁹⁸

⁹⁶ Parncis Fukuyama, *op., cit.*, h. 172

⁹⁷ Peter Beilharz, *op., cit.*, h. 229-230

⁹⁸ Yusuf Qordowi., *op.,cit.*, h. 57-58

Uraian tentang modal sosial di atas, menunjukkan bahwa modal sosial baik dalam konsep Islam maupun konsep umum memiliki ciri-ciri sebagaimana pendapat Harpham dalam Suryanto yang dikutip oleh Aprillia Theresia dkk, yakni: (1) jejaring sosial (*social networks*) yang bersifat sukarela; (2) partisipasi kewargaan dan penggunaan jejaring sipil; (3) identitas kewargaan lokal, rasa memiliki, solidaritas, kesetaraan sesama anggota kelompok; (4) prinsip timbal balik dan nilai kooperasi, sikap saling tolong-menolong dan percaya diri, dan; (5) kepercayaan dalam komunitas.⁹⁹ Yang sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, Jim Ipe menjelaskan bahwa, fakta menunjukkan, system pasar ekonomi murni yang diterapkan masyarakat Barat menggantikan solidaritas masyarakat dan sosial oleh capaian individual, mengerosi modal sosial yang ada, sehingga perlu membalikkan kecenderungan tersebut untuk mencegah erosi modal sosial dengan biaya moneter yang tinggi.¹⁰⁰ Juga, pembangunan dengan pendekatan *top-down*, yang menempatkan pemerintah pusat atau elit masyarakat sebagai pencetus gagasan, dengan asumsi mereka tau yang terbaik bagi masyarakatnya, tanpa harus mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat bawah, sehingga membelenggu kesempatan masyarakat sipil untuk berinisiatif sejak perencanaan sampai pada pengawasan dan evaluasi.¹⁰¹ Untuk itu, upaya mengembalikan modal sosial dalam proses pembangunan dengan cara merubah paradigma atau pendekatan dari *top down* kepada *buttan-up* yang lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) merupakan keniscayaan.

⁹⁹ Aprillia Theresia dkk., *op. cit.*, h.38

¹⁰⁰ Jim Ipe dan Frank Tesoriero, *Community Development: Community Based Alternatives in on Age of Glabalisation*, Alih Bahasa oleh Sastrawan Manullang dkk., *Pengembangan Masyarakat Allternatif Pengembangan Masyarakat di Era Glabalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 35

¹⁰¹ Aprillia Theresia dkk., *op. cit.*, h. 29

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Modal Sosial

Beberapa pendapat yang berasumsi bahwa variabel modal sosial merupakan sumber modal yang mampu memperkuat ikatan kerjasama dalam dimensi saling mempercayai, kekuatan jaringan sosial, dan norma-norma yang mengikat dan melekat pada kelompok/entitas masyarakat melalui saluran agama dan budaya. Tidak berarti, modal sosial yang telah terinstitusionalisasikan tersebut tanpa faktor-faktor yang menghambat keutuhan modal sosial sebagai sumber modal, sehingga modal sosial mengalami kemerosotan yang berakibat pada terhambatnya variabel lainnya yang dipengaruhi. Faktro-faktor penghambat keutuhan modal tersebut adalah:

Pertama, faktor yang menghambat dan mengakibatkan kemerosotan modal sosial adalah media elektronik. Berbagai program stasiun Televisi yang menyuguhkan tontonan yang menarik sebahagian orang pada minat dan hobi yang sama dan membentuk suatu komunitas atau asosiasi baru yang lebih luas. Menurut Putnam dalam John Field, modal sosial di Amerika mengalami kemerosotan jangka panjang disebabkan oleh munculnya televisi. Dalam hal ini, liga boling menjadi metafora dari ragam aktivitas asosianal yang menyatukan orang-orang yang relatif asing secara rutin dan sering, membantu membangun dan memelihara jaringan yang lebih luas.¹⁰² Televisi mengakibatkan individu-individu meninggalkan kebiasaan bersama pada lingkungannya, bahkan meumbuhkan sikap malas.

Kedua, modal sosial yang selalu diikaitkan dengan kekerabatan (ikatan vertikal). Menurut Putnam dalam John Field, kekerabatan kalah penting sebagai sumber solidaritas bila dibandingkan dengan kenalan dan keanggotaan bersama

¹⁰² John Field, Modal Sosial, *op. cit.*, h.51

asosiasi sekunder. Ikatan vertical bias jadi kalah membantu bila dibandingkan dengan ikatan horizontal, karena bias jadi melemahkan kapasitas bagi tindakan kolektif dan cenderung menciptakan kecurigaan.¹⁰³

Ketiga, akibat tekanan waktu dan uang yang menyebabkan pergerakan urban dan peningkatan yang besar sebagai pemicu.¹⁰⁴ Tidak seimbang antara lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk mengakibatkan banyak orang tidak memanfaatkan waktu hanya untuk duduk-duduk dan berbincang tanpa makna sehingga ikatan mereka cenderung terfragmentasi. *Keempat*, perubahan generasi.¹⁰⁵



2. Pemberdayaan Masyarakat Islam

1. Memahami Konsep Pemberdayaan Masyarakat Islam

Pemberdayaan dalam leksikal Arab disebut *tamkîn* atau memperkuat posisi, yakni memberikan posisi yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki.¹⁰⁶ Sedangkan pemberdayaan dalam terminologi manajemen berarti *authority* untuk memutuskan atau memerintah orang lain dan *power* untuk mengusahakan atau mencegah sesuatu terjadi.¹⁰⁷ *tamkîn* adalah memperkuat posisi masyarakat dalam sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok

¹⁰³ *Ibid.*, h. 53

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 57

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 57

¹⁰⁶ Mukhlis Aliyudin, Pengembangan Masyarakat Islam dalam Sistem Dakwah Islamiyah, pada Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 4 No. 14 Juli-Desember 2009, <https://media.neliti.com/media/publications/69829-ID-pengembangan-masyarakat-islam-dalam-sist.pdf>, diakses, 17 Oktober 2019

¹⁰⁷ Bambang Rudito dkk., (ed), *Akses Peran Serta Masyarakat : Lebih Jauh Memahami Community Development*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 133

lemah dan miskin. Sebagai tujuan, pemberdayaan kegiatan yang merujuk pada hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi dan pendidikan maupun kemampuan lainnya.¹⁰⁸ Dengan demikian, hakekat pemberdayaan adalah kekuasaan dan secara substansial, proses memutus (*breakdown*) antara subyek dan obyek, mementingkan pengakuan oleh subyek terhadap kemampuan obyek. Karena, tujuan akhir proses pemberdayaan adalah menjadikan obyek menjadi subyek.¹⁰⁹

Pemberdayaan masyarakat (*tamkîn al-mujtama'*) adalah upaya melakukan perubahan terhadap realitas masyarakat yang masuk dalam indikasi keterbelakangan akibat rendahnya partisipasi dan pengelolaan lembaga-lembaga masyarakat lokal. Narayan memaknai pemberdayaan sebagai “*empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives.*”¹¹⁰ (Pemberdayaan adalah perluasan aset dan kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam bernegosiasi dengan cara mempengaruhi, mengendalikan, dan bertanggung jawab terhadap lembaga-lembaga yang mempengaruhi hidup mereka). Tanpa membedakan keragaman latar belakang pandangan (teologis), suku, dan ras.

Sementara itu, Islam adalah agama perubahan yakni agama yang menuntun umatnya untuk selalu menata diri dengan memperkuat keyakinan (akidah), kepribadian (akhlak), dan aksi (amal) sebagai landasan ibadah kepada Allah SWT, sehingga terjadi perubahan dalam pola pikir dan amal, baik sebagai individu

¹⁰⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Redika Aditama, 2010), h. 60

¹⁰⁹ Muhammad Ali Aziz dkk., (ed), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, (Surabaya: Pustaka Pesantren, tt), h. 169

¹¹⁰ Narayan, *Empowerment and Poverty Reduction*, (Washington DC: The Word Bank, 2002), h. xviii

maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Murtadha Muthahhari, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial untuk menjalankan misi ilahiyah. Sedangkan, agama diturunkan untuk membentuk manusia berakhlak untuk menjadi hamba yang sempurna.¹¹¹

Dalam perspektif dakwah, istilah perubahan juga dikenal dengan istilah pengembangan (*Tadwir*) atau pemberdayaan (*tamkîn*). Apabila istilah *tamkîn*, *al-mujtama'*, dan *al-islâmîyah* dijadikan satu istilah, maka akan menjadi *tamkîn al-mujtama'ât al-islâmîyah* (pemberdayaan masyarakat Islam).

Pemberdayaan masyarakat Islam menjadi *urgent* dalam rangka mensosialisasikan ajaran Islam kepada masyarakat, baik individu maupun komunitas untuk mempertinggi derajat kesalehan perilaku individu dan kelompok, sehingga mereka mampu memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Secara umum, bentuk aktivitas yang diharapkan adalah aksi sosial dengan kegiatan mengorganisasikan potensi sumber daya manusia, sumber daya *amwal*, dan nilai-nilai normatif agama sebagai dasar dan nilai-nilai budaya sebagai bahan pertimbangan.¹¹² Sehingga, terjadi perubahan secara kualitatif terhadap “struktur masyarakat”.¹¹³ Sehingga, masyarakat (*ummah*) akan mendapatkan berkah dari langit dan bumi karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. (QS. al-A'raf (7): 96)

¹¹¹ Murtadha Muthahhari, *Manusia dan Agama*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), h. 65.

¹¹² Aep Kusnawan, *op. cit.*, 211

¹¹³ Struktur sosial bukanlah suatu susunan kekuasaan yang berlapis ke atas, bukan pula suatu susunan orang-orang yang martabatnya kian rendah, dan bukan pula sebatang pohon taksonomik, tetapi sebuah relasi yang secara ringkas dapat disebut “pencakupan kutub-kutub yang bertentangan. Peter Beilharz, *Social Theory: A Guide to Central Thinkers*: Terj. Oleh Sigit Jatmiko dengan Judul Teori-Teori Sosial: *Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet., ke. III, h. 91. Atau, sesuatu yang terdiri atas bagian yang saling bergantung dan membentuk suatu pola tertentu. Bagian ini terdiri atas pola perilaku individu/kelompok, institusi, dan masyarakat. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1990)

Al-Qur'an bukan sebagai alternatif, tetapi sebagai pendorong, pemandu, demi berperannya manusia secara positif dalam berbagai bidang kehidupan.¹¹⁴ Al-Qur'an mendorong dan memandu umat muslim untuk melakukan perubahan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai komunitas, yakni dalam surat Ar-Ro'd ayat 11:

لَهُۥ مُعَقِّبَتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍۭ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍۭ سُوءًاۭ فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِنۢ وَّالٍۭ ﴿١١﴾



Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-R’du (13):11)

Perubahan akan terjadi apabila ada ikhtiar atau usaha dari orang-orang (komunitas) yang berusaha untuk berubah, mempertinggi mutu diri dan mutu amal, melepaskan diri dari perbudakan selain Allah. Berusaha mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan lebih maju, dan kesadaran akan adanya takdir yang telah ditetapkan Allah.¹¹⁵ Menurut Quraishy Shihab, beberapa hal yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan landasan pemberdayaan masyarakat dalam surat Ar Ro’d

¹¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 245-246

¹¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Juz XIII-XIV*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), h. 71-72

ayat 11, yakni berkaitan dengan pelaku (*da'i*), sasaran (*mad'u*), metode (*thoriqoh*), pendekatan, tujuan, dan tahapan pemberdayaan masyarakat.¹¹⁶

a. Subyek (Pelaku) Pemberdayaan Masyarakat Islam

Pelaku pemberdayaan masyarakat dikenal dengan istilah yang beragam. Lippit yang dikutip oleh Totok Mardikanto dkk., subyek pemberdayaan masyarakat disebut dengan istilah “agen perubahan (*change agent*)”. Dan menurut Totok Mardikanto dkk., subyek pemberdayaan disebut *fasilitator* pemberdayaan masyarakat, mereka adalah seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat.¹¹⁷ Juga, dikenal dengan istilah “pekerja masyarakat (*community worker*).¹¹⁸ Sedangkan dalam pandangan Islam, subyek pemberdayaan masyarakat dikenal dengan istilah *da'i*.

Dalam proses perubahan masyarakat, istilah *change agent*, *fasilitator*, dan *community worker*, serta *da'i/al-muysir* merupakan aktor utama dalam proses perubahan. Mereka adalah sumber daya profesional yang diangkat secara resmi oleh pemerintah (PNS) dan dipercaya oleh lembaga-lembaga swasta, serta sumber daya

¹¹⁶ *Pertama*, ayat tersebut berbicara tentang perubahan sosial, bukan perubahan personal. hal tersebut difahami dari kata *koum*. Perubahan tidak dapat dilakukan oleh seseorang secara personal. Tetapi, seseorang dapat menjadi sumber ide-ide, kemudian dimaknai oleh masyarakat. *Kedua*, kata “kaum” bermakna berlaku umum, tanpa membedakan suku, ras, dan agama tertentu. *Ketiga*, pelaku perubahan ada dua, yakni . Allah pelaku perubahan dari sisi luar (lahiriah) masyarakat dan manusia sebagai pelaku perubahan dari sisi dalam (*ma bi anfusihim*). Perubahan yang terjadi atas ikut campur tangan Allah atas banyak h (*ma bi qoumin*), seperti; kekayaan, kemiskinan, kesehatan, penyakit, kemulyaan, dan kehinaan. *Keempat*, perubahan harus dimulai dari sisi *batiniyah*. Karena, *batiniyah* yang melahirkan aktivitas. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Vol. 6*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 231-236

¹¹⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 139

¹¹⁸ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: FEUI, 2002), h. 196

manusia yang berasal dari masyarakat secara sukarela melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilingkungannya.¹¹⁹ Sumber daya manusia sukarela dalam proses perubahan menurut Efendi yang dikutip oleh Soeharto, adalah sumber daya manusia yang tidak hanya diperlakukan dari tinjauan ekonomi, melainkan sumber daya manusia yang diperlakukan dari tinjauan sosial budaya.¹²⁰ Sumber daya manusia dalam tinjauan ekonomi adalah sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan memproduksi. Sedangkan sumber daya manusia dalam tinjauan sosial budaya merupakan pelaku pembangunan dalam kapasitasnya sebagai individu dan anggota masyarakat yang meliputi; kapasitas untuk memproduksi, pemerataan, pemberian kekuatan dan wewenang, kelangsungan untuk berkembang dan kesadaran akan interpendensi. Oleh karena itu, maka yang perlu dipertimbangkan mengenai pelaku pemberdayaan masyarakat adalah dari sisi kuantitas, kualitas, kemampuan aktualisasi diri, dan partisipasi.¹²¹ Mereka orang-orang yang tercerahkan,¹²² yakni orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan tanggung jawab sosial. Karena, subyek pemberdayaan tidak hanya bertanggung jawab memperbaiki komunitas sosial yang hancur kepada perubahan yang ideal, tetapi juga berperan menumbuhkan kesadaran masyarakat lingkungannya.

¹¹⁹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *op., cit.*, h. 139-140

¹²⁰ Soetomo, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 194

¹²¹ *Ibid.*, h. 195

¹²² Orang-orang tercerahkan adalah orang yang sadar akan keadaan kemanusiaan (*human conditional*) di masanya. Dia adalah sang pemandu yang menunjukkan jalan yang benar, mengundang orang lain untuk memulai berbuat, dan membawa orang lain untuk mencapai tujuan. Dia adalah orang yang memberi keyakinan bersama yang dinamis dan membantu mereka mencapai kesadaran diri dan merumuskan cita-cita mereka. Ali Syari'ati, *The Enlightened Thinkers and Islamic Renaissance: Membnagun Masa Depan Islam, Pesan untuk Para Intelektual Muslim*, ter. Oleh Rahmawati Astuti, (Bandung: Mizan, 1988), h. 28-31

Diperlukan subyek pemberdayaan yang mempunyai kekuatan berfikir, wawasan sosial, dan metode yang tepat untuk mendesain perubahan.¹²³

Kualifikasi kapasitas tersebut dipersyaratkan bagi pelaku pemberdayaan agar mempermudah dalam melaksanakan perannya. Menurut Mardikanto, sebagaimana dikutip oleh Aprellia Thereisa, peran fasilitator pemberdayaan masyarakat yang disebutnya sebagai *edfikasi*, yaitu:

- 1) Sebagai pendidik (*educator*), yaitu berperan mendidik masyarakat sebagai upaya mengembangkan secara bersama-sama penerima manfaatnya, dan terus memahami tentang pentingnya *belajar selama hayat dikandung badan*.
- 2) *Peran diseminasi inovasi*, yaitu peran menyebarkan luaskan informasi/inovasi dari “luar” kepada masyarakat penerima manfaatnya.
- 3) *Peran fasilitasi*, yaitu memberikan kemudahan dan atau menunjukkan sumber-sumber kemudahan yang diperlukan oleh penerima manfaat dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain.
- 4) *Peran konsultasi*, yaitu sebagai penasihat atau pemberi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaatnya dan pemangku kepentingan yang lain.
- 5) *Peran advokasi*, yaitu memberikan peran bantuan kaitannya dengan rumusan/pengambilan keputusan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan.
- 6) *Melaksanakan tugas* sebagai supervisor pelaksanaan advokasi dan Pengembangan masyarakat yang dikehendaki dan atau dijalankan masyarakat.

¹²³ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial*, (Yogyakarta: Media Prenadamedia Group, 2010), h. 100

- 7) *Melaksanakan monitoring dan evaluasi* dengan aktivitas pengamatan, pengukuran, dan penilaian terhadap proses dan hasil-hasil pemberdayaan masyarakat.¹²⁴

Peran fasilitator tersebut di atas tidak cukup, menurut Rogers dikutip oleh Aprelia Theresia, beberapa faktor yang sangat menentukan keberhasilan seorang fasilitator, yaitu:¹²⁵

- 1) Kemampuan dan kemauan fasilitator untuk menjalin hubungan antara tokoh masyarakat, pemuka adat, LSM baik secara langsung maupun tak langsung (melalui) dengan masyarakat.
- 2) Kemampuan dan kemauan fasilitator sebagai penghubung antara lembaga penelitian/keilmuan, tokoh masyarakat sebagai sumber-sumber inovasi dengan berbagai pihak. terutama pemerintah/lembaga pemberdayaan masyarakat dan masyarakat.
- 3) Kemampuan dan kemauan fasilitator meyakinkan berbagai pihak bahwa inovasi yang diprogramkan masyarakat memiliki nilai strategis bagi kepentingan masyarakat.
- 4) Kemauan dan kemampuan penyuluh atau fasilitator untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukam dengan kebutuhan-kebutuhan yang dapat dirasakan oleh pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat dan masyarakat penerima manfaatnya.

¹²⁴ Aprelia Theresia, S.Andini, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*,(Jakarta : Alfabeta, 2014) , Cetakan I

¹²⁵ *Ibid.*,

b. Obyek (Sasaran) Pemberdayaan Masyarakat Islam

Dalam perspektif dakwah, obyek pemberdayaan masyarakat Islam menurut Muhammad Abduh dibagi tiga golongan, yakni : (1) Golongan yang cinta kebenaran, berfikir kritis, dan tanggap. Golongan ini disebut golongan cendik cendikiawan; (2) Golongan kebanyakan, tidak dapat berfikir kritis dan mendalam dan sulit memahami persoalan. Golongan ini disebut golongan awam; (3) Golongan selain dari 2 golongan diatas, senang berdiskusi tentang sesuatu pada batas-batas tertentu dan sangat dangkal.¹²⁶ Ditinjau dari derajat pemikirannya, obyek pemberdayaan masyarakat Islam digolongkan pada 3 (tiga) golongan yaitu: (1) Masyarakat berfikir kritis, yaitu orang-orang tidak menerima ssesuatu apa danya sebelum berfikir mendalam terlebih dahulu; (2) Masyarakat yang mudah dipengaruhi , yaitu masyarakat yang mudah menerima sesuatu faham tanpa berfikir secara mendalam; (3) Masyarakat taklid, yaitu golongan masyarakat fanatik, buta, berpegang pada tradisi dan kebiasaan tanpa mencari kebenarannya.¹²⁷ Sedangkan menurut Clifford Geerts, obyek pemberdayaan masyarakat ditinjau dari sosial kultur masyarakat jawa adalah golongan priyayi, abangan, dan santri.¹²⁸

Struktur masyarakat Jawa oleh Clifford Geerts, merupakan gambaran masyarakat berdasarkan keberagamaan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya.¹²⁹ Secara umum, kaum santri yang oleh M.C. Ricklefs disebut kaum putihan memiliki kelas ekonomi yang lebih mapan, mereka gemar berdagang, hidup di perkotaan, lebih kritis, perhatian dengan pendidikan, disiplin, dan agamis. Sedangkan kaum

¹²⁶ M. Natsir, *Figud Dakwah*, (Jakarta: Dewan Islamiyah Indonesia, t.th), h. 162

¹²⁷ Hamzah Yaqub, *Publisistik Islam dan Teknik Dakwah*, (Jakarta: Diponegoro, 1998), h. 33

¹²⁸ Clifford Geerts, *The Religion of Java*, (:New York :The Free Press, 1960). h. 6

¹²⁹ M.C. Ricklefs, *Mengislamkan Jawa (sejarah Islamisasi di Jawa dan penentangannya dari 1930 terj. Islamisasi and Its Opponents*, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2013), hal.51

abangan cenderung bekerja sebagai petani, kurang perhatian terhadap pendidikan, agama kejawaan, tetapi kuat dalam hal solidaritas dengan kalangan yang sefahaman.

Pemahaman tentang struktur masyarakat Jawa di atas, bukan sebuah fakta yang baku, karena menurut Prof. Dr. Bambang Pranowo, masyarakat desa santri dan abangan tidak bisa dijustifikasi sebagai kelompok yang berbeda dan berlawanan. Masyarakat desa adalah masyarakat yang majemuk dan memahami agama sebagai sesuatu yang dinamis.¹³⁰

Sementara itu, obyek pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri spesifik akibat dari interaksi sekelompok orang dengan lingkungan alam dalam rangka penyesuaian diri dan pemanfaatan lingkungan, atau individu bagian dari komunitas.¹³¹ Ciri-ciri spesifik masyarakat akibat berinteraksi dengan lingkungan alam, diantaranya; masyarakat pesisir, masyarakat pegunungan, masyarakat gurun pasir dan sebagainya.¹³²

c. Metode Pemberdayaan Masyarakat Islam

Beragamnya karakteristik masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan, mulai dari lingkungan alam (letak geografis), latar belakang pengetahuan dan pengalaman hingga perbedaan suku, agama, dan budaya membutuhkan metode yang tepat dalam mewujudkan perubahan pada masyarakat. Metode bukanlah satu-satunya faktor dalam mencapai suatu perubahan, tetapi metode menentukan isi dan cara menyajikan

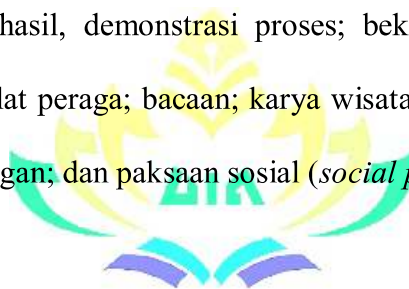
¹³⁰ Bambang Pranowo, *Memahami Islam Jawa*, (Jakarta Timur : Pustaka Alvabert, 2011), hal. 7

¹³¹ Ciri-ciri spesifik masyarakat akibat berinteraksi dengan lingkungan alam, diantaranya; masyarakat pesisir, masyarakat pegunungan, masyarakat gurun pasir dan sebagainya. Aep Kusnawan, *Ilmu Dakwah (Kajian Berbagai Aspek)*, (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 213

¹³² *Ibid.*,

pesan.¹³³ Metode merupakan alat bagi tenaga pemberdayaan masyarakat (*change agent*) dalam berinteraksi dengan masyarakat sebagai penerima manfaat, agar masyarakat menjadi tertarik dan mempunyai pengalaman-pengalaman dalam memecahkan masalah melalui usaha mereka sendiri dengan menggunakan petunjuk dan sumber-sumber teknis yang tersedia.¹³⁴

Dengan meminjam teori tentang metode pembangunan masyarakat desa, A. Surjadi membagi beberapa metode pembanguna, yakni; kontak langsung (*direct contact*); demonstrasi hasil, demonstrasi proses; bekerja dengan para pemimpin desa; aksi kelompok; alat peraga; bacaan; karya wisata; kesenian; specimen-model-pameran; pusat penerangan; dan paksaan sosial (*social pressure*).¹³⁵



1) Kontak Langsung (***Direct Contact***)

Metode yang paling sering digunakan oleh Nabiullah S.A.W dalam upaya melakukan perubahan dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat berakidah ilallah, berakhlak Islami, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan adalah metode *direct contact* atau berhubungan langsung antara *chang agent* dengan masyarakat sebagai subyek dan atau obyek pemberdayaan, baik secara individual (*fardiyah/mikro*) maupun secara kelompok (*'ammah/makro*). Metode *direct contact* dengan menggunakan pendekatan *fardiyah* ini sangat efektif untuk membina dan membentuk kader-kader pemberdayaan masa depan sebagaimana yang telah

¹³³ Slamet Muhaemin Abda, *PrinsipPrinsip Metodologi Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlasa, 1994), cet.ke-1, h. 79

¹³⁴ A. Surjadi, *Dakwah Islam dengan Pembangunan Masyarakat Desa (Peranan Pesantren dalam Pembangunan)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), cet.ke-4, h 86-137

¹³⁵ *Ibid.*,

dilakukan oleh Rosulullah SAW.¹³⁶ Pendekatan *fardiyah* bertujuan untuk mengenal masyarakat secara lebih dekat. *Chang agent* mempunyai kewajiban menyertai masyarakat dan membina persaudaraan karena Allah, sehingga dapat membentuk ketaatan dan komitmen untuk membangun dirinya dan masyarakat disekelilingnya berdasarkan konsep Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan dipergunakan metode *direct contact*, yaitu; (1) menemukan pemimpin yang dipercayai masyarakat; (2) menjelaskan program Dakwah PMI yang ditetapkan pemerintah; (3) menemukan minat masyarakat, dan (4) belajar dari masyarakat tentang apa yang menjadi masalah-masalahnya dan bagaimana motivasi dan kemampuan mereka untuk mengatasinya.¹³⁷

Metode *direct contact* juga dapat menggunakan pendekatan *'ammah*. pendekatan *'ammah* adalah menjalin hubungan dengan masyarakat umum atau kelompok-kelompok tertentu guna memilih beberapa orang dari mereka untuk membina hubungan yang lebih erat, sehingga *chang agent* da'i mengetahui kebaikan dan komitmennya terhadap program pemberdayaan yang Islami. Metode *direct contact* akan lebih efektif apabila dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut: (1) menyenangkan dalam diskusi dan bergaul. Tunjukkan melalui tingkah laku bahwa *chang agent* memahami dan menyukai masyarakat serta kehadiran mereka bertujuan membantu permasalahan mereka; (2) pandai-pandai menjadi pendengar yang baik; (3) yakin akan fakta-fakta yang diperoleh; (4) yakinkan kepada mereka, mereka mempunyai kemampuan dan kreatifitas membuat ide-ide baru; (5) pergunakanlah bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat; (6) percakapan atau diskusi yang mengundang kontradiktif harus dihindari; (7)

¹³⁶ Husin bin Muhammad bin Ali Jabir, *Ath-thariq Ila jama'ah Muslimin*; terj oleh Aunurrafif Sheh Tahmid dengan judul "Menuju Jama'atul Muslimin", (Jakarta: Robbani Press, 1996), cet.ke-1, h. 146

¹³⁷ A. Surjadi, *Op. Cit.*, h. 87

tumbuhkanlah pada masyarakat sikap persahabatan dan keinginan selalu untuk bertemu, bercakap dan berdiskusi.¹³⁸

2) Demonstrasi Hasil

Biasanya para petani mengolah lahan pertanian sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang telah dilakukan keluarga dan nenek moyang mereka. Demikian juga dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat, masyarakat melakukannya sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh para pendahulu mereka. Dengan kata lain, masyarakat desa mempunyai kecenderungan untuk meniru, dan sikap yang demikian itu sangat sulit dipengaruhi dan dirubah.

Oleh karena itu, tugas dan peran *chang agent* adalah berupaya merubah cara berfikir dan bekerja masyarakat dari pola-pola tradisional kepada pola kerja yang lebih modern dan berhasil guna. Disatu sisi mereka harus menghormati dan menghargai cara-cara berfikir dan bekerja yang seakan-akan telah mendarah daging dalam masyarakat. Disisi lain, *chang agent* harus memperkenalkan cara-cara baru yang lebih menguntungkan sekaligus menarik perhatian masyarakat agar mereka merubah cara-cara tradisional kepada pola baru yang lebih menguntungkan.

Sebagai contoh, pada tahun 1980-an, betapa sulitnya masyarakat menerima program pemerintah tentang peningkatan hasil pertanian dengan menggunakan pupuk anorganik. Hanya satu atau dua orang saja dalam satu desa yang mau menggunakan pupuk anorganik dalam pengolahan lahan pertanian, namun setelah keberhasilan beberapa petani tersebut dapat dilihat secara langsung, maka tidak satupun masyarakat desa yang tidak menggunakan pupuk anorganik. Sebaliknya,

¹³⁸ Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), cet.ke1, h 99

betapa sulitnya merubah masyarakat yang telah terlanjur menggunakan pupuk anorganik dan sangat membahayakan kembali dengan menggunakan pola lama, yakni menggunakan pupuk organik. Hal ini dapat digambarkan bahwa, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) binaan YLPMD Metro Lampung, yang semula berjumlah 15 s.d. 25 orang setiap KSM berkurang menjadi 10 s.d 15 orang saja setelah melihat cara kerja yang seakan-akan lebih rumit. Tetapi, setelah terbukti bahwa hasil panen dengan menggunakan pupuk organik sama dengan menggunakan pupuk anorganik bahkan harga jual mencapai dua kali lipat, maka kelompok yang semula berkurang kembali utuh bahkan cenderung bertambah dan diikuti oleh petani-petani yang lain.¹³⁹

Dari dua contoh di atas, dapat dimaklumi bahwa masyarakat yang berfikir dan bekerja dengan pola tradisional dapat dirubah dengan cara menunjukkan cara-cara atau model-model baru yang keberhasilannya dapat dilihat secara langsung. Menurut Surjadi,¹⁴⁰ dalam merencanakan dan mengorganisir demonstrasi hasil, seyogyanya subyek perubahan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut; (1) menjelaskan bahwa cara baru yang akan didemonstrasikan itu adalah sesuatu yang oleh sebagian besar masyarakat dapat dipraktekkan dan keberhasilannya dapat dibuktikan; (2) pastikan bahwa diantara masalah yang dihadapi oleh masyarakat dapat dipecahkan dengan demonstrasi yang akan atau sedang dilaksanakan; (3) menjelaskan dan membimbing masyarakat tentang langkah-langkah bagi keberhasilan demonstrasi; (4) perlihatkan dalam demonstrasi, bahwa orang yang tertarik atau yang dianggap pemimpin sebagai pelaksananya; (5) orang-orang yang

¹³⁹ Fariza Makmun, Tesis dengan Judul “*Fungsi Yayasan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (YLPMD)*”, Lampung: PPs IAIN Raden Intan, 2007), h. 95

¹⁴⁰A. Surjadi, *Op. Cit.*, h. 91

tertarik tersebut didorong untuk mengikuti demonstrasi; (6) demonstrasi dilakukan secara berulang.

3) Demonstrasi metode (proses)

Demonstrasi metode (proses) adalah mengembangkan atau memberdayakan masyarakat dengan metode mengembangkan cara-cara yang ada dalam masyarakat atau mengajari mereka dengan cara-cara baru.¹⁴¹ Beberapa hal yang perlu dilakukan ketika pelaku pemberdayaan dengan menggunakan metode demonstrasi proses ditengah-tengah masyarakat; (1) demonstrasi proses akan efektif apabila masyarakat melihat, mendengar, mengerti, dan mengerjakannya; (2) mempraktekkan bagaimana mengerjakannya; (3) usahakan agar masyarakat mampu mengikuti setiap langkah yang demonstrasikan; (4) ada waktu dan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya; (5) *chang agent* harus memiliki keterampilan dalam mendemonstrasikan jenis kegiatan apapun sesuai dengan program.

4) Bekerja dengan Pemimpin-pemimpin Desa

Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kelebihan dalam kecerdasan, bersosialisasi dan berinteraksi, berpandangan jauh kedepan, sabar, tekun, mampu berkomunikasi dengan baik.¹⁴² dengan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin masyarakat, diharapkan akan mampu mengorganisir individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat dalam suatu kerangka kerja yang lebih teratur dan terorganisir walaupun pemimpin-pemimpin tersebut bersifat formil atau tidak secara resmi ditunjuk oleh pemerintah. Frans Wiryanto Jomo, membagi

¹⁴¹ Nanih Machendrawaty dan Imam Safei, *Op. Cit.*, h. 101

¹⁴² Arifin, *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), cet.ke-2, h 92-93

pemimpin menjadi tiga, yaitu; pemimpin solidaritas, pemimpin resmi, dan pemimpin konsultatif.¹⁴³ *Chang agent* mempunyai kewajiban untuk bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin masyarakat. mereka berperan memberdayakan kelebihan dan kemampuan pemimpin masyarakat untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan dirinya.

5) Aksi Kelompok

Pemberdayaan masyarakat desa berarti membangkitkan keinginan, mengembangkan kemampuan, dan membangun kepercayaan agar masyarakat berpartisipasi secara aktif dan terorganisir dalam proses pemberdayaan. Karena, menurut Frans Wiryanto Jomo, aktivitas yang tidak terorganisir dan menghindari kerja sama sesuai dengan pola-pola yang lebih modern, tidak akan mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi. Sementara itu, inti dari kerja sama adalah kelompok kerja.¹⁴⁴ Dengan kelompok kerja, berbagai ide, gagasan, dan kreatifitas akan tumbuh dan berkembang dari dan untuk anggota melalui kegiatan diskusi.

Oleh karena itu, Wiryanto Jomo menegaskan, bahwa kelompok kerja harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: (1) kelompok kerja harus nonpolitis dan terbuka bagi semua golongan, serta harus menghindari sikap

¹⁴³ Pemimpi solidaritas adalah pemimpin kelompok-kelompok masyarakat yang tidak ditunjuk secara resmi baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Boleh jadi mereka dianggap pemimpin karena kemampuan mereka dalam mengorganisir berbagai kelompok yang ada pada masyarakat. Pemimpin resmi adalah pemimpin-pemimpin masyarakat yang ditunjuk secara resmi oleh masyarakat atau oleh pemerintah, misalnya, kepada desa, lurah, dan sekretaris desa. Sedangkan yang dimaksud dengan pemimpin konsultatif adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan dalam h-h tertentu, sehingga mereka dijadikan masyarakat untuk berkonsultasi dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Frans Wiryanto Jomo, *Membangun Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1986), cet. ke-2, h 111-112

¹⁴⁴ Kelompok kerja sering disebut kelompok proyek, kelompok pelayanan masyarakat, usaha bersama yang metodis. *Ibid.*, h. 33

diskriminasi; (2) kelompok kerja terdiri dari 5-12 anggota, dan paling baik 6-8 anggota, sehingga partisipasi dalam kelompok kecil akan lebih intensif dan hubungan antar anggota akan lebih erat; (3) kelompok kerja terdiri dari para sukarelawan yang aktif; (4) kelompok kerja bertemu secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; (5) kelompok bekerja dalam satu bidang kegiatan tertentu, dan; (6) kelompok kerja merupakan inti dari satu bidang kegiatan. Berarti, kelompok kerja bukan hanya untuk anggotanya saja, melainkan untuk orang-orang yang ada disekelilingnya.¹⁴⁵

6) Menggunakan Media Dakwah Dakwah PMI .

Salah satu unsur yang membantu menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah penggunaan media dalam proses pemberdayaan. Media bias berfungsi sebagai alat peraga dalam proses sosialisasi, media informasi, dan media edukasi. Misalnya, pemanfaatan alat Peraga (*Visual Aids*), Fotografi, poster, papan tulis, dan slides dalam mempermudah menjelaskan materi pemberdayaan, serta pemanfaatan bulletin, majalah dan sebagainya untuk membuka wawasan masyarakat tentang proses dan metode pengembangan usaha.

Penggunaan media dalam proses pemberdayaan masyarakat telah dipraktekkan oleh kelompok-kelompok usaha yang ada ditengah-tengah masyarakat. Misalnya, dalam penelitian tesis Fariza Makmun dijelaskan, bahwa Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (YLPMD) Metro Lampung telah berhasil membina Kelompok Usaha Masyarakat (KSM) petani dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian melalui program pengolahan lahan dengan pupuk organik dan menggunakan media baik media cetak maupun media alat. Media cetak

yang digunakan, seperti majalah, buletin, koran yang khusus membahas tentang petani organik. Sedangkan media alat yang digunakan adalah papan tulis, pengeras suara, alat peraga dan lain sebagainya.¹⁴⁶

7) Karyawisata (*tours*)

Karya wisata adalah salah satu metode yang cukup efektif dalam mengembangkan wawasan dan membuka cakrawala pemikiran masyarakat. Dengan karyawisata, masyarakat akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga tentang model dan teknik pengembangan usaha sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Mereka akan mengkomparasikan kemajuan usaha yang mereka kelola dengan usaha individu atau kelompok yang lebih maju. Allah SWT menegaskan dalam firmanNya:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

Artinya: Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada(QS. *Al-Hadj*: 46).

Sejalan dengan terjemahan ayat di atas, Surjadi menjelaskan, tujuan metode karyawisata adalah untuk mengamati proses dan hasil kerja orang lain, mempelajari cara kerja teknologi atau alat-alat baru, mempelajari usaha-usaha pemberdayaan di

¹⁴⁶ Fariza Makmun, *op., cit.*, 95

tempat-tempat lain.¹⁴⁷ Sehingga, motivasi untuk maju semakin meningkat dan visi kemandirian akan tercapai.

8) Paksaan Sosial

Paksaan sosial (*social pressure*) adalah suatu cara yang didesain dengan menciptakan suatu situasi yang menjadikan orang lain melakukan sesuatu dengan terpaksa sesuai dengan keinginan desainer (*chang agent*). Menurut Nanih dan Imam Safei, bentuk-bentuk metode paksaan sosial adalah dengan menggugunakkan peraturan, pengawasan, dan perlombaan.

Selain berbagai metode yang dijelaskan dia atas, Totok Mardikanto membagi ragam metode pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 1
Ragam Metode Pemberdayaan Masyarakat¹⁴⁸

No	Kelompok Metode	Ragam metode	Keterangan
1	Tatap muka	Percakapan/dialog, Ajang-sana, Ajang-karya, Pertemuan, Ceramah, Diskusi, FGD, RRA, PRA, PLA, SL, Pelatihan pemeran	Individu Kelompok Masal
2	Percakapan Tak-Langsung	Telepon, TV, Radio, Teleconverence	Individu Kelompok
3	Demonstrasi	Demonsrasi cara, demonstrasi hasil, demonstrasi cara dan hasil	Kelompok
4	Media Masa	Surat kabar, Tabloid, Majalah, Radio, Tape-recorder, TV, VCD, DVD	Media cetak Media lisan Media terproyekts
5	Kampanye	Gabungan dari semua media di atas	

¹⁴⁷ A. Surjadi, *Op. Cit.*, h. 123

¹⁴⁸ Totok Mardikanto dan Purwoko Soebianto, *op., cit.*, h. 198

RRA merupakan penilaian keadaan desa dengan cara cepat, yang dalam praktik kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh “orang luar” dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Meskipun sering dikatakan sebagai teknik penelitian yang “cepat dan kasar/kotor”, tetapi RRA masih lebih baik di banding teknik-teknik kualitatif klasik. Tentang hal ini, Chambers, dalam Totok Mardikanto menyatakan, bahwa di bandingkan dengan teknik yang lain RRA merupakan teknik penilaian yang relatif “terbuka, cepat, dan bersih”(*fairly-quickly-clean*) dibanding teknik yang “cepat dan kotor” (*quickly and dirty*) berupa sekadar kunjungan yang dilakukan secara singkat oleh seorang ahli dari kota.¹⁴⁹

Sebagai suatu teknik penilaian, RRA menggabungkan beberapa teknik yang terdiri dari :

- a. *Review*/telaahan data sekunder, termasuk peta wilayah dan pengamatan lapangan secara singkat.
- b. Observasi/pengamatan lapangan secara langsung.
- c. Wawancara dengan informasi kunci dan loka karya.
- d. Pemetaan dan pembuatan diagram grafik.
- e. Studi kasus, sejarah lokal dan biografi.
- f. Kecenderungan-kecenderungan.
- g. Pembuatan koesioner yang singkat.
- h. Pembuatan laporan lapangan secara singkat.¹⁵⁰

Untuk itu tedapat beberapa prinsip yang harus di perhatikan yaitu :

¹⁴⁹*Ibid.*, h. 199

¹⁵⁰*Ibid.*, h. 199-200

- 1) Efektifitas dan efesiensi, kaitanya dengan biaya, waktu, serta perolehan informasi yang dapat di gunakan bukan sekedar jumlah tetepi ketepatan serta relevansi informasi yang di butuhkan.
- 2) Hindari bias, melalui intropeksi , mendengar, menyakan serta berulang-ulang, menanyakan pula kepada kelompok masyarakat bawah.
- 3) Triangulasi sumber informasi, dengan melibatkan tim multidisiplin untuk bertanya dalam berbagai perspektif.
- 4) Belajar dari dan bersama masyarakat.
- 5) Belajar cepat melalui eksplorasi, *cross-check* dengan jangkauan jangan tepaku pada bakuan yang telah di siapkan.¹⁵¹

PRA merupakan metode penilaian keadaan secara partisipatif, yang dilakukan pada tahap awal perencanaan kegiatan. Melalui PRA dilakukan kegiatan-kegiatan :

- a. Pemetaan wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian keadaan.
- b. Analisis keadaan yang berupa :
 - 1) Keadaan masalalu, sekarang dan kecenderungan di masa depan.
 - 2) Idetifikasi berbagai perubahan-perubahan dan sumber masalah.
 - 3) Berbagai kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang disebut analisis SWOT sebagai bagian dari proses pemecahan masalah.
- c. Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau dapat di handalkan (dapat di laksanakan, efesien, dan dapat diterima oleh sistem sosialnya).

- d. Penjabaran tentang peran yang di harapkan dari para pihak dan jumlah serta sumber pembiayaan dalam meleksanakan program yang akan di usulkan.
- e. Analisis situasi yang dilakukan dengan merumuskan keadaan dan perubahan-perubahan keadaan, penyebab terjadinya perubahan.¹⁵²

FGD (*Focus Group Discussion*) sebagai suatu metode pengumpulan data, FGD merupan suatu interaksi individu-individu (sekitar 10-30 orang) yang tidak saling mengenal yang oleh seorang pemandu (moderator) diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman dan atau pengalamanya tentang suatu program atau kegiatan yang di ikuti atau dicermatinya. Sebagai suatu metode pengumpulan data, FGD dirancang dengan beberapa tahap yaitu :

- a. Perumusan kejelasan tujuan FGD.
- b. Persiapan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan.
- c. Identifikasi dan pemilihan parisipan.
- d. Persiapan ruang diskusi.
- e. Pelaksanaan diskusi.
- f. Analisis data (hasil diskusi).
- g. Penulisan laporan (hasil analisis).

PLA (*Participatory Learning and Action*) merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar (melalui :ceramah, curah pendapat, diskusi, dll), tentang suatu topik seperti : persemaian, pengolahan lahan, pelindugan hama tanaman, dll. Yang segera setelah itu di ikuti dengn aksi atau kegiatan nyata

¹⁵² Aprillia Theresia, *op., cit.*, h. 230-231

yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Melalui kegiatan PLA, akan di peroleh beragam manfaat berupa :

- a. Segala sesuatu yang tidak mungkin dapat dijawab oleh fasilitator.
- b. Masyarakat akan memperoleh banyak pengetahuan yang berbasis pada pengalaman yang di bentuk dari lingkungan kehidupan mereka yang sangat kompleks.
- c. Masyarakat akan melihat bahwa masyarakat setempat lebih mampu untuk mengemukakan masalah dan solusi yang tepat di banding orang luar.
- d. Melalui PLA, orang luar dapat memainkan peran penghubung antara masyarakat setempat dengan lembaga lain yang diperlukan. Di samping itu mereka dapat menawarkan keahlian tanpa harus memaksakan kehendak.

SL/FFC (*Farmers field school*/FFC) merupakan kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada waktu tertentu, yang diawali dengan pembahasan masalah yang sering dihadapi, kemudian di ikuti dengan curah pendapat, berbagi pengalaman (*sharing*), yang berisi tentang alternatif dan pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki, sebagai suatu kegiatan belajar bersama. SL/FFC biasanya difasilitasi oleh fasilitator atau narasumber yang berkompeten. Pada masa-masa sekarang ini keberhasilan SL/FFC tidak hanya terbatas pada kegiatan SLPHT (Sekolah Lapangan Pelindungan Hama Terpadu), tetapi di beberapa lokasi telah di kembangkan untuk kegiatan-kegiatan lain, termasuk pengembangan kelembagaan usaha tani ke arah terbentuknya badan usaha milik masyarakat (BUMM).

Pelatihan partisipatif. Pelatihan partisipatif dirancang sebagai implementasi metode pendidikan orang dewasa (POD), dengan ciri utama sebagai berikut :

- a. Hubungan instruktur/fasilitator dengan peserta didik tidak lagi bersifat fertikal tetapi bersifat leteral/horizontal.
- b. Lebih mengutamakan proses dari pada hasil, dalam arti keberhasilan pelatihan tidak diukur dari seberapa banyak seberapa banyak terjadi ahli pengetahuan, tetapi seberapa jauh terjadi interaksi atau diskusi dan berbagai pengalaman (*sharing*) antara sesama peserta maupun antara fasilitator dengan peserta.

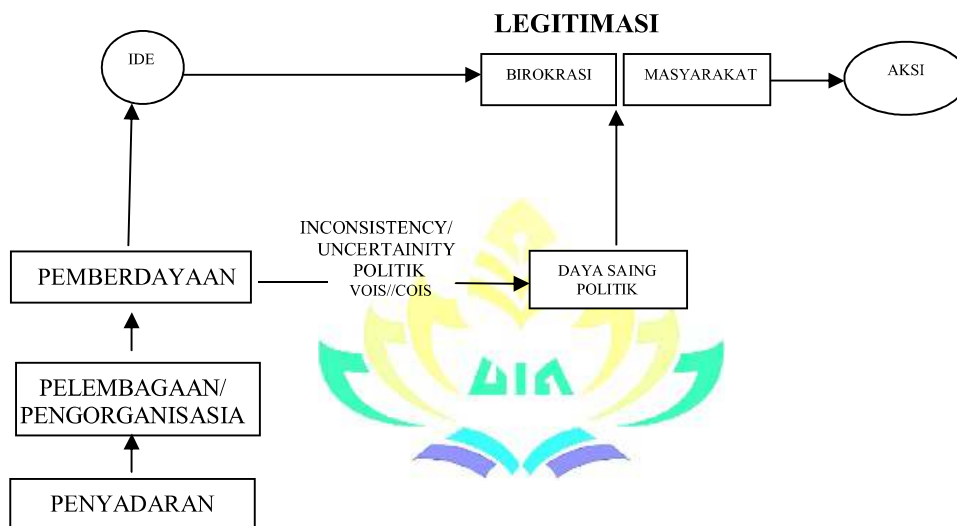
2. Tahapan (Proses) Pemberdayaan Masyarakat Islam

Totok Mardikanto menjelaskan, pemberdayaan dalam praktek tidak cukup hanya terfokus pada hasil dalam upaya perbaikan pendapatan (*income generating*), tetapi lebih kepada proses. Proses dalam mendorong kemauan dan keberanian, meningkatkan kemampuan, memberikan kesempatan bagi upaya-upaya masyarakat secara *partisipatif* dan *mandiri* demi perbaikan kesejahteraan (ekonomi, sosial, fisik, dan mental) secara berkelanjutan (*sustainable*).¹⁵³ Disatu pihak, masyarakat yang selama ini selalu dimarginalkan dan dijadikan obyek atau kendaraan oleh pihak penguasa, swasta, dan partai politik perlu penyadaran tentang potensi/kemampuan (SDM, SDA, dan Sumber daya sosial) yang mereka miliki. Selanjutnya, kesadaran akan potensi tersebut dilembagakan atau dikelompokkan sesuai dengan bidang kegiatannya, sehingga lembaga atau kelompok tersebut siap diberdayakan dan atau memberdayakan. Pada pihak lain, sering terjadi ketidakkonsistenan dan ketidakpastian kebijakan oleh jajaran birokrasi maupun tokoh-tokoh masyarakat, perlu adanya legitimaasi ide perubahan menjadi aksi oleh pihak-pihak tersebut dan advokasi hukum/kebijakan termasuk pendidikan politik yang cukup untuk

¹⁵³ Totok Mardikanto, *op., cit.*, h. 119-120

meningkatkan daya tawar politik bagi masyarakat. Pendapat Totok Mardikanto tersebut, dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 1
Proses/ Tahapan Pemberdayaan Masyarakat



Gambar: Proses/Tahapan Pemberdayaan Masyarakat oleh Totok Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat, h. 120

Pendapat Totok Mardikanto di atas dapat dijelaskan, bahwa pemberdayaan masyarakat dibagi dalam beberapa tahap, yakni: Pertama, tahap penyadaran. Pada tahap ini Islam tidak hanya mengingatkan manusia bahwa Allah telah menyediakan alam dan seisinya adalah untuk kepentingan umat manusia, tetapi juga menumbuhkan semangat kesadaran agar setiap manusia memiliki semangat (*etos*), diantaranya etos kerja, *setelah menunaikan sholat Maka carilah karunia Allah di muka bumi dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung* (QS. Al Jumu'ah (62): 10). Dan etos pantang menyerah, karena dibalik kegagalan/kesulitan pasti keberhasilan/kemudahan (QS. Al Insyirah (94): 5-7).

Kedua, tahap pengorganisasian masyarakat. Organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur hubungan kerja antara sekelompok orang-orang

pemegang posisi bekerja secara bersama-sama dalam mencapai tujuan tertentu.¹⁵⁴

Sedangkan, pengorganisasian masyarakat menurut Ross Murray, yang dikutip oleh Agus Efendi adalah suatu proses dimana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mereka, menentukan prioritas atas kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan mengembangkan keyakinan serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan skala prioritas, baik berdasarkan potensi sumber daya yang ada dalam masyarakat maupun yang berasal dari luar yang dilakukan secara gotong royong.¹⁵⁵ Salah satu ciri pemberdayaan masyarakat adalah kerja kolektif (komunitas). Oleh karena itu, kesadaran akan potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya nilai perlu dilembagakan untuk mempermudah proses pencapaian tujuan. Islam mengajarkan, bahwa kerja yang efektif adalah kerja yang dilakukan dengan cara sistimatis dan terorganisir dengan baik (QS. Ali Imran (3): 104) sehingga proses perubahan (*amal ma'ruf nahi mungkar*) dapat terwujud. Menurut Narayan, ada empat elemen kunci yang mendasari reformasi kelembagaan dalam pemberdayaan, yakni: (1) Akses informasi dua arah yang mengalir dari pemerintah untuk warga dan dari warga untuk pemerintah; (2) Inklusi / partisipasi; (3) Akuntabilitas; (4) Kapasitas organisasi lokal.¹⁵⁶ Sinerginya keempat elemen tersebut, maka pemberdayaan akan dirasakan

¹⁵⁴ Prajudi Atmosudirojo, *Dasar-Dasar Administrasi Managemen dengan Office Management*, (Jakarta, 1976), h. 5

¹⁵⁵ Agus Afandi, *Metodologi Participatory Action Research*, (Sidoarjo: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2013), h. 92

¹⁵⁶ Empat elemen penting dalam pemberdayaan kelembagaan, yakni: (1) Akses informasi dua arah yang mengalir dari pemerintah untuk warga dan dari warga untuk pemerintah. Teknologi informasi dan komunikasi sering memainkan peran penting dalam memperluas akses informasi. Masyarakat yang bertanggung jawab dan responsif akan mengambil kesempatan terhadap layanan akses atas hak-hak mereka dan negara tidak memperbolehkan aktor swasta yang tidak akuntabel; (2) Inklusi / partisipasi. Sebuah pendekatan pemberdayaan memperlakukan partisipasi orang miskin sebagai pengatur, dengan otoritas dan kontrol atas keputusan dan sumber daya. Pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dalam membangun pengetahuan publik, prioritas lokal, dan membawa komitmen untuk berubah. Serta diperlukan untuk untuk perubahan aturan dan proses

hasilnya. Sedangkan menurut John Lofland dalam Syarifuddin Jurdi, organisasi gerakan sosial memiliki enam aspek penting, yakni: kepercayaan, organisasi gerakan sosial, gerakan sosial yang lahir dari tradisi yang mempunyai kepercayaan dan doktrin, keikutsertaan, strategi, dan efek (pengaruh).¹⁵⁷

Ketiga, tahap proses pemberdayaan. Menurut Totok Mardikanto, tahapan pemberdayaan terdiri dari tujuh tahapan, sebagai berikut : (1) penetapan dan pengenalan wilayah; (2) sosialisasi kegiatan pemberdayaan; (3) penyadaran masyarakat, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan: (a) bersama-sama masyarakat melakukan analisis atau kajian potensi dan permasalahan; (b) analisis alternative pemecahan masalah; (c) menunjukkan pentingnya perubahan, termasuk merumuskan prioritas perubahan; (4) pengorganisasian masyarakat; **(5)** pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari: (a) melakukan pelatihan untuk menambah dan atau memperbaiki pengetahuan teknis, keterampilan manajerial, dan perubahan sikap; (b) pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan perlindungan, pelestarian sumberdaya alam dan pengembangan efektivitas kelembagaan; (6) advokasi kebijakan, dan; (7) politisasi, secara terus menerus memelihara dan meningkatkan posisi tawar melalui kegiatan politik praktis guna memperoleh legitimasi dan keberlanjutan kebijakan.¹⁵⁸

Menurut Amrullah Ahmad dalam Nanish, tahapan pengembangan/pemberdayaan masyarakat dalam Islam ada 3 (tiga) tahap, yakni

untuk menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan penetapan prioritas dan anggaran daerah dan nasional, dan mengakses pelayanan dasar dan keuangan; (3) Akuntabilitas. pejabat negara, pegawai negeri, penyedia swasta, pengusaha, dan politisi harus dimintai pertanggungjawaban dalam membuat kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi kesejahteraan warga; (4) Kapasitas organisasi lokal. Ini mengacu pada kemampuan orang untuk bekerja sama, mengatur diri mereka, dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah yang menjadi kepentingan bersama. Narayan, *op. cit.*, h. 19-20

¹⁵⁷ Syarifuddin Juhdi, *op. cit.*, h. 134-138

¹⁵⁸ *Ibid.*, h. 127-129

tahap pembentukan (*takwin*), penataan/pengorganisasian (*tandhim*), dan tahap kemandirian (*taudi'*).¹⁵⁹

Disamping itu, proses pemberdayaan masyarakat memerlukan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, sehingga proses pemberdayaan tidak bertentangan dengan situasi, keadaan, dan keinginan masyarakat.

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Islam

Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai kritik terhadap konsep pembangunan dengan pendekatan *top down* sebagai telah diuraikan pada bab pendahuluan adalah sebagai berikut: Pertama, proses pemusatan kekuasaan terbentuk dari pemusatan kekuasaan terhadap faktor produksi; Kedua, faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; Ketiga, kekuasaan akan membentuk bangunan atas dasar sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi (pengakuan); Keempat, implementasi sistem pengetahuan, politik, hukum, dan ideologi secara sistematis akan menciptakan kelompok-kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.

Kerangka logik yang detail dan sistimatis sebagai visi perubahan masyarakat dalam menggapai tingkat kesejahteraan dalam masyarakat seringkali berubah menjadi visi individu sebahagian orang atau komunitas orang tertentu yang mempunyai kekuasaan secara politis.

¹⁵⁹ *Takwin* adalah tahap pembentukan, tahap yang paling penting dalam upaya penyadaran umat dengan menanamkan akidah, ibadah, ukhuwah, dan ta'awun. *Tandhim* adalah tahap pengorganisasian dengan membentuk lembaga (membangun masjid, memperkuat basis kaum muslimin melalui lembaga ukhuwah Islamiyah, dan memperkuat kehidupan politik antara pemerintah (fasilitator) dengan masyarakat sebagai obyek pemberdayaan. *Taudi'* adalah tahap memandirikan (pembebasan) umat dari belenggu kemiskinan dan penindasan atas nama etnis, politik, dan agama. Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam, *op. cit.*, h. 32-35

Menurut Mansour Fakih, permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena, pertama, adanya perbedaan antara akademisi dengan praktisi pemberdayaan dalam memahami teori-teori dan cara pandang tentang pemberdayaan. Para akademisi mempunyai kesempatan dan kebebasan menggali dan merumuskan konsep pemberdayaan masyarakat melalui literatur, diskusi, dan penelitian tetapi lemah dalam implementasi. Sedangkan, organisasi Sosial Kemasyarakatan (LSM) dan para pelaku pemberdayaan atau fasilitator sangat intens dalam kegiatan pemberdayaan, tetapi kurang berpijak pada konsep dan teori karena terbatas dalam memahami konsep dan teori. Kedua, perbedaan di atas, melahirkan perbedaan akademisi yang bersifat obyektif dengan tujuan praktisi yang serba praktis dalam pencapaian tujuan.

Kedua faktor tersebut dapat berimplikasi pada desain pemberdayaan masyarakat Islam. Praktisi cenderung menjadikan masyarakat sebagai obyek semata dan mengabaikan prinsip-prinsip pemberdayaan. Mulai dari proses perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengevaluasian hasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat (*top down*). Dengan demikian, para ilmuwan dan praktisi pembangunan nasional masih jauh dari kata berhasil dalam memandirikan masyarakat sebagai tujuan akhir memberdayakan masyarakat. Karena, pemahaman mengenai strategi, pendekatan, dan orientasi pembangunan dan atau pemberdayaan belum sesuai dengan prosedur teoritis dan atau sesuai dengan prosedur teori tetapi tidak berdasarkan realitas yang ada pada masyarakat.

Menurut Soedijanto yang dikutip Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat adalah sukarela, otonom (tidak ketergantungan), keswadayaan, partisipasi, egaliter (kesetaraan), demokrasi,

keterbukaan, kebersamaan, akuntabilitas, dan desentralisasi.¹⁶⁰ Totok Mardikanto, mengidentifikasi prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, diantaranya; berorientasi pada membangun kemampuan dan keahlian (*cavacity*), menumbuhkan peran serta masyarakat (*particivation*), berkelanjutan (*sustainabelity*). Sedangkan menurut Jim If, prinsip-prinsip pemberdayaan, meliputi: (1) holism, analisis masalah dan program yang bersifat multi dimensi; (2) berkelanjutan (*sustainabilitas*); (3) keanekaragaman atau menghargai dan mengakomodir keanekaragaman potensi yang ada pada masyarakat; (4) perkembangan organik, menghormati dan menghargai sifat-sifat khusus masyarakat dan memungkinkan serta mendorongnya untuk berkembang sesuai dengan caranya yang unik; (5) perkembangan yang seimbang antara dimensi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan; (6) keadilan sosial dan hak azazi manusia yang berhubungan dengan struktur yang merugikan, seperti; (golongan gender, dan ras/etnis); (7) mengatasi wacana-wacana yang merugikan, seperti; kemiskinan dan kejahatan sebagai akibat dari kekurangan atau patologi, permasalahan sosial sebagai akibat dari system sosial yang tidak adil; (8) mengutamakan partisipasi masyarakat' (9) mendefinikakan kebutuhan masyarakat; (10) menghargai pengetahuan lokal; (11) menghargai budaya lokal; (12) menghargai sumber daya lokal; (13) menghargai keterampilan lokal; (14) menghargai proses lokal; (15) proses, hasil, dan visi; (16) integrasi proses; (17) menumbuhkan kesadaran; (18) kerjasama dan consensus; (19) membutuhkan waktu yang lama; (20) perdamaian dan anti kekerasan (tidak memaksakan kehendak); (21) membangun kesadaran kelompok, saling memperkuat, dan saling ketergantungan.¹⁶¹

¹⁶⁰ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto *op., cit.*, 108-1-9

¹⁶¹ Jim If dan Frank Tesoriero (terj), *op., cit.*, 495- 545

Karena tidak semua prinsi-prinsip pemberdayaan masyarakat akan dikaji dan beberapa prinsip dapat digolong menjadi satu, maka hanya beberapa prinsip pemberdayaan yang akan menjadi fokus kajian ini. Menurut Goulet yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi, untuk memberikan kesempatan hidup secara utuh sebagai tujuan dari pembangunan berpusat pada manusia mengarah pada pembangunan nilai-nilai dasar, seperti partisipasi (*participation*), kesinambungan (*Suntainability*), integrasi social (*social integration*), dan kemerdekaan asasi manusia (*human rights and fundamental freedoms*).¹⁶²

1. *People of Centered* (Berpusat Pada Masyarakat)

Pembangunan yang menggunakan pendekatan *top down*, berorientasi pada hasil dan mengabaikan peran serta masyarakat, berimplikasi pada keterbelakangan dalam bidang ekonomi ditandai dengan tingginya angka kemiskinan, dalam bidang pendidikan yang ditandai dengan tingginya penduduk berpendidikan rendah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Sehingga, masyarakat bersifat pasif dalam gagasan dan aksi, rendah dalam pengetahuan dan pengalaman serta tidak ada upaya untuk menguatkannya. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat atau pembangunan berpusat pada manusia lebih mengedepankan pendekatan *buuam up* dan berorientasi pada proses. Moeljarto Tjokrowinoto dalam Totok Mardikanto menjelaskan, bahwa ciri-ciri pembangunan berpusat pada manusia sebagai berikut: Pertama, pemrakarsa dalam pengambilan keputusan menjadi kewajiban masyarakat. Kedua, pembangunan berorientasi pada upaya peningkatan kapasitas (kemampuan) masyarakat untuk memberdayakan dan mobilisasi sumber daya lokal. Ketiga, orientasi pembangunan pada proses *social*

¹⁶² Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, ((Jakarta: LPFE UI, 2002) h.155-156

education yang melibatkan borokrat dan kelompok masyarakat secara kolaboratif.¹⁶³ Atau, masyarakat menjadi aktor dan penentu dalam pembangunan berpusat pada masyarakat atau *empowerment*.

Untuk menjadikan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan, maka pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman serta posisi tawar (penguatan kapasitas) masyarakat dalam program pembangunan harus diperkuat, sehingga masyarakat menjadi lebih mandiri. Kreativitas yang inovatif dalam menetapkan program pemberdayaan harus didukung oleh kapasitas (pengalaman, pengetahuan, dan ketrampilan). Eltizoni dalam Polama:

*“pengetahuan harus dipraktekkan, pengetahuan dilaksanakan melalui proses pengambilan keputusan, terutama melalui komitmen-komitmen masyarakat yang abstrak dan samar yang arahnya ditentukan oleh nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang dianut oleh pelaku, diterjemahkan kedalam komitmen-komitmen spesifik pada rangkaian tindakan yang lebih spesifik”.*¹⁶⁴

Proses penetapan program sebagai langkah dalam menentukan masa depan sendiri dan orang lain bukan pekerjaan yang mudah, tetapi pekerjaan yang rumit dan tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang secara individu yang kurang dalam kemampuan dan kesadaran. Oleh karena itu, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan harus didahului dengan penguatan kapasitas dalam hal kesadaran. Masyarakat yang memiliki kesadaran akan potensi diri dan potensi lingkungan akan lebih kreatif dan aktif dibandingkan masyarakat yang kurang menyadari potensi diri dan lingkungannya.¹⁶⁵ Menurut Eltizon, proposisi-proposisi kesadaran adalah: Pertama, kesadaran akan menjadi motivasi dalam bertindak apabila bagian (elemen-elemen) lain dari orientasi lebih tinggi dibanding dengan tingkat kreativitas

¹⁶³ *Ibid.*, h. 18

¹⁶⁴ Margaret M. Polama, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2003), h. 361

¹⁶⁵ *Ibid.*, h. 360

kemasyarakatan. Kedua, Kesadaran yang seimbang dengan tingkat komitmen. Apabila tingkat kreativitas lebih tinggi dari tingkat komitmen, maka akan membentuk masyarakat yang tidak peduli. Ketiga, apabila tingkat kreativitas lebih tinggi dari pengetahuan maka akan melemahkan motivasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Aprelia Theresia berpendapat, penguatan kapasitas melalui proses pemberdayaan dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, yakni pengembangan kemampuan sumber daya manusia, pengembangan kemampuan usaha, pengembangan kemampuan tentang lingkungan, dan penguatan kemampuan kelembagaan.¹⁶⁶ Masing-masing kemampuan fokus pada penguatan pengalaman, penguatan pengetahuan, dan penguatan skill.

Pengembangan kemampuan sumber daya manusia berorientasi pada: (1) pengembangan kemampuan masyarakat dengan pendekatan personal (*personality approach*) yang berorientasi pada kemampuan kepribadian, kemampuan dunia kerja, dan kemampuan profesional; (2), pengembangan pengetahuan lembaga pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada; (a) pengetahuan tentang visi, misi, dan budaya organisasi lembaga pemberdayaan masyarakat; (b) pengetahuan tentang struktur kelembagaan, kompetensi kelembagaan, dan strategi lembaga; (c) memperjelas proses pengelolaan lembaga; (d) interaksi antar individu di dalam lembaga; (5) pengembangan sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas; dan (6) meningkatkan interaksi kelembagaan dengan *stakeholders* yang lain atau entitas diluar sistem.

¹⁶⁶ Aprelia Theresia, *op., cit.*, h. 155-159

Pengembangan kapasitas usaha, yakni proses pengembangan usaha yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. kegiatannya dimulai dari proses penetapan komoditas produksi dan jenis usaha, studi kelayakan, membentuk lembaga (badan usaha), pengelolaan investasi, peningkatan manajemen pengembangan usaha, peningkatan manajemen sistem informasi, dan peningkatan jaringan kerjasama kemitraan (*needwork*).

Pengembangan kapasitas lingkungan, yakni proses pemberdayaan lingkungan baik fisik maupun sosial sebagai aset lokal yang wajib dilestarikan dan dikembangkan keberadaannya. Dengan demikian, pengetahuan masyarakat tentang lingkungan sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan yang bersifat *sustainable* tidak bisa ditawar lagi. Sehingga, ketegangan sosial, ketersinggungan, bahkan *social conflict* sebagai akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dari kegiatan ekonomi, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan industri akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, polusi udara dan polusi air, yang menjadi pemicu terjadinya *social problems* tidak menjadi permasalahan yang berulang.

2. *Sustainability* (Berkelanjutan)

Secara kuantitas program pembangunan yang diinsiasi oleh pemerintah, akademisi, dan praktisi terus bertambah, tetapi jumlah masyarakat yang menikmati hasil pembanguana dalam jangka yang panjang kurang signifikan. *Tricle down effect* sebagai sebuah konsep belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena mengabaikan peran serta (partisipasi) masyarakat dan hanya dinikmati oleh orang-orang atau kelompok orang. Sehingga, proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi hanya bersifat sementara, subyektif, dan pesanan. Oleh karena itu, salah satu prinsip yang dikonsepsikan dalam teori pemberdayaan masyarakat adalah prinsip Keistimewaan prinsip *Sustainability* (keberlanjutan).

Prinsip *Sustainability* diharapkan mampu menciptakan struktur organisasi, usaha, dan industri yang berkembang dan bertahan dalam berbagai situasi dan tantangan. Prinsip keberlanjutan diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang kuat, berkeadilan (seimbang), dan damai. Masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang tidak ketergantungan pada pihak lain,¹⁶⁷ seimbang dan damai/harmonis karena dilakukan secara kolektif tetapi sesuai dengan tugas dan fungsinya. aktivitas pembangunan yang *sustainability* dan partisipatif memungkinkan bagi masyarakat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan seluas-luasnya.¹⁶⁸

Brundtland Commission yang dikutip oleh Suetomo berpendapat, prinsip *sustainability* dalam pembangunan merupakan aktivitas pembangunan sebagai upaya mencukupi kebutuhan dalam jangka pendek, tanpa mengganggu kebutuhan jangka panjang bagi generasi mendatang.¹⁶⁹ Prinsip *sustainability*, meliputi bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bidang lingkungan, terdiri dari 4 (empat) hal, yakni *sustainability* lingkungan alam, *sustainability* sumber daya alam, dan daya dukung alam, serta *sustainability* pelayanan alam. Pembangunan yang berkelanjutan dalam terminologi ekonomi, adalah pembangunan yang tidak pernah punah.¹⁷⁰

3. *Participation* (Partisipasi)

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, baik yang dalam hal *knowlage*, *skills*, dan *exprience*. Kemampuan teoritik dan praktik, sangat penting bagi aktor pembangunan. Dengan kapasitas *knowlage*, *skill*, dan *experience* menjadi modal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program

¹⁶⁷ Suetomo, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 354

¹⁶⁸ *Ibid.*, h. 355

¹⁶⁹ Zubaiedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 187

¹⁷⁰ *Ibid.*, h. 148

pemberdayaan masyarakat. Tjokroamidjodjo dikutip Supriyadi dalam Satria Mentari Tumbel, partisipasi penting bagi pembangunan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri.¹⁷¹

Hal tersebut sejalan dengan menggunakan pemberdayaan sebagai pendekatan atau model pembangunan oleh pemerintah. Mulyasa dalam Karna Sobahi mengemukakan bahwa, banyak *government policy* (kebijakan pemerintah) di era otonomi daerah yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat tingkat akar rumput (*grass-root*), yang dijadikan tolak ukur dalam menilai implementasi *government policy level* adalah peran serta masyarakat, baik secara personal maupun komunitas dalam berbagai program pemberdayaan.¹⁷² Menurut Adam yang dikutip oleh Karna Sobahi, keterlibatan seseorang dalam situasi secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan merupakan bentuk motivasi, tanggungjawab, dan sumbangan dalam usaha mencapai kesejahteraan hidup.¹⁷³ Dengan demikian, pengembangan kapasitas (*development capacity*) pada masyarakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan yang bersifat teknis dan fisik, tetapi juga mencakup pengembangan karakter.

Cohen dan Uphoff dalam Satria Mentari Tumbel, membagi partisipasi kedalam beberapa tahapan, sebagai berikut: (1) Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat, terutama keikutsertaan pada tahap perencanaan program. (2) Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, karena inti dari pembangunan

¹⁷¹ Satria Mentari Tumbel, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, Politico Jurnal Ilmu Politik PDF, <https://www.neliti.com/publications/161029/>, diakses, pada Tanggal 30 Januari 2019

¹⁷² Karna Sobahi dan Cucu Suhana, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, (Bandung: CV. Cakra, 2011), h. 118

¹⁷³ *Ibid.*, h. 116

adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dalam partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program. (3) Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran. (4) Tahap Evaluasi, dimana masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam memberikan penilaian sebagai bentuk umpan balik yang dapat dijadikan masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.¹⁷⁴

partisipasi masyarakat berdasarkan sifatnya, dikelompokkan menjadi dua, yakni *quantitative participation* dan *qualitative participation*. *Quantitative participation* adalah keikutsertaan masyarakat dalam implementasi program. *Qualitative participation*, yakni keikutsertaan masyarakat berdasarkan tingkat dan derajat partisipasi. Sedangkan menurut Thoha, partisipasi bersifat mandiri, mobilisasi, dan seremoni.¹⁷⁵ Partisipasi mobilisasi dan seremoni adalah partisipasi yang sengaja diciptakan dan menjadi ciri khas pendekatan *top down*. Sedangkan, partisipasi mandiri menjadi ciri khas pemberdayaan.

Partisipasi adalah aktifitas, menurut Eltizoni yang dikutip oleh Margaret M. Polama mengemukakan, orientasi aktif dibagi dalam tiga hal, yakni: kesadaran personal, pengetahuan dan komitmen para pelaku pada satu atau lebih tujuan yang harus dicapai, serta fasilitasi kekuasaan untuk mengubah tatanan sosial.¹⁷⁶ Kesadaran, pengetahuan, dan kekuasaan para pelaku pemberdayaan diyakini akan

¹⁷⁴ Satria Mentari Tumbel, *op., cit.*, h. 4

¹⁷⁵ *Ibid.*, h. 119

¹⁷⁶ Margaret M. Polama, *op., cit.*, h. 355

mampu melakukan perubahan yang transformatif pada masyarakat. Perubahan dalam pengertian penjelajahan seseorang atau kelompok masyarakat dalam memahami dirinya, sehingga mereka mampu merealisasikan nilai-nilai yang lebih baik. Apabila seseorang atau kelompok masyarakat sebagai aktor pemberdayaan masyarakat tidak mampu melakukan transformasi diri dan tidak mampu mengukur kemampuan-kemampuannya, maka dengan sendirinya masyarakat akan hancur.¹⁷⁷

Partisipasi merupakan hak yang harus diterima sekaligus tuntutan atas keikutsertaannya. Hak masyarakat dalam memilih dan hak dalam tanggung jawab untuk berpartisipasi.¹⁷⁸ Misalnya, keikutsertaan masyarakat dalam mengajukan pendapat dalam menentukan keputusan akan berhasil apabila masyarakat mendapatkan penjelasan tentang kemungkinan resiko dan konsekuensi dari keputusan yang akan dilakukan. Persyaratan untuk membuat keputusan yang baik harus didasari oleh informasi, pengetahuan, pendidikan, dan kesadaran dalam arti luas.¹⁷⁹ Jim Ife menggunakan istilah *demokrasi representatif* dan *demokrasi partisipatif*.¹⁸⁰

Partisipasi masyarakat dilihat dari lingkupnya, Aprelia Theresia menjelaskan bahwa disebut lingkup partisipasi adalah: (a) Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan; (b) Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; (c) Keikutsertaan masyarakat dalam monitoring dan

¹⁷⁷ *Ibid.*, h. 356

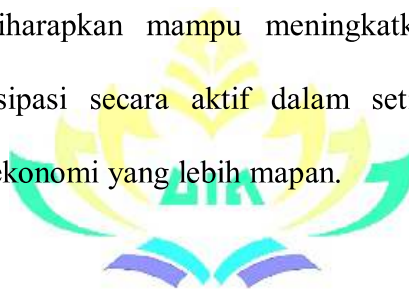
¹⁷⁸ Jim Ife, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, tej. Oleh Sastrawan Manullang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 292

¹⁷⁹ *Ibid.*, h. 291-292

¹⁸⁰ *Demokrasi partisipatif*, masyarakat berpartisipasi langsung dalam membuat keputusan, sedangkan *demokrasi representatif*, masyarakat tidak diberikan kebebasan secara penuh, tetapi diberi pilihan-pilihan dalam menentukan keputusan. *Ibid.*, h. 286-287

evaluasi; (d) Keikutsertaan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan.¹⁸¹ kegiatan-kegiatan pada lingkup partisipasi berupa: (a) Keikutsertaan masyarakat dalam kelompok kerja; (b) Terlibat dalam kegiatan diskusi; (c) Terlibat dalam program-program kelompok; (d) Ikut serta dalam memanfaatkan sumber daya yang ada; (e) ikut serta dalam memanfaatkan hasil-hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat.¹⁸²

Berdasarkan teori tentang tahapan-tahapan dalam proses pemberdayaan, baik tahap penyadaran, pengorganisasian/pelembagaan, dan pemberdayaan maupun prinsip-prinsip pemberdayaan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan atau daya masyarakat dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan, sehingga tercapai tingkat ekonomi yang lebih mapan.



3. Tingkat Ekonomi

1. Pengertian Tingkat Ekonomi

Tingkat dalam struktur sosial kemasyarakatan dikenal dengan istilah pelapisan atau stratifikasi sosial dalam ilmu sosiologi. Sedangkan dalam istilah bahasa Arab disebut *al-mustawa*. Salah satu ukuran yang membentuk pelapisan atau stratifikasi sosial adalah kekayaan atau kepemilikan terhadap sesuatu (ekonomi/*al-a'qtisadi*), status, dan kekuasaan. Sehingga, seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kekayaan atau kepemilikan terhadap sesuatu secara ekonomi, memiliki status yang dihargai, dan kekuasaan secara struktural dikenal dengan istilah tingkat ekonomi (*al-mustawa al-a'qtisadiu*).

¹⁸¹ Aprillia Theresia dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerintah Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 198-199

¹⁸² *Ibid.*, h. 200

Istilah tingkat ekonomi, merupakan bentukan dua kata, yakni kata tingkat dan ekonomi. Oleh karena itu, memahami pengertian ekonomi sebagai dasar pembentukan tingkatan dalam struktur sosial kemasyarakatan menjadi keniscayaan. Ekonomi (*al-a'qtisadiu*) adalah cara-cara produksi, distribusi, mengedarkan, dan penggunaan barang. Juga, berbicara tentang bagaimana mengembangkan cara-cara tersebut agar produksi semakin tumbuh, sirkulasi menjadi mudah, dan distribusi semakin baik, sehingga kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi.¹⁸³ Ekonomi umat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹⁸⁴ Sedangkan ekonomi umat dalam konteks ke-Indonesiaan dapat disepadankan dengan ekonomi kerakyatan, yaitu suatu system ekonomi partisipatif yang memberikan akses yang fair dan adil bagi masyarakat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi tanpa mengabaikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung masyarakat yang berkelanjutan.¹⁸⁵ Dengan kata lain, semakin tinggi produktivitas seseorang atau sekelompok orang semakin tinggi pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai tingkatan, maka semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang di dalam struktur sosial kemasyarakatan.

Islam membagi golongan manusia berdasarkan kebutuhan materi menjadi dua, yakni golongan orang yang *miskîn* atau *faqîr* dan golongan orang-orang kaya (*al-ghina*). Allah SWT menjelaskan istilah *faqîr* atau *miskîn* dalam Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60, dijelaskan:

¹⁸³ Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 3

¹⁸⁴ Abdul Mannan, *Islamic Economic Theory and Practic*, Terj: *Ekonomi Islam Teri dan Praktek*, (Jakarta: Intermedia, 1992), h. 19

¹⁸⁵ Baihaqi Abdul Majid dkk., *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PINBUK, 2000), h. 43

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah (9):60)

Menurut Abi Abdullah al-Qutubi dalam Sahabudin, kata *fuqarâ'*, mufrad dari kata *faqîr*, menunjuk kepada seseorang yang sangat menderita karena tidak memiliki harta benda dan usaha sebagai media mencukupi kebutuhan hidupnya.¹⁸⁶ Harta benda sebagai kebutuhan pokok dan mendesak. Sementara itu, kata *miskîn* yang merupakan *isim masdar* dari *sakana-yaskunu-sukûn/miskîn*, bermakna “dian atau berdiam diri). Secara terminology, istilah *miskîn* bermakna orang yang tidak memiliki harta tetapi namun dengannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, atau karena kefakiran seseorang menjadi diam tidak beraktifitas.¹⁸⁷

Berdasarkan surat at-Taubah di atas, tingkatan (stratifikasi) golongan *miskîn* atau *faqîr* dan golongan orang-orang kaya (*al-ghina*) dalam Islam menggunakan terminology zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta atau pendapatan. Seorang Pegawai yang memiliki pendapatan yang qiyaskan pada kewajiban berzakat dengan besaran 85 gram emas diwajibkan mengeluarkan zakat 2,5%.

¹⁸⁶ Sahabuddin, *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 610.

¹⁸⁷ Majd al-Dîn al-Fayruz Âbadi, *Qâmus al-Muhît* (Beirut: Dar al-Fikr al-Tiba'ah wa al-Nasyr al-Tawzi, 1999), hlm. 1087

Konsep sosiologi tentang terjadinya tingkatan-tingkatan atau stratifikasi sosial dalam masyarakat digunakan sebagai alat ukur dalam penentuan tingkat ekonomi seseorang dalam masyarakat. Stratifikasi sosial (*social stratification*) menurut Pitirim A. Sorokin dalam Soekanto, adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (secara hierarkis). Perwujudan kelas tersebut terjadinya tingkatan kelas tinggi dan kelas lebih rendah. Tingkatan kelas tersebut selalu ada dalam masyarakat, karena tingkatan kelas tersebut muncul berdasarkan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat, misalnya kekuasaan/kedudukan, golongan, pembagian kerja, dan kekayaan.¹⁸⁸ Menurut Weber dalam George Ritzer dan Douglas J. Goodman, stratifikasi berbasis ekonomi, status, dan kekuasaan.¹⁸⁹ Kendati demikian, faktor ekonomi lebih dominan dalam membentuk stratifikasi atau sering disebut kelas. Kelas terkait dengan produksi ekonomi sedangkan status terkait dengan gaya hidup, karena kelas dalam masyarakat akan ada apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni: *pertama*, sejumlah orang memiliki kesamaan komponen kausal spesifik peluang hidup, selama. *Kedua*, komponen ini hanya dipresentasikan oleh kepentingan ekonomi berupa penguasaan terhadap barang atau peluang untuk mendapatkan pendapatan. *Ketiga*, dipresentasikan menurut syarat-syarat komoditas atau pesan tenaga kerja.¹⁹⁰ Penghargaan terhadap struktur kekuasaan/kedudukan, golongan, struktur pembagian kerja, dan kepemilikan terhadap kekayaan menjadikan individu-individu dalam kelompok masyarakat kepada tingkatan-tingkatan tertentu. Oleh karena itu, Devis dan Moor dalam George Ritzer mengatakan, semua individu mempunyai

¹⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 204

¹⁸⁹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Sociological Theory: Terj., Teori Sosiologi*, Nurhadi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), h. 138

¹⁹⁰ *Ibid.*,

tingkatan sosial (*social stratification*), tingkatan sosial sebagai fenomena yang universal dan penting, serta bentuk keharmonisan fungsional.¹⁹¹

Pendapatan dan kepemilikan atas kekayaan seseorang dan atau sekelompok orang dalam masyarakat dan atau kelompok tertentu yang menjadi fokus dalam penelitian disertasi ini dijadikan dasar dalam menentukan tinggi rendahnya status seseorang. Standar atau ukuran tentang tinggi rendahnya pendapatan dan kekayaan seseorang dan atau sekelompok orang dapat diamati dari tingkat pendapatan dan kepemilikan. Menurut Soekanto, ukuran kekayaan seseorang dapat diamati dari bentuk rumah, mobil pribadi, cara dan model berpakaian, serta kualitas barang yang digunakan.¹⁹² Sedangkan menurut Surbakti, “Status ekonomi seseorang dapat diketahui dari pendapatan, pengeluaran, dan pemilikan benda-benda berharga dari orang tersebut”.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengukur pendapatan seseorang atau kelompok, peneliti menggunakan istilah produktivitas. Karena, dalam penelitian disertasi ini tingkat ekonomi merupakan variabel (y) yang dipengaruhi oleh modal sosial sebagai faktor etika sebagai variabel (X1) dan pemberdayaan masyarakat sebagai faktor kinerja sebagai variabel (X2). Hal ini sejalan dengan definisi produktivitas, yakni Pada level *manajerial*, produktivitas didefinisikan sebagai perbandingan antara input (O, misalnya laba kotor) dengan output-nya (I, misalnya upah/gaji). Persatuan waktu (T). Jadi produktivitas kerja (PK) tenaga kerja setiap

¹⁹¹ George Ritzer, *Modern Sociological Theory*: terj., *Teori Sosiologi Modern*, Triwibowo, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 114

¹⁹² Soerjono Soekanto, *op. cit.*, h. 214

hari adalah $PK=0:I$.¹⁹³ Dengan demikian, produktivitas merupakan cerminan kemampuan menghasilkan sesuatu.¹⁹⁴

Produktivitas kerja adalah secara ekonomis jumlah produksi perjam kerja pekerja dan secara teknis, produktivitas juga menunjukkan etika dan sikap kerja suatu lembaga.¹⁹⁵ Dengan demikian salah satu indikator produktivitas adalah prestasi kerja. Menurut Bambang Kusriyanto, yang dikutip oleh Anwar Prabu Mangkunagara, prestasi kerja atau sering disebut kinerja adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu.¹⁹⁶ Sedangkan menurut Anwar Prabu Nagara, prestasi kerja ialah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya persatuan periode waktu.¹⁹⁷

Dalam pandangan Islam, kerja dengan penuh perhitungan dan belajar dari pengalaman merupakan keniscayaan. Karena, perhitungan (bekerja dengan target) dan keberhasilan tidak serta merta datang seketika. Tetapi, melalui usaha dan proses. Allah dalam firman-Nya :

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

¹⁹³ Taliziduhu Ndraha, *Pengantar Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), cet. ke-1, h. 44

¹⁹⁴ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: PT. Gramedia Persada, 2002), cet. ke-..., h. 33

¹⁹⁵ Jeffery Edmund Curry, *Memahami Ekonomi Internasional*, (Jakarta: PPM, 2001), cet. ke-8, h. 113

¹⁹⁶ Anwar Prabu Mangkunagara, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), cet. ke- 1, h. 9

¹⁹⁷ *Ibid.*,

Arinya: “Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al An’am: 96):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Hasyr (59): 18)

Berdasarkan uraian di atas, maka ukuran yang dipakai dalam melihat tingkat ekonomi seseorang atau kelompok dalam penelitian ini adalah produktivitas (kinerja), pengeluaran, pemilikan terhadap benda-benda dalam pemenuhan tingkatan kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Ukuran kelas ekonomi tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan produktivitas, pengeluaran, dan pemilikan terhadap benda-benda dalam pemenuhan kebutuhan dijadikan sumber analisis sebagai pengaruh dari modal sosial dan pemberdayaan masyarakat Islam.

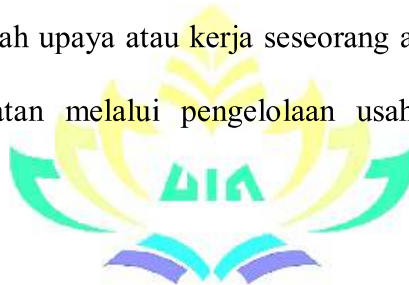
2. Faktor-Faktor Ekonomi Masyarakat

Pada zaman klasik, Adam Smith dalam Suherman Rosyidi menyebutkan, permasalahan ekonomi adalah setiap usaha manusia untuk menaklukkan alam dalam usahanya menghasilkan kekayaan materiil.¹⁹⁸ Sedangkan pada zaman sekarang ini, permasalahan ekonomi adalah alokasi sumber-sumber yang langka

¹⁹⁸ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi : Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 51

diantara sekian banyak kemungkinan penggunaannya yang berbeda-beda, sehingga dicapai kepuasan konsumen secara maksimal.¹⁹⁹ Berbagai usaha atau motif manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dilakukan dengan kerja keras.

Oleh karena itu, dengan merujuk pada permasalahan ekonomi dan ekonomi yang dimaknai sebagai upaya baik secara sekelompok maupun individu untuk memenuhi motif ekonomi, yakni memenuhi kebutuhan hidup melalui kerja keras, halal, dan baik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Maka, fokus kajian dalam disertasi ini adalah upaya atau kerja seseorang atau sekelompok orang untuk meningkatkan pendapatan melalui pengelolaan usaha produksi, distribusi, dan konsumsi.



a) Produksi

Produksi menurut Nancy D, dalam Suherman Rosyidi adalah setiap proses yang menciptakan nilai atau memperbesar nilai sesuatu barang.²⁰⁰ Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, produksi adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam mendapatkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.²⁰¹ Sedangkan kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi menurut Frank dalam Mustafa Edwin Nasution dkk., diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat baik dimasa kini maupun dimasa mendatang.²⁰² Dengan demikian, produksi dapat dimaknai sebagai suatu proses atau cara, alat, dan metode untuk menghasilkan produk yang berbentuk atau bernilai materi dan

¹⁹⁹ *Ibid.*, h. 51

²⁰⁰ *Ibid.*, h. 54

²⁰¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 230

²⁰² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekskulif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 102

immateri yang berguna bagi kehidupan manusia dimasa sekarang dan akan datang. Islam menganjurkan agar orang mukmin berbuat lebih baik dari hari kehari untuk kepentingan masa depan (Al-Hasyr (59):18.

Konsep tentang manfaat produksi di atas, merupakan jalan pembuka bagi manusia untuk berfikir, bahwa sikap proaktif, kreatif, dan inovatif yang berorientasi kedepan dalam hal produksi sangat diperlukan (*future view*) dengan tujuan: *apertama*, barang dan jasa yang dihasilkan hendaknya tidak hanya untuk masa sekarang, tetapi juga bagi kehidupan masa mendatang;. *kedua*, sumber daya ekonomi, baik *natural resources* dan *non natural resources*, hendaknya dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.²⁰³ Dengan demikian, proses produksi diharapkan mampu menciptakan prinsip *pemberdayaan* faktor-faktor produksi secara *sustainable*.

Untuk menciptakan produksi yang tidak hanya bermotif produktivitas dan efisiensi dengan memaksimalkan keuntungan, maka menurut Umer Chapra dalam Mustafa Edwin Nasution, tidak perlu memisahkan antara ekonomi positif (*positive economica*) dan ekonomi normatif (*normative economica*) sebagaimana sistem ekonomi konvensional.²⁰⁴ System ekonomi konvensional mendewakan produktivitas dan efisiensi untuk memaksimalkan keuntungan dan mengabaikan dampak atau kepuasan konsumen. Sementara system ekonomi Islam menggunakan system ekonomi positif dan normatif secara bersamaan, karena produksi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif memaksimalkan keuntungan dunia bagi kehidupan dan kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan memakmurkan alam

²⁰³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *op., cit.*, h. 233-234

²⁰⁴ Mustafa Edwin Nasution, *op., cit.*, h. 103

semesta,²⁰⁵ tetapi juga maksimalisasi keuntungan akherat. Allah berfirman dalam surat al-Qashash ayat 77, yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (al-Qashash (28): 77.

Ayat di atas menggambarkan, bahwa motif Allah SWT dalam menganugerahkan berbagai potensi yang ada di jagat raya ini untuk memberikan kesempatan bagi manusia untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akherat. Cara mencapainya adalah dengan menjaga faktor-faktor produksi yang ada dan memproduksi sesuatu yang bermanfaat bagi sesama.

Untuk itu, maka produksi harus mempertimbangkan berbagai hal, terutama, yaitu: apa, bagaimana, untuk siapa sesuatu itu diproduksi.²⁰⁶ Tiga hal tersebut terkait dengan faktor-faktor ekonomi, yakni Tanah (Sumber Daya Alam), SDM, Sumber Daya Modal, dan kecakapan tata laksana.²⁰⁷

1) Tanah

Tanah adalah segala sesuatu yang bisa menjadi faktor produksi yang berasal dari atau tersedia di alam ini, meliputi: (1) tenaga penumbuh yang ada di dalam tanah, baik untuk pertanian, perikanan, maupun pertambangan; (2) tenaga air, baik

²⁰⁵ Yusuf Qordowi., *op.cit.*, h. 180-190

²⁰⁶ Mustafa Edwin Nasution, *op., cit.*, h. 101

²⁰⁷ Suherman Rosyidi, *op., cit.*, h.55-59

untuk pengairan maupun pelayaran, termasuk air sebagai bahan pokok oleh perusahaan air minum; (3) ikan dan mineral, baik ikan dan mineral darat (sungai dan laut, danau, tambak, dan sebagainya); (4) tanah yang didirikan bangunan; (5) *living stock*, seperti ternak dan binatang-binatang lain yang bukan ternak, dan; (6) lain-lain, seperti bebatuan dan kayu-kayuan.

Sebagai modal dasar kegiatan produksi Allah SWT., menyiapkan bumi beserta isinya bagi kemaslahatan bersama. Allah SWT., berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 22:



الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui (al-Baqarah (2): 22).

2) Tenaga kerja

Dalam ilmu ekonomi yang dimaksud dengan istilah tenaga kerja manusia (labor) bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang, dan segala kegiatan fisik lainnya, akan tetapi lebih luas lagi yaitu *human resources* (sumber daya manusia). Di dalam istilah *human resources* atau SDM, mencakup kemampuan baik fisik maupun mental. Dalam istilah Mustofa Edwin Nasution, tenaga terdidik (terampil) dan tidak terdidik (tidak terampil).²⁰⁸

²⁰⁸ Mustofa Edwin Nasution, *op. cit.*, h. 108

3) Modal

Modal adalah semua jenis barang dan jasa serta uang yang menunjang kegiatan produksi. Modal barang dan jasa dapat berupa mesin, pabrik, jalan raya, listrik, gudang, dan peralatan lainnya. Sedangkan modal uang mencakup, uang yang dipergunakan untuk membeli barang dan jasa.

b) Konsumsi

Tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani dan menciptakan kemandirian umat. Oleh karena itu, hasil produksi harus mampu memenuhi hajat tujuan konsumsi para konsumennya. sistem ekonomi konvensional memandang, bahwa konsumsi merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, harga barang, pendapatan, tanpa mempedulikan dimensi spiritual. Tidak memperdulikan apakah yang dikonsumsi berpengaruh positif atau negatif terhadap masa depan dirinya, orang lain, dan alam semesta ini, lebih-lebih masa depan akherat.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam Mustafa Edwin Nasution, produksi dalam system ekonomi bertujuan untuk memenuhi hajat (kebutuhan) bukanlah keinginan. kebutuhan adalah upaya menjalankan fungsi insaniyah untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dalam mempertahankan kelangsungan hidup.²⁰⁹ Sedangkan keinginan sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan, karena keinginan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, lebih dari itu keinginan juga bertujuan untuk bersenang - senang. Menurut Imam Al-Ghazali, gaya hidup bersenang-senang sulit bagi mukmin untuk mencapai derajat tertinggi di sisi Allah

²⁰⁹ *Ibid.*, h. 69-70

SWT., karena fungsi keinginan, nafsu, harga barang, pendapatan tidak memperdulikan dimensi spiritual.²¹⁰

Konsumsi dalam pemahaman umum, diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia.²¹¹ Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan fisik atau psikis atau material.²¹² Karena, kebutuhan manusia sangat banyak, maka kebutuhan manusia sebagai bagian dari konsumsi dibagi menjadi: pertama, *primary needs*, seperti sandang, pangan, dan papan; kedua, *secondary needs*, seperti sepatu, sepeda, pendidikan, dan sebagainya; ketiga, *tertiary needs*, seperti barang-barang mewah, dan; keempat, *quartary needs*, yakni barang-barang yang mubadzir.²¹³ Sedangkan, konsumsi dalam pandangan Islam lebih mengedepankan pada pemenuhan kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, dan selalu dikaitkan dengan tujuan utama manusia diciptakan. Menurut Imam Al-Ghazali, konsumsi dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah SWT.²¹⁴

Berdasarkan beberapa definisi konsumsi, dapat difahami bahwa barang dan jasa yang dikonsumsi baik yang bersifat *primary needs*, *secondary needs*, *tertiary needs*, *quartary needs* maupun dalam istilah fisik, psikis, dan materiil hendaknya barang dan jasa yang membawa *mashlahah* (manfaat dan berkah). Manfaat dan berkah dalam konteks surat al-Baqarah ayat 172 di atas adalah mengkonsumsi barang dan jasa yang baik-baik atau berkualitas. Berkualitas baik dalam keadaannya

²¹⁰ *Ibid.*, h. 71

²¹¹ Suherman Rosyidi, *op. cit.*, h. 163

²¹² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *op. cit.*, h. 129

²¹³ Suherman Rosyidi, *op. cit.*, h. 50

²¹⁴ *Ibid.*, h. 70

maupun berkualitas halal dalam mendapatkannya (al-Baqarah (2): 168),²¹⁵ dan secara kuantitas janganlah berlebih-lebihan atau berlaku pemborosan/mubadzir (al-Isyrah (17: 27)).²¹⁶ Kita harus ingat, bahwa dalam teori ekonomi ada fungsi sosial.

a) Distribusi Pendapatan

Kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimal yang bersifat pokok, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah salah satu yang mendasar dalam system distribusi - redistribusi kekayaan. Produksi lebih menekankan pada proses menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi sejumlah pengeluaran atau pembelanjaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan, distribusi sebagai unit ekonomi yang menjadi perantara yang menghubungkan antara produsen yang menghasilkan barang atau jasa dengan konsumen yang membutuhkan barang atau jasa. Oleh karena itu, distribusi pendapatan dimaknai sebagai pengedaran hasil produksi kepada pihak lain (konsumen) dengan menggunakan alat tukar hasil produksi atau alat tukar uang.²¹⁷

Dalam sistem ekonomi konvensional, distribusi merupakan proses tukar menukar barang hasil produksi dalam memenuhi kebutuhan biologis tanpa mempertimbangkan unsur moral. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam lebih mengedepankan nilai moral spiritual, memelihara keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi.²¹⁸ Masyarakat (umat) didorong untuk mencapai kebutuhan dasar (minimum), kemudian mencapai standar hidup yang lebih baik, karena keduanya diasumsikan sebagai pembeda antara kekurangan, cukup, dan berkecukupan.

²¹⁵

²¹⁶

²¹⁷ Djazuli dan Yadi Janwari, *op., cit.*, h. 32

²¹⁸ *Ibid.*, h. 120

Masing-masing perbedaan standar hidup tersebut sebagai hak setiap umat yang harus disediakan oleh otoritas individu, sosial, dan negara. Dengan demikian, orientasi dari sistem pendistribusian pendapatan adalah proses distribusi dan bukan *out-put* proses distribusi. tersebut.²¹⁹

Proses distribusi barang dan jasa dalam masyarakat terjadi melalui dua mekanisme, yakni mekanisme distribusi sebagai upaya memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan pasar. Mekanisme distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga, baik yang bersifat kewajiban (*shadaqah wajibah*) maupun yang bersifat tambahan (*shadaqah nafilah/sunnah*).²²⁰

Pertama, instrumen distribusi yang bersifat wajibah dalam konteks rumah tangga adalah: (a) kewajiban tanpa syarat (*nafaqah*), seperti Mendistribusikan kekayaan kepada orang-orang terdekat (anak dan istri) merupakan kewajiban utama, sedangkan mendistribusikan kekayaan kepada orang lain menjadi wajib apabila kebutuhan rumah tangga telah terpenuhi. Juga, menyisihkan sebahagian hak milik yang didistribusikan kepada kelompok tertentu (*zakat*), kurban binatang ternak (*udhiyah*), pembagian aset kepemilikan kepada ahli waris, bantuan bagi yang terkena musibah (*musaadah*), dan lain-lain. (b) Instrumen distribusi yang bersifat sunnah, seperti infak, akikah, wakaf, dan wasiat. (c) instrumen distribusi yang bersifat hukuman (*hudud*), seperti *kafarat* dan *dam*.

Kedua, instrumen distribusi melalui mekanisme pasar. Sistem ekonomi apapun menjadikan pasar sebagai instrumen atau media pertemuan antara produsen

²¹⁹ Mustofa Edwin Nasution, *op. cit.*, h. 131-132

²²⁰ *Shadaqah wajibah* adalah bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban, baik kewajiban personal, seperti warisan maupun kewajiban antar sesama muslim. *Shadaqah sunnah* adalah pengeluaran rumah tangga yang berhubungan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amal karikatif, seperti sodakoh. Mustafa Edwin Nasution, *op. cit.*, h. 135-136

dalam pendistribusian hasil produksi dengan konsumen sebagai pengguna. Menurut Yusuf Qordhowi, sistem ekonomi kapitalis menjadikan pasar sebagai pusat distribusi barang dan jasa yang bersifat liberal (kebebasan mutlak dan semi mutlak) yang menjadikan orang-orang kuat menindas yang lemah. Sistem ekonomi sosialis meniadakan kebebasan pasar, semua serba diatur oleh pemerintah atau organisasi-organisasi tertentu. Sedangkan sistem ekonomi Islam menjadikan pasar sebagai instrumen distribusi barang dan jasa yang bersifat independen, dalam pengertian ada kebebasan tetapi tetap dalam etika bisnis yang benar.²²¹ Misalnya, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak berkecukupan (surplus) diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya, disisi lain merupakan fungsi sosial sebagai insentif untuk pihak yang kekurangan (defisit) agar dapat dikembangkan kepada yang lebih baik.

Sisi lain yang menjadi perhatian dalam sistem produksi, konsumsi, dan distribusi adalah masalah kepuasan. Kepuasan dalam sistem produksi berkenaan dengan sejauhmana hasil produksi dan jasa mampu menghasilkan barang dan jasa secara kuantitas dan kualitas yang bermanfaat untuk kebutuhan hidup di dunia dan akhirat. Dan, kepuasan dalam sistem konsumsi berkenaan dengan pemanfaatan barang dan jasa hasil produksi bagi pemenuhan hajat hidup seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan kepuasan dalam sistem distribusi berkenaan dengan kuantitas dan kualitas sirkulasi barang dan jasa melalui mekanisme pasar.

Kepuasan sebagai implikasi dari kuantitas dan kualitas distribusi atau sirkulasi barang dan jasa, akan dirasakan oleh produsen dan konsumen apabila dilakukan dengan nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral yang merupakan moralitas keimanan dan

²²¹ Yusuf Qordhowi, *op., cit.*, h. 285

cirri khas (karakteristik) yang paling menonjol bagi kaum *mû'min* atau orang-orang beriman adalah .kejujuran dan amanah.²²²

Pertama, kejujuran. kejujuran merupakan puncak moralitas keimanan seorang mukmin. Rusaknya sistem distribusi dalam mekanisme pasar dunia adalah kebohongan monopoli, manipulasi, mencampuradukkan kebenaran dan kebathilan, baik kebohongan dalam menerangkan spesifikasi maupun mengunggulkannya atas yang lainnya dalam hal kualitas, harga, dan besarnya omset.²²³ Dalam kitab shahih Bukhari (1937),²²⁴ Rosul SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya" (H.R. Bukhari).

Kedua, amanat. Sifat amanat (dapat dipercaya) adalah sifat pelengkap sifat kejujuran dan lawan dari sifat khianat. Kejujuran dan amanat merupakan dasar dari sifat saling mempercayai antara produsen, konsumen, dan distributor yang sedang

²²² *Ibid.*, h. 293

²²³ *Ibid.*, h. 293

²²⁴ Lidwa Hadits, diakses, pada 1 Februari 2018

melakukan perjanjian hubungan kerjasama. Perdagangan atas dasar *murabahah* (jual beli), *syirkah* (investasi atas dasar bagi hasil *musyarakah*/perjanjian penyertaan modal, *mudharabah* (perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha).²²⁵

4. Pengaruh Modal Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Islam Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat

Pendekatan pemberdayaan masyarakat, baik dalam proses/tahapan maupun dalam prinsip berhubungan erat dengan konteks sosial dan budaya. Narayan menjelaskan, upaya untuk membangun aset masyarakat dalam hal ini masyarakat miskin dan kemampuan organisasi harus mengambil bentuk yang mencerminkan norma-norma lokal, nilai-nilai, dan perilaku. Tetapi, kadang-kadang harus melawan norma-norma budaya dalam hal diskriminasi bagi kaum perempuan. proses reformasi harus selalu mencoba untuk membangun kekuatan budaya untuk mengatasi hambatan eksklusifitas dan membawa perubahan pro-masyarakat.²²⁶ Ada beberapa kelebihan masyarakat miskin yang terkait dengan modal sosial, diantaranya; orang miskin adalah selalu tinggi dalam "ikatan" hubungan kedekatan sosial dan tingkat kepercayaan yang tinggi dengan orang lain. Ketika organisasi masyarakat miskin membangun jaringan dengan organisasi lain, seperti negara, masyarakat sipil, atau sektor swasta, mereka mampu untuk mengakses sumber daya tambahan dan berpartisipasi lebih lengkap dalam masyarakat.²²⁷

Demikian halnya hubungan modal sosial dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, modal sosial menjadi elemen penting dalam pemberdayaan

²²⁵ *Ibid.*, h. 298

²²⁶ Narayan, Empowerment And Poverty Reduction, *of, cit.*, h. 17

²²⁷ *Ibid.*, h. 16

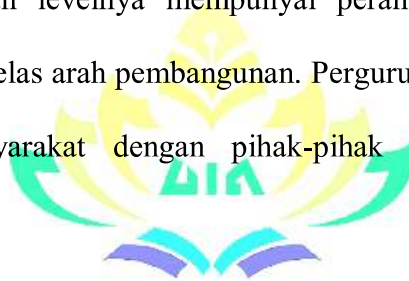
ekonomi masyarakat. Misalnya, kepercayaan bermanfaat dalam menciptakan tatanan ekonomi unggul, karena bisa diandalkan untuk mengurangi biaya. Apabila individu-individu dalam sebuah organisasi bisnis atau kelompok arisan saling mempercayai satu sama dan menggunakan norma-norma etis bersama, maka akan terjadi efisiensi *financial capital*. Menurut Althusser, ekonomi pada dasarnya, tetapi bukan pada prakteknya. Masyarakat dipersatukan bukan karena ekonomi, tetapi oleh ideology atau mufakat.²²⁸ Emile Durkheim, surutnya otoritas keyakinan-keyakinan moral tradisional merupakan indikasi terjadinya perubahan sosial. Pergeseran sosial yang didasarkan pada keyakinan bersama dan control komunal yang ketat (solidaritas mekanis) menuju tatanan yang berdasarkan ketergantungan mutual antara individu yang relatif otonom (solidaritas organis). Solidaritas mekanis adalah ciri masyarakat tradisional yang tergantung pada keseragaman anggota-anggotanya, keseragaman yang diciptakan bagi keyakinan dan nilai-nilai bersama. Solidaritas organis adalah kebersamaan yang didasarkan adanya perbedaan dan pembagian kerja secara spesifik. Tetapi, dia menjadi bagian dari solidaritas mekanis ketika ada saling ketergantungan dalam keberlangsungan hidup. Solidaritas sosial yang dipaksakan akan mengakibatkan konflik sosial dan menghalangi solidaritas.²²⁹

Kepercayaan sosial, termasuk kejujuran, keteladanan kerjasama dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain sangat penting untuk menumbuhkan perilaku terpuji pada setiap individu. Hal itulah yang menjadi argumen sentral dari Weber tentang etika protestan yang menunjukkan bahwa kaum puritan memperoleh kekayaan material sebagai hasil dari kepercayaan religiusnya dan telah mengembangkan perilaku-prilaku, seperti kejujuran dan sikap hemat yang sangat membantu bagi akumulasi modal.

²²⁸ Peter Beilharz, *op., cit.*, h. 4

²²⁹ *Ibid.*, h. 106-108

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat berbasis modal sosial merupakan keniscayaan yang harus digali, dipetakan, dan aplikasikan dalam aktifitas mensejahterakan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Modal sosial sebagai refresentasi budaya masyarakat lokal yang demikian besar tetapi tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai, maka program pemberdayaan tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi sebagai *social worker* mempunyai peran sangat dominan dalam keberhasilan pembangunan. Pemerintah sesuai dengan levelnya mempunyai peran dalam pengadaan regulasi sebagai motivasi dan penjelas arah pembangunan. Perguruan Tinggi dan LSM, menjadi fasilitator antara masyarakat dengan pihak-pihak yang mendukung program pembangunan.



Berdasarkan teori-teori modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat dan pengaruhnya dalam peningkatan ekonomi masyarakat akan terjadi empat variabel yang saling mempengaruhi, diantaranya; (1) pengaruh modal sosial terhadap pemberdayaan masyarakat; (2) pengaruh modal sosial terhadap tingkat ekonomi; (3) pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap tingkat ekonomi, dan (4) pengaruh pemberdayaan masyarakat berbasis modal sosial dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat tergambar pada hasil penelitian sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian Suandi,²³⁰ yang berjudul “Hubungan Modal Sosial dengan kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Daerah Pedesaan Jambi” menghasilkan data bahwa penelitian yang dilakukan di Kecamatan Keliling Danau, dan Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci menunjukkan bahwa modal sosial, terutama kepercayaan diukur melalui tingkat komitmen dan konsistensi seseorang terhadap

²³⁰ Suandi, Hubungan Modal Sosial dengan kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Daerah Pedesaan Jambi, Jurnal Komunitas 6 (1) (2014): 38-46. DOI: 10.15294/komunitas.v6i1.2940 <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>, diakses, pada <https://www.researchgate.net/publication/275489368>, tanggal 29 Oktober 2018

perkataan, perjanjian, dan tindakan pada saat terjalinnya hubungan, baik antar individu maupun kelompok dalam masyarakat dan solidaritas (ketergantungan satu sama lainnya, saling bantu membantu, dan adanya kepekaan terhadap kemajuan desa) responden tergolong kuat. Mengacu kepada alokasi pengeluaran, tingkat ekonomi petani di daerah penelitian tergolong relatif kaya dengan distribusi keluarga yang tergolong pada kelompok sejahtera mencapai 78,8 persen, sedangkan kelompok miskin hanya 21,2 persen. Modal sosial (asosiasi lokal dan karakter masyarakat) baik secara langsung maupun tidak berpengaruh positif sangat nyata terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga.

Sementara itu, menurut Meri Nurami, dalam abstrak penelitian yang berjudul “Peran Modal Sosial pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Usaha Daur Ulang di Desa Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon, Sidoarjo), salah satu langkah agar program pemberdayaan dirasakan setiap elemen masyarakat adalah mengubah strategi perencanaan program pemberdayaan yang sebelumnya melalui *top down planning* menjadi *bottom up planning* yang lebih diprakarsai oleh masyarakat. Dalam proses *bottom up planning* lebih memperhatikan aspek kekayaan alam modal manusia atau masyarakatnya juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Modal sosial merupakan wujud modal manusia yang paling menonjol untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.”²³¹

Penelitian tersebut menghasilkan, bahwa usaha daur ulang kardus adalah salah satu daya tarik yang menggerakkan naiknya diagram perkembangan usaha, karena terjadi peningkatan pendapatan yang diterima oleh ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan. Bahkan bukan sekedar upah yang diperoleh,

²³¹ Meri Nurami, Peran Modal Sosial pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, (Studi pada Usaha Daur Ulang di Desa Kedung wonokerto, Kecamatan Prambon, Sidoarjo), <http://int.search.tb.ask.com/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2016

pengusaha juga peduli pada kesejahteraan karyawannya, dengan cara mendaftarkan karyawannya pada lembaga jaminan sosial (Jamsostek).²³²

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi tersebut, disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya: faktor sumber daya manusia, faktor financial, faktor modal sosial. Di antara macam-macam modal sosial yang ada adalah faktor kepercayaan, jaringan dan norma. Pertama, Kepercayaan. Kepercayaan ditunjukkan dalam proses pemesanan bahan baku melalui telepon dan menerima pesanan produk via telepon dari pelanggan; transaksi yang diikat melalui kontrak kerja yang dengan penyedia bahan serta memberlakukan *Purchase order* bagi pelanggannya. Kedua, Jaringan. Jaringan atau *networking* memiliki peran dalam perkembangan usaha pengolahan kardus bekas. Jaringan sosial menciptakan peluang usaha baru melalui jalur kekerabatan, pertemanan dan kolega; menjamin ketersediaan bahan dari menjaga relasi dengan penyedia bahan; menambah variasi produk yang dikembangkan dari permintaan konsumen; membuka informasi harga dari pelanggan; penyebaran informasi diantara sesama pelaku usaha; menjaring pelanggan baru dan juga menggaet sesama pelaku usaha menjadi mitra usaha. Beberapa pengusaha memulai bisnis daur ulang tidak terlepas dari peran kekerabatan, teman maupun kolega. Ketiga, Norma. Norma adalah aturan main baik formal maupun informal yang dapat dipahami dan dijalankan oleh semua pihak untuk mengurangi gesekan-gesekan yang terjadi. Dalam setiap aturan yang ada, selalu mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, disertai dengan imbalan yang diperoleh maupun sanksi yang dikenakan apabila melanggarnya. Dalam suatu usaha, reputasi dan relasi bisnis menjadi taruhan bagi seorang pengusaha. Oleh karena itu, komitmen terhadap kesepakatan,

²³² *Ibid.*,

pelayanan yang baik terhadap jaringan dan pelanggan, menjaga kualitas menjadi suatu yang mutlak harus dijaga.

Setiap elemen modal sosial, baik kepercayaan, jaringan, maupun norma tidak dapat berdiri sendiri melainkan saling terkait. Kepercayaan bertindak sebagai pelumas atau pelican dalam interaksi dalam jaring-jaring sosial. Jaring-jaring sosial bergerak sebagai penjamin keberlanjutan (*sustainability*) usaha yang terangkai dalam koridor-koridor norma. Dan norma sendiri merupakan refleksi dari kepercayaan. Ketiga elemen tersebut tercipta bukan dengan cara instan tetapi melalui proses interaksi yang berulang-ulang. Pemanfaatan modal sosial secara optimal dalam usaha daur ulang mampu memberdayakan masyarakat Desa Kedung Wonokerto yang dapat dilihat dari munculnya peluang-peluang usaha baru seperti jasa pengangkutan; penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya potensi ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, menurut Coleman yang dikutip oleh John Field, modal sosial merupakan sumber yang bermanfaat yang tersedia bagi aktor melalui hubungan sosialnya, yang mencakup berbagai entitas yang terdiri dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan tertentu aktor yang bekerja sama dalam struktur tersebut.²³³ Hubungan dipandang sebagai sumber modal yang membantu menciptakan kewajiban dan harapan antar aktor, membangun kejujuran lingkungan sosial, membuka saluran informasi, dan menetapkan norma-norma yang menopang bentuk-bentuk perilaku tertentu sambil menerapkan sanksi pada calon-calon penunggang bebas. Ciptaannya difasilitasi oleh kedekatan antara jaringan aktor yang berbeda, oleh stabilitas dan ideology umum bersama.²³⁴

²³³ John Field, *Modal Sosial*, *op. cit.*, h. 37

²³⁴ *Ibid.*, h. 39

Menurut Erni Febrina Harahap, SE., M. Si, dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang, dalam penelitian yang berjudul “pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri,”²³⁵ menjelaskan, bahwa Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari pihak pemerintah, pihak swasta, maupun pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM), merupakan indikasi, bahwa pemberdayaan sebagai paradigma baru pembangunan, telah menjadi komitmen semua komponen bangsa. Secara praktis upaya pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar, dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Sehingga, akan terjadi peningkatan dalam bidang ekonomi, harkat dan martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat lanjut Erni Febrina Harahap, SE., M. Si,²³⁶ adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Tetapi, dalam realitasnya, program pemberdayaan yang selama ini telah dilakukan, belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan konsep yang ada. Misalnya: Pertama, hampir tidak ada yang mencoba memasuki aspek yang cukup

²³⁵ Erni Febrina Harahap, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan konomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012, ISSN : 2086 – 5031, h. 95, <http://int.search.tb.ask.com/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2016

²³⁶ Erni Febrina Harahap, *loc. cit.*,

fundamental, yaitu aspek penguasaan faktor-faktor produksi oleh rakyat. Kalaupun ada umumnya pada faktor modal. Untuk faktor produksi lahan (lahan pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan) masih belum disentuh. Padahal, penguatan ekonomi rakyat adalah penguatan pemilikan (spesifikasi hak) atas faktor-faktor produksi. Tanpa memasuki aspek ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat, hanya akan menyentuh permukaannya saja. Kedua, terjadi distorsi konsep. dilihat dari segi konsep umum, pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi cukup jelas dan logik. Tetapi ketika diimplementasikan, terjadi pendangkalan yang luar biasa. Ini terjadi karena beberapa hal, antara lain: (1) konsepnya sendiri masih bersifat umum, sehingga dipahami beragam oleh pelaksana atau penyusun program; dan (2) kendala administrasi, dimana setiap proyek harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, sedang dalam program pemberdayaan kadang-kadang sulit didamaikan dengan persyaratan administrasi yang sudah baku. Oleh sebab itu, desain proyek harus menyesuaikan administrasi, bukan sebaliknya. Ketiga, program pemberdayaan, aspek pengembangan sumberdaya manusia hanya dilakukan ala kadarnya. Tidak ada usaha sistematis dan rencana strategis untuk pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat. Sementara, sumberdaya manusia adalah unsur paling fundamental dalam penguatan ekonomi rakyat. Keempat, hampir semua program pemberdayaan ekonomi rakyat, didesain generik, tidak spesifik sesuai keadaan dan permasalahan masyarakat setempat. Adanya anggapan, bahwa permasalahan mendasar masyarakat tunadaya adalah permasalahan modal. Oleh sebab itu, program pemberdayaan selalu ada komponen bantuan modal bergulir.

Untuk itu, demi efektivitas dan efisiensi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Beberapa hal dimaksud antara lain: (1) perlu ada kesamaan paham mengenai konsep pemberdayaan, sebab pada akhir-akhir ini berbagai

program/proyek pembangunan diberi label pemberdayaan, walaupun sebenarnya justru mengingkari makna pemberdayaan; dan (2) perlu ada koordinasi antar lembaga dan bahkan dalam lembaga dalam gerakan pemberdayaan, sebab ditengarai ada banyak kegiatan yang saling tumpang tindih dan mirip satu sama lain dengan nama yang berbeda.

5. Kerangka Fikir

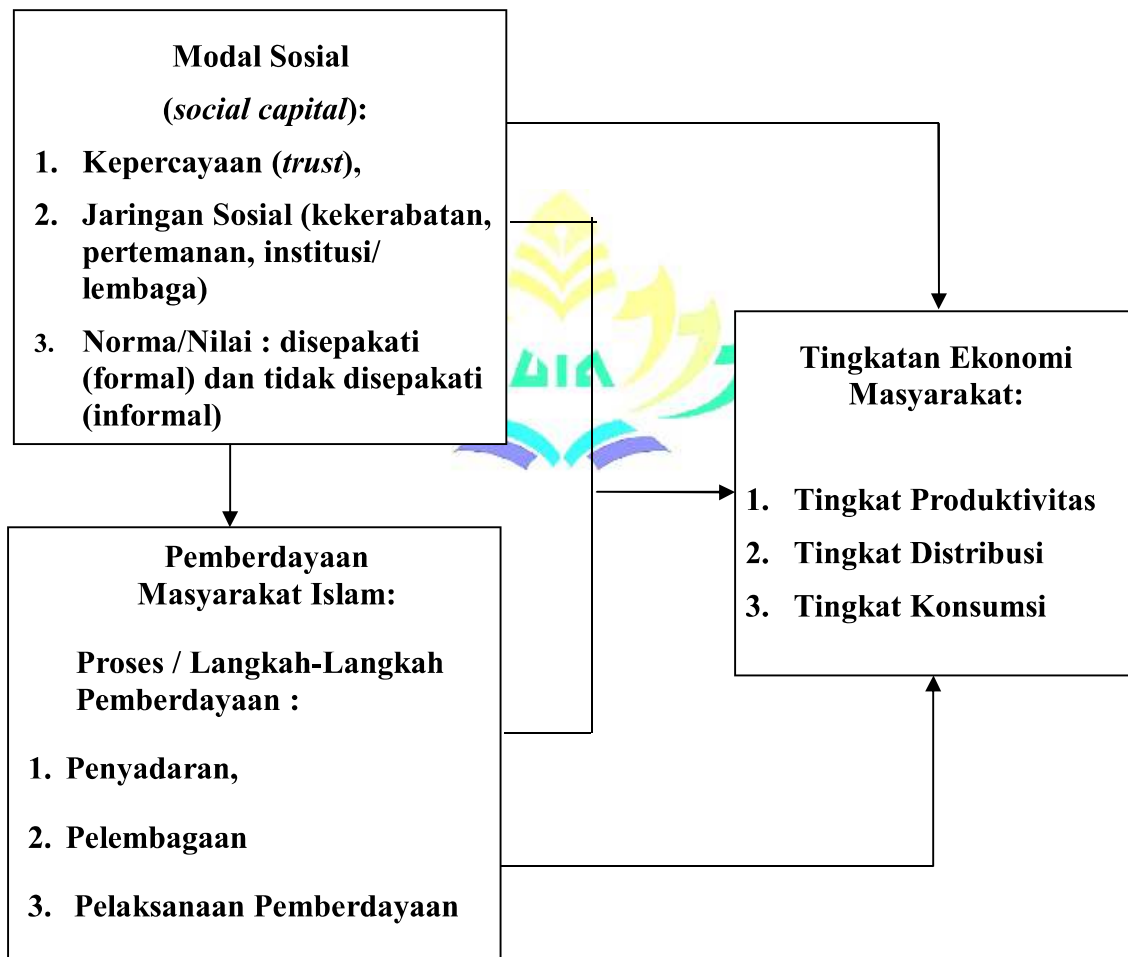
Berdasarkan uraian secara teoritis di atas, maka konsep modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat Islam dan pengaruhnya terhadap tingkat ekonomi masyarakat (*Studi pada Desa Berprestasi di Provinsi Lampung*) dapat dijelaskan dalam diagram kerangka fikir berikut:



Gambar 2

KERANGKA FIKIR

Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Pengaruhnya Terhadap Tingkat Ekonomi Masyarakat



Kerangka fikir di atas dapat dijelaskan, bahwa modal sosial (*social capital*), seperti; kepercayaan (*trust*), jaringan sosial yang didasari oleh (kekerabatan, pertemanan, institusi/ lembaga), dan norma-norma/nilai-nilai yang disepakati maupun yang tidak disepakati (kejujuran, komitmen, keadilan) dalam masyarakat merupakan sumber daya lokal sebagai kekuatan dalam meningkatkan efektifitas pemberdayaan masyarakat.

Sikap saling mempercayai (*trust*) merupakan kaedah moral yang selalu dikaitkan dengan nilai-nilai kebaikan, seperti; berprinsip baik, kejujuran dan tidak berdusta, serta menepati janji dan tidak khianat. Bahkan, menurut Francis Fukuyama, kepercayaan (*trust*) adalah harapan yang timbul dalam masyarakat, seperti kejujuran, perilaku kooperatif, berdasarkan norma-norma bersama tersebut tampak pada internal kelompok-kelompok sosial seperti, keluarga hingga kelompok terbesar, seperti bangsa, bahkan, terjadi pada antar kelompok dan antar individu dengan orang diluar kelompok.

Trust sebagai cerminan perilaku (interaksi) dalam sebuah entitas sosial (kelompok sosial) dan atau perilaku individu dalam entitas sosial merupakan wujud dari konsep jaringan atau *ukhuwah*. Jaringan menjadi media atau wadah dalam pemenuhan hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jaringan keterlibatan sipil, seperti asosiasi lingkungan, masyarakat paduan suara, koperasi, klub olah raga, partai berbasis massa, merupakan interaksi horisontal intens. Jaringan yang kuat memungkinkan individu dalam internal kelompok atau antar kelompok dapat bekerja sama yang saling menguntungkan. Kerjasama akan lebih mudah dilaksanakan dalam hubungan kekerabatan dibandingkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Menurut Clifford Geertz dalam Putnam, usaha koperasi (usaha bersama dan saling membantu) pada masyarakat Jawa lebih percaya kepada keluarga dibandingkan dengan kelompok lain yang lebih besar.²³⁷ Karena, kualitas kepercayaan (*trust*) dan keharmonisan dalam sebuah jaringan (*ukhuwwah*) terkait dengan komitmen terhadap norma-norma sosial atau nilai-nilai yang diyakini bersama. Oleh karena itu, apabila ada individu-individu yang mengabaikan *trust* dalam sebuah hubungan jaringan, maka kepercayaan akan berkurang dan jaringan (*ukhuwah*) pun akan lemah. Sebagai bentuk konsekuensi dari

²³⁷ Robert D. Putnam, *op. cit.*, h. 168

pengabaian *trust* dalam jaringan diatur melalui norma-norma yang disepakati bersama dalam kelompok masyarakat.

Norma-norma atau sekumpulan aturan, baik yang bersifat tertulis maupun tidak, diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada entitas sosial tertentu, biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan. Karena, peran norma dalam entitas sosial adalah untuk mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat.

Konsep modal sosial di atas, mempunyai hubungan yang sangat erat bahkan tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat. Menurut Soetomo, peran modal sosial tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Karena, kekuatan utama proses pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri.²³⁸

Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) sebagai proses merupakan sebuah konsep kerja yang terkait dengan pelaku pemberdayaan (*community worker*) dengan berbagai kompetensi yang harus dimiliki, metode pemberdayaan, dan pendekatan pemberdayaan, serta tahapan-tahapan dan prinsip pemberdayaan yang erat kaitannya dengan modal sosial. Misalnya, pemanfaatan *trust*, jaringan, dan norma-norma/nilai-nilai (kejujuran, kebersamaan, komitmen, dan keadilan) yang berkembang pada masyarakat akan mempermudah tahapan penyadaran terhadap potensi sumber daya masyarakat lokal, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya sosial yang tersedia. Pemanfaatan lembaga-lembaga lokal, seperti kekerabatan, pertemanan, dan lembaga informal akan mempermudah proses pemberdayaan, baik dalam pelembagaan berbagai aktifitas masyarakat maupun menciptakan jaringan.

²³⁸ Soetomo, *Pembangunan Masyarakat*, *op. cit.*, h. 227

Pelaksanaan pemberdayaan yang mendapatkan *legitimasi* dari tokoh masyarakat dan birokrasi akan menjadikan masyarakat berperanserta, mandiri, *justice*, dan *sustainability*, dalam pemberdayaan bidang ekonomi, sosial, dan ekologi.

Peran serta masyarakat dalam proses pemberdayaan akan optimal apabila ada sikap saling percaya dan jaringan yang dilandasi norma-norma/nilai-nilai, baik yang disepakati atau tidak. Tidak hanya itu, peran serta masyarakat yang dibangun atas potensi lokal tersebut akan menciptakan aktifitas yang bersifat jangka panjang atau berkelanjutan (*sustainable*), kemandirian, dan berkeadilan. Karena, apa yang mereka lakukan berdasarkan kesadaran dan komitmen mereka, lembaga tempat bernaung adalah lembaga milik mereka dan didukung oleh jaringan yang kuat.

Pelaksanaan pemberdayaan dalam upaya untuk menciptakan kemandirian yang berkelanjutan, baik secara individu maupun intitas sosial tertentu harus didiberi kekuasaan (*power*) untuk memanfaatkan sumber daya produksi, ekonomi, sosial, dan ekologi yang dimiliki serta terlibat secara langsung dalam mekanisme pengelolaannya. Kekuasaan terhadap sumber daya produksi, ekonomi, sosial, dan ekologi akan berdaya secara optimal apabila dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor internal, diantaranya; faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, dan faktor sumber daya modal (materi).

Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan masyarakat adalah sumber daya alam, baik berupa makhluk hidup (tumbuh-tumbuhan, hewan) maupun non-makhluk hidup (lahan pertanian, perkebunan, dan barang tambang). Sumber daya alam dimaksud, tersedia di lingkungan fisik masyarakat baik di daratan, di udara maupun didalam air. Sebagian dari sumber daya alam itu merupakan sumber daya yang bisa diperbaharui (*renewable resources*) dan sebagian yang lainnya merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*).

Sedangkan sumber daya manusia (*human capital*), mencakup; pengetahuan, keterampilan, spiritual, dan modal sosial, serta kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (institusi/lembaga sosial dan agama), norma/nilai agama dan budaya. Sementara itu, sumber daya modal mencakup kemampuan dana, baik yang bersumber dari masyarakat maupun dari pihak lain. Pemberdayaan masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor luar, yakni pihak-pihak yang mempunyai kontribusi dalam berbagai aktifitas pemberdayaan, seperti pemerintah dan NGO.

Community empowerment (pemberdayaan masyarakat) dan sosial kapitas (*social capital*) selalu dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dalam pengertian ekonomi, maka *community empowerment* difokuskan pada ***rural community empowerment*** (pemberdayaan masyarakat desa) dengan segala potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat setempat secara *integrated*, karena berbagai faktor tersebut saling terkait dan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, masyarakat desa memiliki faktor-faktor atau sumber-sumber produksi dan mekanisme pengelolaan sesuai dengan potensi lingkungan, potensi pasar, serta potensi sosial yang khas.

Oleh karena itu, keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan modal sosial yang ada pada masyarakat diharapkan akan berpengaruh terhadap tingkat ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan tingkat produktifitas, tingkat distribusi, dan tingkat konsumsi. Tingkat ekonomi dalam kuantitas maupun kualitas, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat.

Tingkat pengaruh modal sosial terhadap pemberdayaan masyarakat, pengaruh modal sosial terhadap tingkat ekonomi masyarakat, pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap tingkat ekonomi masyarakat, dan pengaruh modal sosial dan pemberdayaan masyarakat terhadap tingkat ekonomi masyarakat erat kaitannya dengan system tindakan individu masyarakat dan fungsi atau peran individu masyarakat dalam

struktur masyarakat setempat. Oleh karena itu, kajian tentang modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat dan pengaruhnya terhadap tingkat ekonomi masyarakat akan dikaji dengan menggunakan pendekatan teori-teori sosial Ibnu Khaldun dan Talcott Parsons.

Menurut Ibnu Khaldun melalui teori *ashabiyahnya*, suatu suku (masyarakat) bahkan negara, khususnya masyarakat desa akan bertahan dan berkembang apabila terjalin suatu ikatan (*ashabiyah*). Ikatan yang dilandasi hubungan kerjasama dalam mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup. Ashabiyah menyatukan upaya dan tujuan yang sama, mempertahankan diri, menolah atau mengalahkan musuh.²³⁹ Budaya masyarakat desa syarat dengan soliditas yang kuat antar sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bertani, berkebun, berternak, dan berdagang.²⁴⁰

Manusia memiliki kemampuan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya, maka manusia berupaya berinovasi mengolah bahan yang ada menjadi bentuk yang berbeda dan membutuhkan orang yang memiliki keahlian yang berbeda. Menurut Ibnu Khaldun, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang berupaya menumbuk bahan makanan menjadi adonan dan dibantu tukang besi, tukang kayu, dan tukang tembikar.²⁴¹

Talcott Parsons sebagaimana dikutip oleh A. Fauzie Nurdin, Talcott Parsons membangun teorinya dengan mengacu kepada sistem. Masyarakat dipandang sebagai

²³⁹ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Muqoddimah, Alih bahasa oleh Masturi Ilham dkk, dengan Judul Mukaddimah, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2013), h. viii-ix

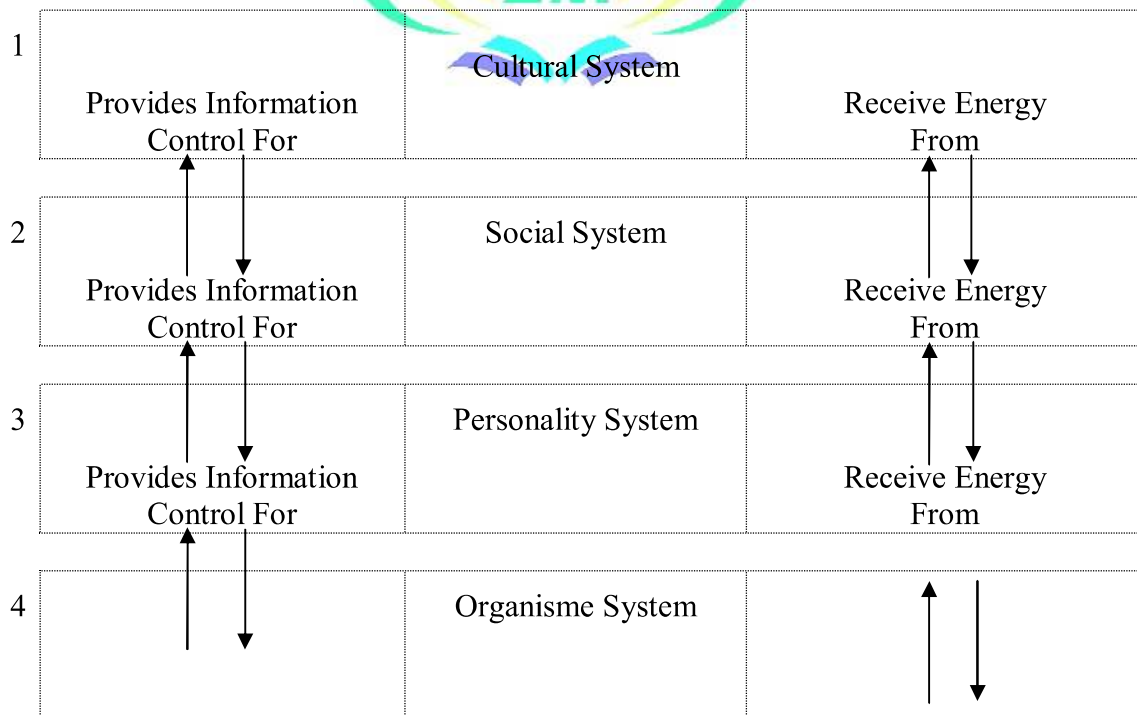
²⁴⁰ *Ibid.*, h. 175-175

²⁴¹ *Ibid.*, h. 69

satu kesatuan subsistem yang saling berinteraksi. Setiap subsistem dalam proses hubungan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sistem.²⁴²

Individu-individu yang terintegrasi dalam kelompok-kelompok tani berinteraksi dan membangun hubungan melalui program pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan modal sosial sebagai instrumen. Oleh karena itu, maka kajian tentang modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat dan pengaruhnya terhadap tingkat ekonomi masyarakat akan diawali dengan menggunakan teori sistem tindakan *Hirarchi Sibernetika* Talcott Parsons sebagai berikut:

Gambar 3:
Skema Model Hirarchi Sebernitika
Talcott Parsons



Skema sistem tindakan di atas, menggambarkan bahwa masing-masing sitem (sistem kultur, sosial, kepribadian, dan prilaku organisasi) saling terkait dan berfungsi sesuai dengan tugasnya. Masing-masing sitem saling berinteraksi, memberi dan menerima sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Pandangan Talcott Parsons

²⁴² A. Fauzie Nurdin, *Pemberdayaan Da'i dalam Masyarakat Lokal*, (Yogyakarta: Gema Media, 2009), h. 9

tentang fungsionalisme strukturalnya dalam George Ritzer dan Douglas J. Goodman, menjelaskan bahwa: (1) sistem memiliki tatanan dan bagian-bagian mempunyai ketergantungan satu sama lainnya; (2) sistem cenderung menjadi tatanan yang memelihara dirinya atau *ekuilibrium* (keseimbangan).²⁴³

Cultural system merupakan kekuatan utama yang mengikat berbagai elemen sistem tindakan. kebudayaan menjadi media interaksi antar aktor dan mengintegrasikan kepribadian dengan sistem sosial. Jadi, dalam sistem sosial, kebudayaan menyatu dalam norma dan nilai, sedangkan dalam sistem kepribadian, kebudayaan diinternalisasikan oleh aktor ke dalam dirinya.²⁴⁴ Sehingga, fungsi pokok sistem budaya adalah mengatur ketegangan-ketegangan dan mempertahankan pola peranan yang bersifat *latent* (terpendam). Juga, berfungsi memberi informasi dan pengawasan pada. *Social System*. Menurut Parsons dalam George Ritzer dan Douglas J. Goodman, sistem sosial adalah:

Sistem sosial terdiri dari beragam aktor individual yang berinteraksi satu sama lain dalam situasi yang setidaknya memiliki aspek fisik atau lingkungan. aktor yang cenderung termotivasi kearah “optimisasi kepuasan” dan yang hubungannya dengan situasi mereka, termasuk hubungan satu sama lain, didefinisikan dan diperantarai dalam bentuk sistem simbol yang terstruktur secara cultural dan dimiliki bersama.²⁴⁵

Social System merupakan media yang menyatu dengan pola-pola sistem kepribadian, yang berfungsi integrative dalam sistem tindakan umum dan memberi informasi serta pengawasan bagi sistem kepribadian level di bawahnya.²⁴⁶ *Personality System*, sebagai sistem pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan. Peran fungsionalnya adalah memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan *goal*

²⁴³ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Sociological Theory: Alih Bahasa oleh Nurhadi dengan Judul, Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), h. 257

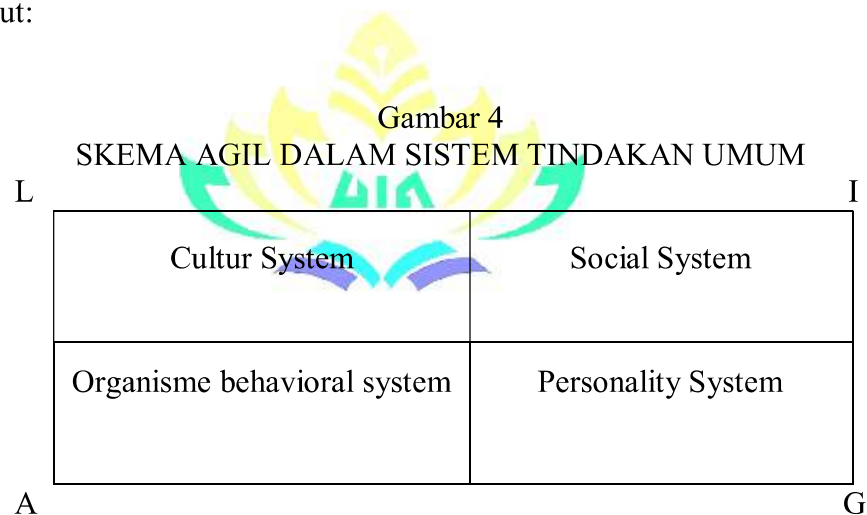
²⁴⁴ *Ibid.*, h. 262

²⁴⁵ *Ibid.*, h. 259

²⁴⁶ A. Fauzie Nurdin, *op. cit.*, h. 11

attainment. sistem kepribadian bertindak memberikan informasi dan pengawasan bagi level di bawahnya, tetapi juga menerima energy dari bawah. *Organisme system* merupakan sumber energy bagi seluruh sistem dan menerima informasi dan pengawasan dari sistem lainnya.

Masing-masing Sistem dalam sistem tindakan terkait dengan makna-makna yang berhubungan dengan masing-masing tindakan, sebagaimana dijelaskan oleh Parsons dalam George Ritzer dan Douglas J. Goodman,²⁴⁷ melalui skema AGIL sebagai berikut:



Organizm behavioral adalah sistem yang membidangi fungsi adaptasi (A: *Adaptation*) dengan melakukan penyesuaian dan mengubah apa yang datang dari luar. *Personality System* berfungsi melaksanakan tugas pencapaian tujuan (G: *Goal Attainment*) dengan cara mamaknai *system goal* dan memobilisasi potensi sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan. *Social system*, bertugas sebagai fungsi integrasi (I) harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. *Cultural system*, menjalankan fungsi

²⁴⁷ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *op., cit.*, h. 257

terpendam (L: Latency) dengan cara mempersiapkan aktor dengan yang memiliki norma-norma dan nilai-nilai sebagai sumber memotivasi untuk bertindak.²⁴⁸

Berdasarkan skema *action system* dalam teori sistem Hirarchi Sebernitika dan skema AGIL di atas, hubungannya dengan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat Islam dan pengaruhnya terhadap tingkat ekonomi masyarakat sangat erat. Modal sosial merupakan *cultural system* (sistem budaya) sebagai kekuatan utama yang mengikat berbagai elemen sistem tindakan dalam *social system*. Dalam *social system*, kebudayaan menyatu dalam bentuk *trust* (kepercayaan dan kejujuran), jaringan sosial, dan norma serta nilai, sedangkan dalam sistem kepribadian, kebudayaan diinternalisasikan oleh individu-individu dalam masyarakat. Sehingga, fungsi pokok modal sosial adalah mengatur perilaku/tindakan dan mempertahankan pola-pola peranan dalam *social system* yang bermakna *latent* (terpendam). Juga, berfungsi (bertindak) memberi informasi dan pengawasan terhadap individu-individu dalam *social system*, *personality system*, dan *organism system*.

Hubungan antara individu-individu dalam masyarakat (*Social System*) dalam konteks masyarakat mengintegrasikan individu-individu kedalam kelompok-kelompok masyarakat sebagai media kegiatan pemberdayaan masyarakat. Masing-masing individu dalam kelompok memberikan informasi dan pengawasan bagi individu-individu lainnya (*personality system*) berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma, kepercayaan (kejujuran, tolong-menolong, kerjasama), pola hubungan dalam bentuk *neet working* (hubungan jaringan kerjasama), baik dalam internal kelompok maupun antar kelompok dalam masyarakat.

Individu-individu dalam kelompok masyarakat yang saling berhubungan (*personality system*) berusaha menjalin hubungan kerjasama dalam mencapai tujuan

²⁴⁸ *Ibid.*, h. 257

dan secara bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi (*goal attainment*). *Personality System*, sebagai sistem pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat sebagai obyek penelitian ini adalah permasalahan ekonomi.

Permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam dan dari luar. Oleh karena itu, menurut Talcott Parsons dalam Peter Beilharz menyebutkan, permasalahan ekonomi dalam kelompok masyarakat dihadapkan pada problem *adaptif, integrative, dan pelestarian pola laten*. Problem *adaptif* sebagai fungsionalisasi *organism system*. Fungsi *adaptif* berusaha mengorganisir masyarakat dalam memperoleh penghidupan. Bentuk diskriptif dalam bentuk komunitas sosial sebagai problem *integrative*, sedang fungsi pelestarian pola bertanggung jawab terhadap stabilitas pelestarian nilai yang menciptakan karakter masyarakat.²⁴⁹ *Organisme system* (organisasi pelaku) melakukan adaptasi terhadap permasalahan yang ada pada masyarakat, beradaptasi dengan berbagai informasi, ide, dan prilaku yang datang dari luar melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan tingkat ekonomi yang lebih baik dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi.

6. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis yang digunakan dalam penelitian disertasi ini, sebagai berikut:

- a. Modal sosial yang ada pada masyarakat berpengaruh terhadap proses pemberdayaan masyarakat Islam di desa berprestasi Provinsi Lampung.

²⁴⁹ Peter Beilharz, *Social Theory: A Guide to Central Thinkers*, (Alih Bahasa oleh Sigit Jatmiko dengan Judul : “*Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Filosof Terkemuka*”), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2005), 296

- b. Proses pemberdayaan masyarakat Islam berpengaruh terhadap tingkat ekonomi masyarakat di desa berprestasi Provinsi Lampung.
- c. Modal sosial yang ada pada masyarakat berpengaruh terhadap tingkat ekonomi masyarakat di desa berprestasi provinsi Lampung.
- d. Pemberdayaan masyarakat berbasis modal sosial berpengaruh terhadap tingkat ekonomi masyarakat di desa berprestasi Provinsi Lampung.

7. Definisi Operasional

Variable yang diukur dalam penelitian disertasi ini perlu didefinisikan secara operasional untuk mengetahui batasan kajian dan memudahkan penetapan sub variable, indikator pengukuran. Variabel-variabel yang dimaksud adalah variabel modal sosial (*social capital*), variabel pemberdayaan masyarakat (*community development*), dan variabel tingkat ekonomi masyarakat.

1. Modal Sosial

Modal sosial segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja sama dalam masyarakat yang dapat memfasilitasi tindakan kolektif, terorganisir, dan efisien dan ditopang nilai-nilai *trust*), *network*, dan norma-norma yang diyakini, diamalkan, dan dipertahankan oleh masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses penyadaran untuk mendorong kemaunan dan keberanian, pelebagaan, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat secara *partisipatif* dan *mandiri* untuk mencapai perbaikan dalam bidang ekonomi, sosial, fisik, dan mental secara berkelanjutan (*sustainable*).

3. Tingkat Ekonomi Masyarakat

Tingkat ekonomi adalah kemampuan masyarakat dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi dilihat dari kuantitas dan kualitas dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran tingkat atau kelas ekonomi tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan produktivitas, pengeluaran, dan pemilikan terhadap benda-benda dalam pemenuhan kebutuhan.

Pembahasan tentang variabel judul yang sangat luas, maka variabel judul disertasi ini diperjelas menjadi indikator. Indikator variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Variabel modal sosial

- a. Kepercayaan/Amanah adalah sikap saling percaya kepada sesama, baik dalam suatu kelompok atau komunitas usaha maupun orang lain sebagai jaringan usaha dalam aktifitas produksi, distribusi, dan konsumsi.
- b. *Social Network* adalah pola perilaku individu atau kelompok dalam menjalin hubungan kerjasama (*ukhuwah*) yang saling menguntungkan, berdasarkan ikatan kekerabatan, pertemanan, dan agama.
- c. Norma-norma sosial adalah aturan-aturan yang disepakati masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, berdasarkan ajaran agama maupun tradisi.

2. Variabel Pemberdayaan Masyarakat Islam

- a. Penyadaran, yakni upaya memberikan motivasi kepada masyarakat tentang potensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dan sumber daya nilai dalam masyarakat.
- b. Pengorganisasian, yakni upaya mengorganisir potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, kebijakan, dan akuntabilitas dalam gerakan pemberdayaan, sehingga menjadi sumber kekuatan.
- c. Pelaksanaan Pemberdayaan, yakni serangkaian kegiatan memberikan kemampuan (pengisian kapasitas) kepada masyarakat berupa pengetahuan

teknis, keterampilan manajerial, pengembangan kegiatan sesuai dengan bidang usaha yang telah ditetapkan secara partisipatif oleh masyarakat.

3. Variabel tingkat ekonomi masyarakat

- a. Produksi adalah proses atau cara menghasilkan produk yang berbentuk atau bernilai materi dan immateri yang berguna bagi kehidupan manusia dimasa sekarang dan akan datang sesuai dengan bidang usaha masyarakat.
- b. Konsumsi adalah penggunaan hasil produksi kelompok usaha dalam memenuhi kebutuhan, seperti *primary needs*, seperti sandang, pangan, dan papan; kedua, *secondary needs*, seperti sepatu, sepeda, pendidikan, dan sebagainya; ketiga, *tertiary needs*, seperti barang-barang mewah, dan; keempat, *quartary needs*, yakni barang-barang yang mubadzir.
- c. Distribusi adalah proses tukar-menukar hasil produksi dari kelompok usaha (produsen) kepada pembeli (konsumen) untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Untuk mempermudah proses analisis dan menginterpretasikan data, maka ditetapkan indikator-indikator sub variabel sebagai berikut:

1. Indikator kepercayaan (*trust*).

- a. Kejujuran/Siddiq, yakni sikap keterbukaan dan tidak berbohong, baik kepada sesama anggota kelompok atau komunitas maupun orang lain sehingga terhindar dari sikap keraguan yang menghilangkan kepercayaan.
- b. Kesetiaan/Tanggung jawab, yakni intensitas msyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan kelompok usaha sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. Kerja-Sama/Tanggung jawab adalah bentuk dan tingkat kerjasama, baik sesama anggota kelompok maupun kelompok lain sesama produsen dan konsumen.

2. Indikator jaringan sosial (*social network*).

- a. Kekerabatan, yakni kerjasama saling menguntungkan antara kelompok usaha dengan pihak lain yang menjamin ketersediaan bahan produksi, distribusi dan konsumsi yang dilandasi hubungan darah (keluarga). Kekerabatan diukur dengan jauh dekatnya hubungan darah (keluarga),
- b. Pertemanan, yakni kerjasama saling menguntungkan antara kelompok usaha dengan pihak lain yang menjamin ketersediaan bahan produksi, distribusi dan konsumsi yang dilandasi hubungan kedekatan. pertemanan diukur berdasarkan jauh dekatnya pertemanan.
- c. Agama, yakni kerjasama saling menguntungkan antara kelompok usaha dengan pihak lain yang menjamin ketersediaan bahan produksi, distribusi dan konsumsi yang dilandasi ideology (keyakinan). keyakinan diukur berdasarkan satu agama dan perberbedaan keyakinan agama

3. Indikator norma-norma masyarakat.

- a. Norma tertulis adalah aturan-aturan yang disepakati, dijalankan, dan dipatuhi masyarakat yang dituangkan dalam bentuk peraturan atau tata kode etik.
- b. Norma tidak tertulis adalah aturan-aturan yang disepakati, dijalankan, dan dipatuhi masyarakat berdasarkan kebiasaan.

4. Indikator penyadaran

- a. Partisipasi/keikutsertaan anggota kelompok usaha tani dalam program pengembangan kapasitas (kemampuan) melalui kegiatan pelatihan;
- b. Partisipasi/keikutsertaan anggota kelompok usaha tani dalam program pengembangan kapasitas (kemampuan) melalui kegiatan penyuluhan.

5. Indikator pengorganisasian

- a. Sumber daya manusia, yakni mengorganisasikan kemampuan masyarakat dilihat dari pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Indikator sumber daya manusia ini akan diamati dan dipertanyakan adalah tentang pengelompokan sumber daya manusia dalam kelompok usaha sesuai dengan usaha sejenis, ada pembagian tugas yang jelas, saling membantu dalam menyelesaikan masalah, bekerjasama dengan fasilitator/penyuluh;
- b. Sumber daya alam, yakni pengorganisasian potensi sumber daya alam sesuai dengan jenis usaha. Indikator sumber daya alam yang akan diamati dan dipertanyakan adalah tentang pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat, bahan baku yang mudah didapatkan, kemudahan dalam pendistribusian hasil produksi, dan tingkat kesulitan dalam mendapatkan informasi, peningkatan penghasilan;
- c. Kebijakan pemerintah, yakni sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dengan program pemerintahan desa dan kelompok usaha. Indikator kebijakan yang akan diamati dan dipertanyakan adalah tentang proses pembentukan kelompok usah, jenis usaha, bahan baku, permodalan, akses informasi, dan distribusi hasil;
- d. Akuntabilitas, yakni bentuk pertanggungjawaban keuangan, kualitas produksi, dan distribusi, baik kepada internal kelompok usaha maupun antara kelompok usaha dengan pihak lain. Indikator akuntabilitas ini akan fokus tentang, pertanggung jawaban keuangan, kuantitas dan kualitas hasil produksi sesuai dengan kesepakatan dengan konsumen;

6. Indikator pelaksanaan pemberdayaan

a. Pelatihan

- 1) Pelatihan pengetahuan teknis, yakni pemberian pengetahuan tentang teknis pengelolaan usaha yang diukur dari kompetensi tenaga pemberdayaan (fasilitator), kesesuaian materi dan metode, partisipasi masyarakat, dan kemampuan mempraktikkan materi.
- 2) Pelatihan keterampilan manajemen, pemberian materi keterampilan tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan usaha.
- 3) Pelatihan pengembangan usaha, yakni pembelajaran tentang kreatifitas pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal untuk menambah pendapatan. Pelatihan pengembangan usaha akan diukur melalui ada tidak pengembangan usaha, bentuk dan model pengembangan usaha.

b. Pendampingan

Serangkaian kegiatan pendampingan teknis kepada masyarakat tentang pengelolaan produksi dan distribusi. Pendampingan akan diukur melalui intensitas pendampingan pada tahun pertama (pembinaan), tahun kedua (pengorganisasian), dan tahun ketiga (kemandirian)

7. Indikator produksi

- a. Modal produksi, yakni ketersediaan faktor-faktor produksi sebagai pendukung efektivitas pengelolaan usaha, yang diukur dari kepemilikan lahan usaha, pembiayaan, kemandirian pengadaan obat-obatan, dan kepemilikan atau sistem penggunaan teknologi.

- b. Produktivitas, yakni jumlah hasil produksi sebagai pendapatan anggota kelompok usaha diukur dari jumlah pendapatan setiap bulan, kesesuaian target, dan peningkatan hasil.
- c. Etos kerja, yakni *ghirah* (motivasi) anggota kelompok tani dalam melaksanakan usaha diukur dari sikap terhadap profesi, kedisiplinan, pengembangan diri, dan manfaat pelatihan/penyuluhan.
- d. Kualitas produksi, yakni proses dan mutu produk yang dihasilkan.

8. Indikator konsumsi

Adalah pemanfaatan hasil produksi dalam memenuhi kebutuhan, seperti:


- a. *Primary needs*, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan
 - b. *Cecondary needs*, pemenuhan kebutuhan tambahan seperti sepatu, sepeda, pendidikan, dan sebagainya.
 - c. *Tertiary needs*, seperti pemenuhan kebutuhan akan barang-barang mewah, seperti motor, mobil, dan perhiasan lainnya.
 - d. *Quartary needs*, yakni pemenuhan barang-barang atau perilaku yang mubadzir, seperti kebiasaan merayakan hari ulang tahun, judi, narkoba, dan diskotik.
9. Indikator distribusi, proses tukar-menukar hasil produksi dari kelompok usaha (produsen) kepada pembeli (konsumen) sesuai dengan permintaan pasar dan untuk memenuhi kebutuhan Sosial. hal ini akan diukur melalui:
- a. Kuantitas distribusi, yakni kemampuan kelompok usaha untuk memenuhi permintaan pasar lebih besar dari kebutuhan pangan keluarga.
 - b. Kualitas distribusi, yakni keadilan dan kepercayaan antara kelompok usaha tani (produsen) dengan konsumen melalui kesepakatan kerjasama. Serta, kesadaran dan keikhlasan mempergunakan sebahagia harta untuk kepentingan sosial.


Berdasarkan definisi operasional di atas, maka penulis menjelaskannya secara lebih detil sebagaimana dalam tabel berikut ini:






DEFINISI OPERASIONAL

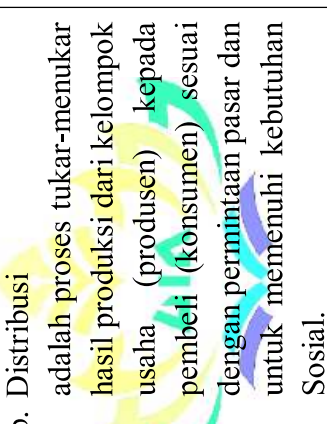
Variabel	Indikator	Prediktor	Item
<p>1. Modal Sosial:</p> <p>Segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja sama dalam masyarakat yang dapat memfasilitasi tindakan kolektif, terorganisir, dan efisien dan ditopang nilai-nilai kepercayaan (<i>trust</i>), jaringan (<i>network</i>), dan norma-norma yang diyakini, diamalkan, dan dipertahankan oleh kelompok masyarakat, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun budaya (tradisi).</p>	<p>a. Kepercayaan</p> <p>adalah sikap <i>saling percaya, kesetiaan (tanggung jawab), dan kerjasama</i> kepada sesama, baik dalam suatu kelompok atau komunitas usaha maupun orang lain sebagai jaringan usaha dalam aktifitas produksi, distribusi, dan konsumsi.</p> 	<p>Kepercayaan/Kejujuran, yakni sikap:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kepercayaan manajemen Kepercayaan anggota Kepercayaan informasi kepercayaan jaringan keyakinan teknologi <p>Kesetiaan/Tanggung jawab, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingkat kehadiran Ketepatan waktu Kepatuhan Keterlaksanaan Pertanggung jawaban <p>Kerjasama adalah bentuk dan tingkat kerjasama dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembahasan Kebersamaan Penyelesaian pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Kepercayaan terhadap laporan pengurus Saling meminjamkan peralatan tani Saling memberi informasi Pemanfaatan media sosial Keyakinan terhadap penyuluh <ul style="list-style-type: none"> Intensitas kehadiran dalam pertemuan rutin Hadir tepat waktu dalam pertemuan rutin Melaksanakan kesepakatan Melaksanakan tugas yang dipercayakan Melaporkan setiap tugas yang dipercayakan <ul style="list-style-type: none"> Kerjasama dalam pembahasan masalah pertanian Kebersamaan dalam membasmi hama, membersihkan irigasi Kerjasama dalam menyelesaikan kan

	<p>b. Jaringan Sosial (Social Network)</p> <p>adalah pola perilaku individu atau kelompok dalam menjalin hubungan <i>ukhuwah</i> (kerjasama) yang saling menguntungkan, berdasarkan <i>status hubungan</i> dan <i>kekuatan hubungan</i></p> <div></div>	<p>Status Hubungan, yakni kerjasama saling menguntungkan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kekerabatan• Kesukuan• Kedaerahan• Pertemanan• Ketetanggaaan• Keyakinan• Kekeluargaan	<p>pekerjaan dan dalam menyelesaikan masalah keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">• Keanggotaan kelompok usaha tani berdasarkan hubungan keluarga• Keanggotaan kelompok usaha tani berdasarkan hubungan kesukuan• Keanggotaan kelompok usaha tani berdasarkan hubungan kedaerahan• Keanggotaan kelompok usaha tani berdasarkan hubungan pertemanan• Keanggotaan kelompok usaha tani berdasarkan hubungan ketetanggaaan• Keanggotaan kelompok usaha tani berdasarkan hubungan keyakinan• Distribusi hasil usaha tani berdasarkan hubungan keluarga
		<p>Kekuatan Hubungan, yakni kuat atau tidaknya ikatan kerjasama berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kekerabatan• Kesukuan• Kedaerahan	<ul style="list-style-type: none">• Maju mundurnya kelompok usaha tani karena hubungan kekerabatan• Maju mundurnya kelompok usaha tani karena hubungan kesukuan• Maju mundurnya kelompok usaha tani

		<ul style="list-style-type: none">• Pertemanan• Ketetangaan• Keyakinan• Kekeluargaan	<p>karena hubungan kedaerahan</p> <ul style="list-style-type: none">• Maju mundurnya kelompok usaha tani karena hubungan pertemanan• Maju mundurnya kelompok usaha tani karena hubungan ketetangaan• Maju mundurnya kelompok usaha tani karena hubungan keyakinan• Bekerjasama berdasarkan kekeluargaan dan kesukuan akan lebih mudah mendapatkan bahan dan modal produksi	<ul style="list-style-type: none">• Kesanggupan menerima sangsi jika melanggar aturan• Membantu sesama sesuai aturan• Menerima sangsi bila tidak hadir dalam pertemuan• Kepatuhan karena sangsi
		<ul style="list-style-type: none">• Penerimaan• Kemampuan melakukan• Kehadiran• Kepatuhan		
		<p>c. Norma adalah aturan-aturan yang disepakati untuk <i>dipatuhi</i> oleh kelompok usaha, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik yang berdasarkan ajaran agama maupun tradisi</p>		
2. Pemberdayaan Masyarakat: Pemberdayaan masyarakat adalah proses penyadaran, mendorong kemaunan, dan keberanian serta pelembagaan, meningkatkan kemampuan memberikan kesempatan	 <p>a. Penyadaran adalah upaya memberikan motivasi kepada masyarakat dengan cara mengembangkan kapasitas (kemampuan) tentang potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya nilai yang ada pada masyarakat melalui</p>	<p>Keaktifan dalam mengikuti pelatihan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Motivasi usaha• Pengelolaan produksi• Manajemen usaha• Pengembangan usaha• Potensi SDM	<ul style="list-style-type: none">• Intensitas dalam mengikuti program pelatihan motivasi usaha.• Intensitas dalam mengikuti program pelatihan pengelolaan produksi• Intensitas dalam mengikuti program pelatihan manajemen usaha• Intensitas dalam mengikuti program pelatihan pengembangan usaha• Intensitas dalam mengikuti program pelatihan tentang potensi SDM	

<p>masyarakat secara partisipatif dan mandiri untuk perbaikan dalam bidang ekonomi, sosial, fisik, dan mental secara berkelanjutan (sustainable).</p>	<p>kegiatan pelatihan dan penyuluhan.</p>	<p>Keaktifan dalam Penyuluhan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen usaha • Ketahanan pangan • Pengelolaan hasil • Pemberantasan penyakit 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas dalam mengikuti penyuluhan manajemen usaha • Intensitas dalam mengikuti penyuluhan ketahanan pangan • Intensitas dalam mengikuti penyuluhan pengelolaan hasil usaha • Intensitas dalam mengikuti penyuluhan pemberantasan hama
<p>b. Pengorganisasian:</p> <p>Upaya mengorganisir potensi masyarakat melalui kegiatan: <i>Identifikasi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya nilai, Program prioritas, dan Akintabilitas</i></p>	<p>Identifikasi Sumber daya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Sumber Daya Manusia • Ketersediaan Sumber Daya Alam • Ketersediaan Sumber Daya Nilai <p>Program Prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan kebutuhan hidup • Ketersediaan kebutuhan pasar • Ketersediaan obat-obatan • Prioritas pemerintah • Ketersediaan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian tugas sesuai dengan pendidikan • Pengelolaan usaha tani sesuai dengan ketersediaan lahan • Adanya tradisi saling mem- bantu dan gotong-royong • Tersedianya kebutuhan keluarga • Usaha tani sesuai dengan kebutuhan pasar • Bantuan pemerintah • Usaha tani sesuai dengan program pemerintah • Ketersediaan Peralatan usaha tani 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pupuk • Adanya laporan yang benar • Adanya laporan yang tepat waktu • Adanya laporan apa adanya 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan pupuk • Kesesuaian laporan • Ketepatan laporan • Kejujuran laporan 	<ul style="list-style-type: none"> • PPL yang mempunyai kepribadian yang menyenangkan • Penyampaian materi dengan jelas • Materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan • Penyampaian materi sesuai dengan kemampuan masyarakat • Intensitas pendampingan pada tahun pertama • Intensitas pendampingan pada tahun kedua • Intensitas pendampingan pada tahun ketiga • Ketergantungan masyarakat dengan penyuluh
	<p>c. Pelaksanaan Pemberdayaan</p> <p>1) Serangkaian kegiatan pelatihan sebagai upaya memberikan kemampuan (pengisian kapasitas) kepada masyarakat</p> <p>2) Serangkaian kegiatan pendampingan teknis kepada masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepribadian narasumber • Kemampuan narasumber • Kesesuaian materi • Kesesuaian metode • Pendampingan awal • Pendampingan pertengahan • Pendampingan akhir • Tingkat ketergantungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan usaha • Pembiayaan • Ketercukupan • Kemandirian 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola usaha pribadi atau milik orang lain • Biaya pengelolaan usaha, baik yang bersumber dari biaya pribadi maupun pinjaman • Keseimbangan antara hasil produksi dengan biaya produksi • Penggunaan pupuk, obat-obatan organik hasil produksi sendiri, pembelian, dan bantuan pemerintah
<p>3. Tingkat Ekonomi masyarakat:</p> <p>Tingkat ekonomi adalah kemampuan kelompok usaha dalam proses produksi, konsumsi dan distribusi dilihat dari kuantitas dan kualitas dalam kurun waktu tertentu. Ukuran tingkat</p>	<p>a. Produksi</p> <p>adalah proses atau cara menghasilkan produk yang terkait dengan modal <i>produksi, hasil produksi, Etos (semangat) kerja</i></p>	Modal Produksi:		

<p>atau kelas ekonomi tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan produktivitas, pengeluaran, dan pemilihan terhadap benda-benda dalam pemenuhan kebutuhan.</p>		<p>• Sewa</p> <p>Hasil Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan/produktivitas • Kesesuaian • Peningkatan hasil <p>Etos Kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesenangan dalam bekerja • Kedisiplinan • Pengembangan diri • kebermanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pemakaian teknologi pertanian • Hasil panen dihitung setiap bulan dalam bentuk rupiah • Bekerja sesuai dengan target dan aturan • Peningkatan hasil usaha tani dan pemanfaatannya • Tidak mengeluh dan berat terhadap pekerjaan • Pemanfaatan waktu sesuai dengan kesempatan • Pengembangan diri melalui informasi • Manfaat program penyuluhan dan pelatihan
<p>b. Distribusi adalah proses tukar-menukar hasil produksi dari kelompok usaha (produsen) kepada pembeli (konsumen) sesuai dengan permintaan pasar dan untuk memenuhi kebutuhan Sosial.</p> 	<p>Permintaan Pasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harga penawaran • Harga perjanjian (MoU) <p>Kebutuhan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran • Keikhlasan • Keterpanggilan 		<ul style="list-style-type: none"> • Pendistribusian (penjualan) hasil produksi sesuai dengan harga tertinggi • Pendistribusian (penjualan) hasil produksi berdasarkan nota kesepakatan bersama • Kesadaran dalam mengeluarkan zakat • Keikhlasan dalam berinfak • Ketreampilan dalam menghadiri undangan
<p>c. Konsumsi adalah penggunaan hasil produksi kelompok usaha</p>	<p>Kebutuhan Primer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Pangan 		<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan nasi/beras sebagai bahan pokok

	<p>dalam memenuhi kebutuhan, seperti <i>primary needs</i>, seperti sandang, pangan, dan papan; kedua, <i>secondary needs</i>, seperti sepatu, sepeda, pendidikan, dan sebagainya; ketiga, <i>tertiary needs</i>, seperti barang-barang mewah, dan; keempat, <i>quartary needs</i>, yakni barang-barang yang mubadzir</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan • Kemampuan • Keharusan/Kebiasaan • Status Kepemilikan <p>Kebutuhan Sekunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketercapaian • Keharusan • Kemampuan <p>Kebutuhan Tersier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan <p>Kebutuhan Quarter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebiasaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan makanan (Jagung/singkong) • Kemampuan dalam mengkonsumsi ikan dan daging • Keharusan mengkonsumsi sayur-sayuran dan kebiasaan mengkonsumsi makanan organik • Kepemilikan tempat tinggal <ul style="list-style-type: none"> • Ketercapaian tingkat pendidikan • Pentingnya kesehatan • Kemampuan biaya kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan membeli kendaraan • Kebiasaan merayakan hari ulang tahun
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



